

BUDAYA POLITIK
**KERAJAAN
BALANIPA
MANDAR**



AR

SYAHRIR KILA

BUDAYA POLITIK
KERAJAAN BALANIPA
MANDAR

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

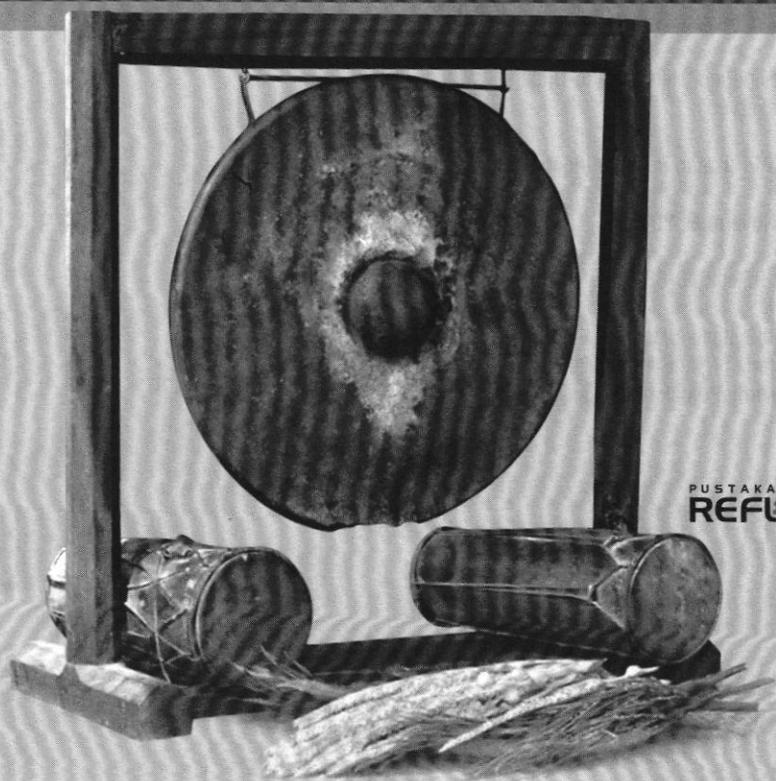
Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

S Y A H R I R K I L A

BUDAYA POLITIK
**KERAJAAN
BALANIPA
MANDAR**



PUSTAKA
REFLEKSI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar
Makassar: 2016
xx + 112 hal.; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © 2016 pada Penulis

Hak penerbitan pada Pustaka Refleksi. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbit Pustaka Refleksi.

Penulis : Syahrir Kila
Editor : Dr. Djumadi, M.Si.
Tata Visual : Narto Anjala

Penerbit:

PUSTAKA
REFLEKSI

Jln. Tamangapa Raya III

Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235

Telp. 0411-494086 – 5057064

Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116

Email : refleksibooks@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, November, 2015

ISBN : 978-979-3570-85-3

Buku ini Terbit atas kerjasama:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan Penerbit Pustaka Refleksi

PENGANTAR PENERBIT

PENERBITAN buku-buku sejarah lokal dalam pengertian luas merupakan tema yang senantiasa menghiasi terbitan kami sejak awal. Beberapa tahun belakangan ini, penerbitan dengan tema lokal merupakan bagian penting sebab selama ini dianggap masih kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan penerbitan tema-tema yang lainnya.

Dalam rangka untuk menutupi dari sebagian kekurangan itu, kami melakukan kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian dari para staf penelitiannya. Hasil-hasil penelitian yang kami terbitkan terdiri atas masalah-masalah kesejarahan dan nilai-nilai budaya yang selama ini merupakan kajian utama Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Buku yang sedang berada di tangan anda ini diberi judul Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar yang ditulis oleh Syahrir Kila, merupakan terbitan pertama. Kami yakin bahwa substansi dari isi buku ini masih relevan untuk diterbitkan dan semoga berguna untuk diketahui dan dipahami isi kandungannya. Nilai-nilai utama tentang kesejarahan yang terkandung dalam buku ini bersifat spesifik, khusus

bagi masyarakat Mandar yang mendiami eks Persekutuan Kerajaan Pitu Babana Binanga.

Keseluruhan isi buku ini menyajikan kembali episode awal adanya pemerintahan hingga masuknya Agama Islam di Kerajaan Balanipa. Hubungan kekerabatan dan politik antara kerajaan tersebut, sudah terjalin jauh sebelumnya. Terutama hubungan kekerabatan yang telah terjadi menjadikan anggota persekutuan kerajaan ini sulit untuk dipisahkan. Sedangkan hubungan politik lebih banyak mengarah kepada kepentingan masing-masing kerajaan dalam mempertahankan pengaruh kekuasaannya. Itulah sebabnya sehingga politik antar kerajaan di Sulawesi Selatan dan Barat berkembang sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

Penerbitan buku ini telah melibatkan banyak pihak sehingga patut kiranya mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Untuk maksud tersebut, kami dari pimpinan dan staf penerbit Pustaka Refleksi mengucapkan terima kasih kepada Syahrir Kila sebagai penulis, dan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan hasil penelitian stafnya. Serta semua pihak yang telah berkontribusi, dihaturkan terima kasih.

Pustaka Refleksi

PENGANTAR EDITOR

MESKIPUN sudah lebih dari tiga abad sesudah peristiwa sejarah ini terjadi, namun apresiasi masyarakat, khususnya masyarakat Mandar untuk mengetahui sejarahnya pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 masih cukup tinggi terutama bagi generasi mudanya, tak terkecuali masyarakat secara umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar dalam merealisasikan salah satu tugas dan fungsinya, untuk melakukan pengkajian masalah kesejarahan dan nilai budaya pada tahun 2014 telah melakukan beberapa penelitian, salah satu di antaranya berjudul Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar.

Buku ini, isinya dibagi dalam IV Bab. Pertama, menyangkut tentang pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai latar penelitian, masalah dan tujuan penelitian serta metode dan kajian yang relevan atau kajian terdahulu. Sedang pada bagian kedua memuat tentang profil singkat atau gambaran umum yang menjelaskan dan menguraikan tentang gambaran singkat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang sebelum tahun 2004 masih merupakan Provinsi Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, di samping juga memiliki

kekayaan berupa wisata agro, wisata religi, sosial dan arkeologi serta kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, juga diuraikan tentang perkembangan wilayah yang begitu cepat yang harus di-genjot untuk mengejar ketertinggalan sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan Belanda yang banyak merugikan masyarakat.

Selain kebijakan Belanda yang merugikan itu, juga dilakukan pemindahan ibukota kerajaan dari Tinambung ke Majene sehingga kota kecil Tinambung hanya tinggal kenangan. Hal ini sempat mendapat protes namun tidak dihiraukan. Ketika terjadi perubahan nama wilayah pemerintahan menjadi distrik yang awalnya berjumlah 27, kemudian dikurangi sehingga hanya berjumlah 11. Ini juga menjadi masalah sebab nama Tinambung sebagai distrik justru tidak muncul dan hanya menjadi bagian dari salah satu distrik itu, yaitu distrik Batulaya yang masuk wilayah *ana' banua* Todatodang. Dengan demikian kota kecil Tinambung yang bersejarah itu, kini hanya tinggal kenangan dan hanya dikenal sebagai salah satu kelurahan saja. Sementara nama Kerajaan Balanipa yang pernah melegenda itu hanya berstatus sebagai satu kecamatan yaitu Kecamatan Balanipa. Tapi kini, ada upaya untuk meningkatkan nama kerajaan tersebut menjadi satu nama kabupaten yaitu Kabupaten Balanipa yang sekarang prosesnya sedang berjalan.

Kerajaan Balanipa yang pernah melegenda di masanya, menurut catatan sejarah mulai eksis pada abad ke-16 sehingga jika dihitung mundur mulai dari sekarang, ia telah memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Pemerintahannya dimulai pada masa pemerintahan *Tomakaka* yang berlangsung cukup lama. Sesudahnya, adalah masa pemerintahan kerajaan yang diawali dengan pemerintahan I Manyambungi sebagai *mara'dia* yang pertama Kerajaan Balanipa. Jika diperhatikan hal tersebut, menggambarkan bahwa pendiri Kerajaan Balanipa bukanlah seorang *tomanurung* seperti kerajaan lain-

nya di Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri sebab pendirinya adalah seorang manusia biasa yang justru sebagian besar karier politiknya dihabiskan di Kerajaan Gowa (Makassar). Beliau sangat disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, apalagi karier puncak di Kerajaan Gowa adalah seorang Panglima Perang. Dari keberhasilan itu, beliau lalu dipanggil kembali ke Mandar untuk membebaskan daerah itu dari intervensi para *tomakaka* yang berkuasa ketika itu.

Pada bagian inti kajian ini digambarkan dan dijelaskan tentang lima perkara pokok, antara lain; bentuk dan sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan dengan susunan pemerintahan yang sangat sederhana dan tidak monarki otoriter. Artinya memang bentuknya kerajaan, tetapi wewenang seorang *mara'dia* dibatasi oleh perangkat sehingga dapat disebut sebagai bentuk demokrasi. Kondisi ini dapat dilihat dari isi sumpah yang diucapkan oleh *mara'dia* ketika ia diambil sumpahnya oleh *Puang* Dipoyosang atas nama rakyat. Inti isi dari sumpah tersebut adalah seorang *mara'dia* dalam menjalankan roda pemerintahannya, tidak boleh melanggar sumpah itu, apalagi ia senantiasa diawasi oleh para pemangku adat. Kalau terjadi pelanggaran atas isi sumpah yang telah diucapkan, dipastikan ia akan diganti atau dipecat dari kedudukannya.

Perkembangan Kerajaan Balanipa pasca pemerintahan I Manyambungi mengalami kemajuan yang pesat. Hal itu tidak dapat dipisahkan dengan nama besar I Manyambungi. Beliaulah yang melatakkkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis dan seimbang antara peran kelompok pemangku adat dengan peran *mara'dia* sebagai penguasa wilayah. Artinya kekuasaan yang dimiliki oleh *mara'dia* dibatasi dan diawasi oleh pemangku adat yang dikenal dengan nama *Dewan Adat Sappulo Sokko*. Oleh sebab itu, *mara'dia* dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak akan berbuat se-

wenang-wenang sebab akibatnya sangat fatal sebab dapat berujung pada pemecatan. Meski demikian, kenyataannya bahwa pemecatan seorang *mara'dia* di Kerajaan Balanipa sering terjadi yaitu sebanyak 13 kali. Uniknya, sebab meski telah dipecat dari jabatannya sebagai *mara'dia*, namun ia dapat diangkat kembali pada masa pemerintahan yang berbeda.

Selain meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang seimbang, I Manyambungi juga telah membuat aturan menyangkut persyaratan seorang calon *mara'dia* yang menjadi pedoman sepanjang sejarah kerajaan ini. Aturan-aturan inilah yang memungkinkan pada perkembangan berikutnya, seorang calon *mara'dia* tidak mutlak berasal dari anak yang dilahirkan ketika ia berkuasa. Kenyataan itu menunjukkan bahwa Kerajaan Balanipa tidak mengenal adanya putra mahkota, tetapi yang ada ialah *ana' pattola payung* yang di dalamnya terdiri atas anak *mara'dia*, dan kemanakan. Oleh sebab itulah jika diperhatikan *mara'dia* Balanipa yang pernah berkuasa, hanya *mara'dia* pertama yang digantikan oleh putranya.

Pelantikan I Manyambungi sebagai *mara'dia* Balanipa pertama merupakan awal terbentuknya budaya politik di kerajaan ini. Cara dan sistem pelantikan beliau merupakan aturan yang dijadikan sebagai pedoman secara turun temurun. Bukan hanya itu, bagi anggota dewan *Ada' Sappulo Sokko* pelantikannya memiliki cara tersendiri dan berbeda dengan tata cara pelantikan seorang *mara'dia*. Anggota dewan adat adalah perangkat pemerintahan kerajaan yang berkedudukan di pusat kerajaan sebagai pembantu *mara'dia* dan posisinya di bawah *mara'dia*. Selain itu, anggota dewan adat juga berfungsi sebagai anggota legislator yang bertugas mengangkat dan memberhentikan seorang *mara'dia* atas nama rakyat. Pada fungsi itu, ia lebih tinggi kedudukannya dari seorang *mara'dia*.

Pencalonan, pelantikan dan pemberhentian seorang *mará'dia* telah diatur oleh I Manyambungi sebelum meninggal dunia. Dan rupanya, sepanjang perjalanan sejarah daerah ini, apa yang telah ditetapkan oleh I Manyambungi menjadi acuan secara turun temurun. Dan apa yang belum lengkap, kemudian disempurnakan oleh penguasa berikutnya. Salah satu contoh yang dilengkapi keanggotaannya adalah Dewan *Ada' Sappulo Sokko* yang pada awal terbentuknya kerajaan hanya terdiri atas empat orang anggota dan ketika Tomepayung naik menggantikan ayahnya, maka kenggotaan itu dilengkapi menjadi 10 orang sehingga disebutlah Dewan *Ada' Sappulo Sokko* yang berarti sepuluh orang pemegang kekuasaan di bidang adat.

Cikal bakal munculnya budaya politik awal, adalah juga merupakan awal berdirinya Kerajaan Balanipa di Mandar. Berdirinya kerajaan ini memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya sebab dapat merasakan bagaimana kehidupan berbangsa yang tertata dan teratur dengan baik. Juga dapat memberi warna tersendiri bagi kehidupan politik kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya dalam perkembangannya, budaya politik lintas kerajaan gencar dilakukan terutama pada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya ketika itu. Selain itu, bagi kerajaan lain mengikat tali kekeluargaan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar, terutama Kerajaan Balanipa sangat menguntungkan. Alasannya, sebab Kerajaan Balanipa adalah satu-satunya kerajaan yang memegang peranan politik yang sangat penting di kawasan Mandar pada abad ke-16 dan ke-17. Peranan penting Kerajaan Balanipa dalam dinamika politik pada masa itu, menyebabkan para raja dari beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan melakukan perkawinan politik dengan bangsawan dari daerah ini.

Sementara itu, hubungan antara *mara'dia* dan pejabat pe-mangku adat adalah merupakan hubungan fungsional yang proporsional dalam budaya politik lokal. Hubungan ini tampaknya sudah mulai dipraktekkan pada masa pemerintahan I Manyambungi dan semakin ketat lagi pada masa pemerintahan Tomepayung. Hubungan antar pejabat ini sangat unik sifatnya sebab dapat terjadi pada dua arah, yaitu bila dewan adat posisinya sebagai pembantu *mara'dia*, kedudukannya berada di bawah posisi *mara'dia*. Sebaliknya bila ia berkedudukan sebagai anggota dewan adat, posisinya di atas *mara'dia*. Begitu juga posisi anggota Dewan Adat *Kaiyang* yang anggota-anggotanya merupakan penguasa wilayah *Appe Banua Kaiyang* mempunyai hubungan dengan *mara'dia* pada dua sisi yang berbeda. Bila ia berkedudukan sebagai anggota dewan adat besar, maka kedudukannya berada di atas *mara'dia*, sebaliknya bila kedudukannya sebagai penguasa wilayah di wilayah masing-masing, ia berada di bawah kekuasaan *mara'dia*.

Hubungan antara pejabat tinggi kerajaan dengan masyarakat, tidak terjadi secara langsung, tetapi tidak tertutup kemungkinan hubungan itu akan terjadi sebaliknya. Hubungan yang memungkinkan terjadi secara langsung adalah anggota *Ada' Kaiyang* dan anggota-anggota Dewan *Ada' Sappulo Sokko* bilamana keduanya berada pada posisi sebagai penguasa wilayah kerajaan. Sementara hubungan antara *mara'dia* dan rakyat sangat jarang terjadi secara langsung, kecuali pada pertemuan-pertemuan resmi kerajaan. Paling sering berhadapan dengan masyarakat adalah pejabat pada level terendah yang urusannya lebih banyak menyangkut kehidupan masyarakat secara umum.

Kondisi kekinian menyangkut wilayah Kerajaan Balanipa dan perangkat pemerintahannya masih dapat ditelusuri keberadaannya, terutama pada wilayah inti kerajaan. Nama-nama wilayah kerajaan

terlihat jelas hanya nama pada level kecamatan dan kelurahan atau bahkan hanya sebuah nama kampung atau dusun saja. Ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah daerah terhadap sejarahnya sendiri kurang mendapat perhatian. Paling tidak pemerintah kabupaten dapat memberikan apresiasinya dengan melakukan pendataan secara menyeluruh menyangkut objek atau peninggalan sejarah yang masih terdapat di mana-mana di daerah ini. Terkecuali pada perangkat adat yang pernah eksis di masa kerajaan, kini telah diaktifkan kembali meski fungsinya tidak seperti pada masa kerajaan dulu. Ini dapat dipahami sebab negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang secara prinsipil berbeda dengan kerajaan.

Informasi yang tercantum dalam buku ini, memang sudah pernah ditulis sebelumnya. Akan tetapi, penulisnya mampu menyajikan data secara lugas sehingga gampang dimengerti dan dipahami. Beberapa informasi yang disampaikan dalam buku ini digali dari berbagai sumber primer yang berupa *lontarak* yang selama ini jarang bisa kita ketahui sebab disakralkan oleh pemiliknya. Tetapi atas bantuan dari teman-teman sehingga beberapa *lontarak* yang dimaksud dapat diperoleh oleh penulis yang selama ini jarang dikutip oleh penulis lainnya.

Kami mengharapkan, buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi semua kalangan sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan kita. Juga diharapkan bahwa dengan terbitnya buku ini dapat menambah panjang jejeran buku-buku di perpustakaan umum maupun pribadi. Buku ini layak untuk dibaca sebab isinya masih dibutuhkan untuk memahami latar sejarah kita sebagai bangsa yang besar dan majemuk.

Akhirnya, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang sejak dari awal hingga terbitnya buku ini yang telah berkontri-

busi langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini memberikan tambahan wawasan dan menambah khasanah pengetahuan kita di bidang sejarah lokal. Amin.

Editor

PENGANTAR PENULIS

PUJI dan syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi, sebab dengan hidayahnya-Lah sehingga buku ini dapat terbit untuk pertama kalinya. Dalam melakukan penelitian dan penulisan hingga terbitnya sebagai buku, penulis banyak mengalami kesulitan dalam memperoleh data dan keterangan. Di lapangan, sangat sedikit sumber sekunder yang dapat diperoleh, terutama dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Polman dan Kabupaten Majene, kalau ada yang diperoleh itupun hanya berupa foto copy *lontarak*. Kondisi seperti ini, bukan hanya dialami oleh perpustakaan kedua daerah yang dimaksud, tetapi merata pada semua perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali yang ada di Makassar.

Untuk melengkapi data dan keterangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian ini, lebih banyak dilakukan kajian pustaka pada beberapa perpustakaan di Makassar, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus pada unit kerja- unit kerja dan Lembaga Perguruan tinggi. Selain itu, penulis banyak mendapatkan bantuan data sekunder berupa buku-buku teks, artikel dan jurnal penelitian dari teman-teman di daerah. Sedang sumber primer berupa *lontarak*, diperoleh dari Perpustakaan Museum Majene serta Arsip

dan Perpustakaan Kabupaten Polman yang berupa foto copy yang sudah dialihbahasakan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagian dari buku-buku teks yang dijadikan sebagai rujukan dalam kajian ini diperoleh dari teman-teman peneliti, antaranya Drs. Muhammad Amir, M.Si dan Drs. Bahtiar. Di samping itu, tentu koleksi pribadi yang dimiliki sendiri oleh penulis. Sebagian kecil lainnya diperoleh dari perpustakaan daerah di mana penelitian ini dilakukan.

Kenyataan itu menggambarkan bahwa buku di tangan pembaca ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dorongan, bantuan dan kemuliaan hati dari semua pihak, baik instansi pemerintah maupun pribadi. Untuk itu, pada tempatnyalah saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Dra. Hj. Lindiastuti Setiawati, MM. yang selama ini telah memberikan kesempatan dan kepercayaan, arahan dan bimbingan, mulai dari tahapan-tahapan penelitian hingga terwujudnya sebagai buku.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada DR. Djumadi, M.Si. selaku konsultan. Meskipun beliau dalam kondisi sibuk mengajar di perguruan tinggi, namun beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksian dan dorongan sehingga buku ini terwujud seperti sekarang. Tanpa bantuan dan telaah dari beliau, kemungkinan buku ini akan mengalami keterlambatan cetak. Ucapan terima kasih yang sama kepada DR. Edwar, L. Poelingomang yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan beberapa buku sumber yang sangat berguna dalam kajian ini.

Selain itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada rekan saya di daerah, yaitu bapak Tammalele dan teman-temannya di Museum Majene yang telah mendampingi saya selama berada di daerah. Beliau lah yang paling berjasa dalam hal

pengumpulan data lapangan sebab dari beliau saya memperoleh sumber-sumber, baik lisan maupun tulisan. Tidak terbatas sampai di situ, bahkan kontak via telponpun sering kali saya lakukan jika terbentur pada satu masalah ketika buku ini masih dalam penyelesaian. Teristimewa ucapan terima kasih kepada almarhum Bapak Akhmad dan isterinya yang setiap kali saya ke Provinsi Sulawesi Barat pasti beliau bersama dengan istrinya menemui saya meskipun ia sibuk.

Akhirnya, buku yang saya susun ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya persembahkan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan saya sadari bahwa isi kandungan buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kesalahan dan kekurangan isi dari buku ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya pribadi. Untuk perbaikannya di masa mendatang, penulis berharap saran dan kritik dari sidang pembaca, Amin.

Penulis

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT.....v

PENGANTAR EDITOR.....vii

PENGANTAR PENULIS.....xv

ISI BUKU.....xix

BAGIAN I PENDAHULUAN.....1

- Latar Penelitian.....2

BAGIAN II GAMBARAN UMUM.....13

- Profil Singkat.....14
- Balanipa Sebelum Menjadi Kerajaan.....19
- Proses Lahirnya Kerajaan Balanipa.....27

**BAGIAN III BENTUK PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN
ANTAR PEJABAT DENGAN MASYARAKAT.....63**

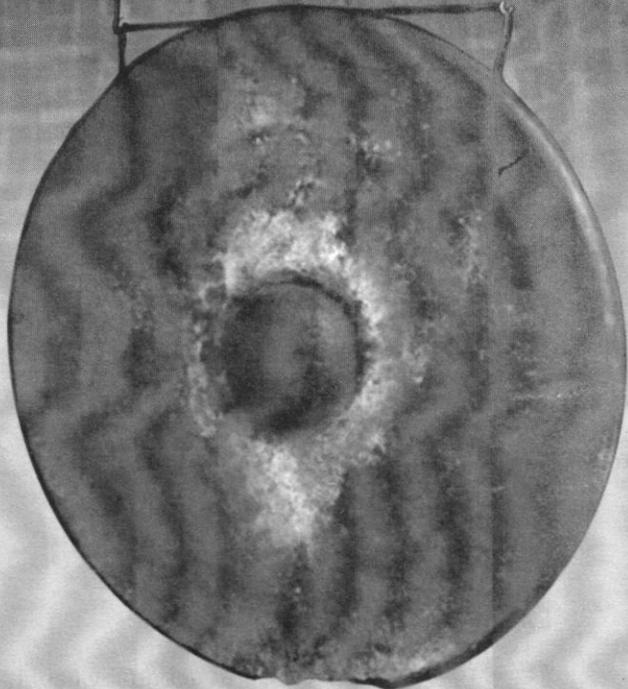
- Bentuk dan Sistem Pemerintahan.....64
- Sistem Pemilihan *Mara'dia*.....67
- Struktur Pemerintahan.....70
- Pengangkatan *Mara'dia*.....71
- Pemberhentian *Mara'dia*.....77
- Hubungan Pejabat dengan Masyarakat.....81
- Kondisi Kekinian.....88

BAGIAN IV PENUTUP.....97
• Kesimpulan.....98

DAFTAR PUSTAKA.....103

INDEKS.....107

TENTANG PENULIS.....111



BAGIAN I

PENDAHULUAN

LATAR PENELITIAN

Provinsi Sulawesi Barat sebagai wilayah pemekaran dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki karakteristik budaya yang tercermin dalam aneka ragam budaya atau adat istiadat yang hidup dan berkembang hingga kini. Corak tersebut mempengaruhi faktor sosio-historis yang merupakan variable penting dalam memahami politik lokal masyarakat Mandar, di Balanipa. Kajian akademis tentang masalah politik lokal mungkin sudah ada yang mengkajinya, tetapi secara khusus menyangkut politik lokal masyarakat Mandar di Kerajaan Balanipa masih jarang dilakukan oleh para akademisi setempat.

Pengkajian tentang politik lokal dalam perspektif sejarah Sulawesi Barat, mengarahkan perhatian pada kehidupan politik pemerintahan kerajaan-kerajaan pada masa lampau, seraya menelusuri pemikiran para cerdik pandai tentang bagaimana seharusnya seorang pemerintahan dalam mengelola suatu kerajaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perhatian akan difokuskan pada persoalan politik pemerintahan pada Kerajaan Balanipa, Mandar. Penelusuran itu diharapkan dapat memberikan informasi dan data bagi kita untuk

merumuskan tentang akar-akar pemerintahan yang sesungguhnya menunjukkan ciri kehidupan politik yang merupakan jati diri kehidupan bernegara rakyat Sulawesi Barat. Juga akan ditelusuri dan diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan peranan rakyat dalam kehidupan politik pemerintahan.

Kajian awal tentang politik lokal di Kerajaan Balanipa diawali oleh kepemimpinan *tomakaka* yang pada mulanya diharapkan dapat menjamin ketentraman dan mengayomi masyarakat secara konsekuen dan berkelanjutan, tetapi dalam perkembangannya tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh adanya *tomakaka* seperti *tomakaka* Passokkorang, *tomakaka* Lerang, *tomakaka* Lenggo dan *tomakaka* Lempong, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat (Asdy, 2003:49). Bahkan para *tomakaka-tomakaka* yang disebutkan itu, pada umumnya berambisi untuk menguasai *tomakaka* lainnya ketika itu. Hal tersebut mengakibatkan kekacauan dan ketidaktentraman di dalam kehidupan masyarakat.

Realitas laku dan perbuatan para *tomakaka* itu mengakibatkan empat ke-*tomakaka*-an (Napo, Samasundu, Todatodang dan Mosso) secara bersama-sama mempersatukan wilayah mereka dalam satu ikatan kebersamaan yang kemudian disebut *appe banua kaiyang* (empat negeri besar) (Rahman, 2014:174). Ikatan kebersamaan itu dimaksudkan untuk menghadapi ancaman dari para *tomakaka-tomakaka* yang berambisi besar untuk menguasai wilayah mereka. Kenyataan menunjukkan lain sebab pembentukan ikatan wilayah *appe banua kaiyang* tidak dapat mengatasi ancaman dan gangguan dari *tomakaka* yang dimaksud.

Menyadari ketidakmampuan *appe banua kaiyang* untuk menghadapi sikap agresif dari para *tomakaka* tersebut, maka ia mencari alternatif dengan mencari figur pemimpin yang dapat menyelamatkan-

kan rakyat dan negeri mereka dari gangguan dan ancaman itu. Upaya itu akhirnya ditujukan kepada I Manyambungi yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Anggapan itu didasarkan pada kenyataan bahwa beliau selama tinggal di Kerajaan Gowa (Makassar) telah berhasil memenangkan peperangan membantu Kerajaan Gowa. Itulah sebabnya dikemudian hari hubungan antara Kerajaan Gowa (Makassar) dengan Kerajaan Balanipa sangat erat. Terutama hubungan kekerabatan terjadi sebab I Manyambungi kawin dengan seorang putri bangsawan Gowa yang melahirkan seorang anak yang bernama Tomepayung yang dikemudian hari naik menjadi *mara'dia* Balanipa ke-2.

Siapa sebenarnya I Manyambungi sehingga dipilih oleh *appe banua kaiyang* menjadi pemimpin mereka. Dalam *Lontarak* Mandar, Balanipa diyatakan bahwa; Asal usul penduduk (*tomanurung*) dikatakan berasal dari Hulu Saddang. Ia kemudian kawin dengan seorang *tomanurung* yang bernama Tokombong Dibura dan melahirkan beberapa orang anak yang kemudian menyebar keberbagai daerah di Sulawesi Selatan (sebelum pemekaran wilayah). Salah seorang anaknya bernama Ibokkapadang kawin dengan Isanrabone dan melahirkan anak yang bernama Ibeloratte. Anak ini kemudian kawin dengan Tomettengbassi yang melahirkan sebelas orang anak. Salah seorang dari kesebelas orang bersaudara tersebut bernama Tupali melahirkan Tabittoeng dan Tabittoenglah yang melahirkan Taurra-urra. Ia lalu kawin di Lemo, maka lahirlah I Weapes dan I We Apeslah yang kawin dengan Puang Digandang maka lahirlah seorang anak yang bernama I Manyambungi (Mandra,dkk. 1986:110-111).

Berdasarkan gagasan pemikiran tersebut, maka dalam perkembangan berikutnya, akan diungkapkan tentang penataan awal kehidupan politik pemerintahan. Beberapa kajian telah dilakukan menyangkut sistem pemerintahan di Kerajaan Balanipa, Mandar,

menunjukkan bahwa pembentukan awal pemerintahan yang teratur bukan diawali dengan gagasan *tomanurung*, tetapi justru dimulai dari salah seorang cucunya yang bernama I Manyambungi. Kepada beliauulah dibebankan dipundaknya sebagai pemegang puncak kepemimpinan setelah diabsyahkan dengan "kontrak pemerintahan". Kontrak pemerintahan itu dilakukan antara dewan pemangku adat yang mewakili rakyat dengan calon pemegang kendali politik yang dipandang layak untuk dinobatkan menjadi penguasa mereka. Mereka yang telah dilantik itu, kemudian disebut dengan *mara'dia* atau raja.

I Manyambungi adalah bangsawan Mandar, justru tidak berjuang di tanah leluhurnya, namun ia berhasil mendirikan Kerajaan Balanipa dan sekaligus menjadi *mara'dia* pertama di Kerajaan Balanipa. Pembentukan kesatuan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya Kerajaan Balanipa, dengan pusat pemerintahan di Napo. Dengan berdirinya Kerajaan Balanipa berarti bentuk pemerintahan *appe banua kaiyang* menjadi Kerajaan Balanipa, yang berakibat terjadinya perubahan pada nama gelar pemimpin mereka dari *tomakaka* menjadi *papuangan* (yang dipertuan atau yang disapa *puang*). Sedangkan I Manyambungi sebagai *mara'dia*, ia disapa dengan sapaan *daeng*. Mereka masing-masing mempunyai kekuasaan, terutama mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Dalam perkembangannya para *papuangan*, selain sebagai ketua persekutuan adat, juga menjadi anggota dari lembaga adat yang dikenal dengan nama dewan *ada' kaiyang* (adat besar). Dewan inilah yang kemudian berhak memilih dan mengangkat serta memberhentikan seorang raja yang disebut dengan *mara'dia* dalam Kerajaan Balanipa. Adat *kaiyang* ini terdiri atas para *papuangan* yang berasal dari wilayah *appe banua kaiyang*. Setiap wilayah *appe banua*

kaiyang memiliki wilayah tersendiri dan mempunyai pula dewan adat tersendiri (Rahman, 2014: 174). Dewan *ada'* wilayah *Appe Banua Kaiyang* dinamakan *ada' keccu* (adat kecil).

Terbentuknya Kerajaan Balanipa dan diangkatnya I Manyambungi sebagai *maradia* yang pertama berarti sejak itu awal budaya politik mulai terbentuk. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang penting dalam percaturan politik di Sulawesi Barat. Kerajaan ini dikemudian hari lalu membentuk persekutuan di wilayah Mandar yang dikenal sebagai persekutuan kerajaan *Pitu Babana Binanga* atau persekutuan tujuh kerajaan di muara sungai. Persekutuan ini menempatkan Kerajaan Balanipa sebagai ketua atau bapak dan Kerajaan Sendana sebagai ibu serta lima kerajaan lainnya sebagai anggota.

Sejak terbentuknya kerajaan ini, politik terjadi beberapa kali sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dinamika itu terutama terjadi pada masa pemerintahan *maradia* Balanipa berikutnya, yaitu Tomepayung dan mencapai puncaknya ketika agama Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan. Selain itu, dinamika politik juga tampaknya terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa yang terakhir itulah sikap politik Kerajaan Balanipa terjadi secara nyata sebab Arung Palakka yang dibantu oleh Belanda telah mengalahkan Kerajaan Gowa yang ketika itu adalah merupakan sekutu utama Kerajaan Balanipa. Dari gagasan pemikiran ini sehingga yang dijadikan sebagai pokok bahasan adalah konsep awal terbentuknya Kerajaan Balanipa sampai masa pembentukan sistem pemerintahan pertama hingga masa masuknya agama Islam.

Berangkat dari gagasan pemikiran tersebut, rumusan pertanyaan penelitian ini mencakup: Bagaimana terjadinya politik awal dan terbentuknya sistem pemerintahan pertama serta tata cara pemilihan *maradia* ? Bagaimana hubungan antara penguasa dan

rakyat (pusat dan daerah)? Sementara itu, tujuan utama studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya politik awal dan sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa serta bagaimana tata cara pemilihan seorang *mara'dia*. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara penguasa pusat dan daerah serta bagaimana pola hubungan antara penguasa pusat dan penguasa daerah atau wilayah. Selain itu, tujuan lain penelitian ini adalah untuk merealisasikan atau melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, yaitu melakukan penelitian di bidang sejarah.

Studi tentang politik lokal di Kerajaan Balanipa, Mandar Provinsi Sulawesi Barat sangat konflik oleh sebab di wilayah ini terdapat banyak kerajaan yang berdaulat. Setidaknya ada empat belas kerajaan besar, yaitu tujuh berada di pesisir atau muara sungai yang dikenal dengan nama Persekutuan Pitu Babana Binanga (PBB), sedang tujuh lainnya berada di pegunungan lazim dikenal dengan nama Persekutuan Pitu Ulunna Salu (PUS). Kajian ini tidak diarahkan untuk mengkaji keempatbelas kerajaan tersebut, tetapi hanya sebatas pada Kerajaan Balanipa saja.

Berpangkal dari uraian di atas, tampak bahwa penelitian dan penulisan ini akan diawali dengan penelusuran tentang pembentukan politik awal pemerintahan yang terorganisasi sebagai suatu kerajaan yaitu Kerajaan Balanipa. Setelah itu, akan ditelusuri tentang sistem pemerintahan kerajaan dan pola pemilihan penguasa atau *mara'dia*. Selain itu, akan dijelaskan dan diuraikan tentang dinamika struktur pemerintahan kerajaan serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Pembacaan awal yang telah dilakukan sebelumnya terhadap beberapa sumber, ditemukan kajian atau sumber yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian ini seperti : Mandra,dkk. (1986).

Lontarak Mandar-Balanipa(terjemahan). Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Isi naskah *lontarak* ini antara lain menceritakan tentang asal mula adanya manusia di Pitu Babana Binanga, lebih spesifik membahas tentang Kerajaan Balanipa dari awal hingga masuknya agama Islam serta masa kekuasaan Belanda di Mandar. Isi *lontarak* ini tidak tersusun secara kronologis sehingga kadang membingungkan kita dalam membacanya. Azis Syah, (1992). *Lontarak Pattodioloang di Mandar Jilid I dan II* (terjemahan). Ujung Pandang: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Taruna Remaja. *Lontarak* ini berisikan tentang peristiwa-peristiwa sejarah dan perbuatan-perbuatan raja dan sifat-sifatnya. Selain itu, juga diuraikan tentang pergantian raja (*mara'dia*). Kalau dibaca dengan cermat mengenai *lontarak* ini maka sebenarnya di dalamnya terkandung banyak sekali persoalan sejarah yang pernah dihadapi oleh Kerajaan Balanipa mulai ketika I Manyambungi kembali ke Mandar hingga Mandar diserang oleh Arung Palakka serta ketika Daeng Riosok membantu Arung Palakka pada perkembangan selanjutnya. Ahmad, (2010). *Lontarak BangsaE, Mandar* (terjemahan). Majene: Pemerintah Kabupaten Majene (Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Majene). Di dalam *lontarak* ini dijelaskan bagaimana Kerajaan Pitu Babana Binanga eksis dalam percaturan politik kerajaan pada masa itu. Selain itu, juga beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada jaman kerajaan, antaranya awal berdirinya Kerajaan Balanipa, Kerajaan Banggae dan Kerajaan Pamboang serta Sendana. Juga disinggung tentang masa pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan, serta pergantian *mara'dia* dari masa ke masa. Suradi Yasil, dkk. (1985). *Lontarak Pattappingang Pamboang, Mandar* (terjemahan). Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Lontarak* ini berisikan berbagai peristiwa sejarah

yang terjadi di sekitar kerajaan-kerajaan Pitu Babana Binanga di Mandar. Antaranya adalah sejarah asal usul manusia dan para bangsawan raja/adat di Mandar serta perkembangannya. Sejarah peperangan yang terjadi di Mandar dan di luar Mandar serta silsilah raja-raja Mandar Pitu Babana Binanga pada periode tertentu. Di dalam *lontarak* ini, juga disebutkan tentang penentuan batas-batas empat kerajaan di Mandar, yaitu Kerajaan Balanipa, Kerajaan Banggae, Kerajaan Pamboang dan Kerajaan Sendana. Ketika itu, tapal batas antara keempat kerajaan tersebut sering menjadikan alasan terjadinya peperangan sebab tidak adanya batas nyata antara mereka. Jadi inti dari isi *lontarak ini* adalah menjelaskan secara rinci batas-batas wilayah (*pattappingang*) keempat kerajaan itu.

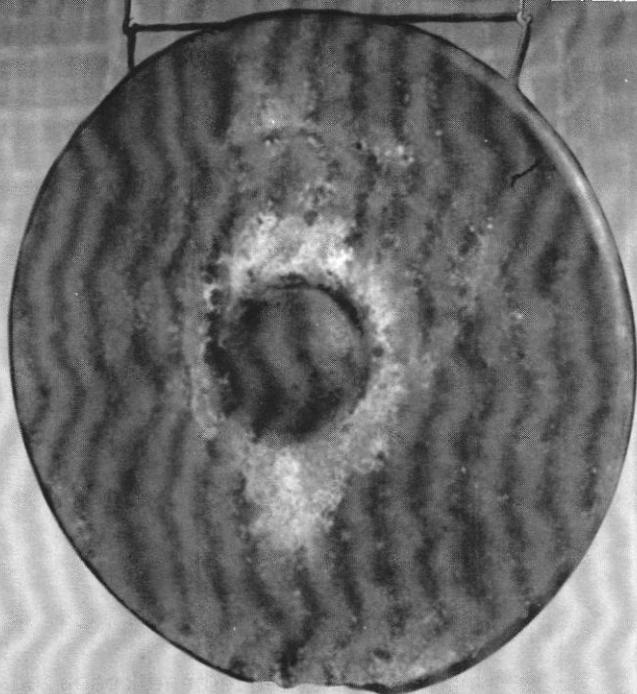
Selain itu, terdapat buku-buku teks yang diperoleh, antara lain; Syahrir Kila, (2013), *Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa dan Perkembangannya*. Makassar: De la macca. Studi ini membahas tentang awal terbentuknya budaya politik awal Kerajaan Balanipa dan perkembangannya hingga memasuki masa pemerintahan Belanda. Selain itu, dijelaskan bahwa Kerajaan Balanipa didirikan oleh I Manyambungi, justru bukan oleh *tomanurung* seperti halnya kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Perbedaan spesifik seperti itulah yang menarik di Kerajaan Balanipa. Dalam perkembangannya, Kerajaan Balanipa mengalami beberapakali peperangan, baik antara sesama Pitu Babana Binanga, maupun terhadap kerajaan lokal lainnya. Muh. Amin Daud. (2007). *Mengenai Struktur dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa, Mandar*. Polewali Mandar: Lembaga Kerapatan Warga Istiadat Budaya Balanipa, Mandar. Kajian ini membahas tentang struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa yang diawali dengan pembentukan Kerajaan Balanipa oleh I Manyambungi Todilaling. Pada bagian lain, juga dijelaskan tentang awal mula dibentuknya dewan hadat

kerajaan (dewan adat kaiyang) yang kemudian berkembang menjadi dewan *adat sappulo sokko*. Dewan ini juga mengalami perubahan sesuai dengan zamannya, ketika jaman Belanda dewan ini mengalami perubahan dengan mengurangi jumlah anggotanya menjadi enam orang saja, namun ketika *mara'dia* dikembalikan fungsinya seperti sedia kala, maka dewan ini dikembalikan anggotanya menjadi sepuluh orang sehingga namanya juga disebut dewan *ada' sappulo sokko*.

Lokasi penelitian ini sekaligus sebagai batasan spasialnya adalah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada kenyataan bahwa lokasi Kerajaan Balanipa berada di daerah ini. Di wilayah ini diketahui pernah eksis 14 buah kerajaan yang tergabung dalam dua persekutuan yang cukup ternama, yaitu Persekutuan Pitu Babana Binanga dan Persekutuan Pitu Ulunna Salu. Sedangkan batasan temporalnya adalah mulai berdirinya Kerajaan Balanipa hingga masuknya agama Islam. Sementara sumber data yang dipergunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diposisikan pada kajian naskah lokal berupa kronik dan *lontarak* serta tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, termasuk tugas akhir dari mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi), dan jurnal ilmiah. Sedangkan data sekunder berupa buku-bukuteks, dan laporan penelitian lainnya.

Untuk mendapatkan kedua jenis data tersebut, dilakukan pencarian data pada beberapa perpustakaan, antaranya; Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Polman, Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Kotamadya Makassar, Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar serta Perpustakaan Rias Rasyid Daeng Lurang yang terletak di Sungguminasa Kabupaten Gowa. Langkah pencarian data seperti itu dikenal dengan istilah heuristis yang merupakan salah satu tahapan dalam metode penelitian sejarah, yaitu penelitian yang mempelajari terjadi-

an-kejadian atau peristiwa masa lampau. Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, yakni dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi secara sistematis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dalam memperoleh kesimpulan yang kuat. Metode sejarah meliputi empat tahapan yaitu; mencari dan menemukan sumber (heuristis); kritik sumber yang meliputi kritik intern dan kritik ekstern; interpretasi (data dan keterangan yang telah diperoleh diinterpretasi sesuai dengan kategorinya) atau upaya perangkaian penafsiran fakta-fakta menjadi keseluruhan makna yang harmonis dan masuk akal; historiografi adalah tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, yaitu penyampaian hasil rekonstruksi yang sesuai dengan data yang didapat oleh peneliti, hingga menjadi suatu kisah sejarah. Dalam tahapan ini unsur objektif dan subjektif peneliti sudah masuk di dalamnya (Kuntowijoyo, 1994: 98-99).



BAGIAN II

GAMBARAN UMUM

PROFIL SINGKAT

Sulawesi Barat yang terbentuk pada 2004 berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani pada 22 September 2004. Wilayah ini meliputi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara. Dengan demikian, daerah mekaran Provinsi Sulawesi Selatan ini meliputi wilayah *Onder Afdeling* Mandar pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Orang Mandar merupakan kelompok etnis terbesar penghuni provinsi ini, namun etnis lainnya juga banyak yang tersebar pada beberapa wilayah lain. Suku Jawa juga, merupakan etnis yang cukup besar jumlahnya dan telah membentuk satu perkampungan yang kini dikenal dengan nama Wonomulyo. Perkampungan ini kemudian berkembang menjadi nama kecamatan, yaitu Kecamatan Wonomulyo. Etnis Jawa yang terdapat di daerah ini merupakan pendatang (koloni) dalam 1937 karena kondisi daerahnya ketika itu dalam keadaan perang.

Salah satu dari kabupaten tersebut di atas dijadikan sebagai lokasi penelitian secara umum, yaitu Kabupaten Polewali Mandar

(Polman), yang berjuluk Bumi Tupalayo. Sebelumnya, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), tetapi pasca pemekaran wilayah namanya diubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berdasarkan PP. Nomor 74 Tahun 2005 tanggal 1 Januari 2006. Wilayah ini pada masa kerajaan mempunyai ceritera tersendiri dan sampai sekarang sulit untuk dilupakan oleh masyarakatnya, yaitu mengenai keberadaan suatu kerajaan besar yang bernama Kerajaan Balanipa. Kerajaan yang dimaksud itu, adalah merupakan “bapak” dari Persekutuan Kerajaan-Kerajaan Pitu Babana Binanga. Kerajaan ini pula yang dikemudian hari menjadi acuan pola perilaku politik kerajaan di wilayah ini pada masa kerajaan. Wilayah ini sekarang berada antara tapal batas Kabupaten Pinrang di sebelah timur.

Kabupaten Polman memiliki luas 2.022,30 km dengan jumlah wilayah kecamatan sebanyak 16 buah. Terletak pada 2°40,00′–3°32′0″ Lintang Utara dan 118°40′27″–119°32′27″ Bujur Timur yang berbatasan dengan; Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang pada sebelah Timur, Sulawesi Selatan dan pada sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. Dan batas sebelah Selatan adalah Selat Makassar, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene. Penduduk yang mendiami daerah ini berjumlah 455.572 jiwa membuat wilayah ini kaya akan sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penyokong kehidupan sosial budaya masyarakat. Jumlah penduduk tersebut, setiap saat siap menemani para pendatang dan memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan dan kunjungan kepariwisataan. Sebab diketahui dan dipahami bahwa kabupaten ini adalah sebuah kabupaten yang dihuni oleh warga yang sangat terbuka dan mudah untuk melakukan interaksi positif kepada setiap pendatang.

Meskipun Kabupaten Polman memiliki penduduk yang tidak terlalu padat, tetapi aktivitas perekonomian kabupaten ini sangat

dinamis. Kota Polewali sebagai ibukota kabupaten menjadi urat nadi perekonomian wilayah Sulawesi Barat. Hingga saat ini, aktivitas penduduk Polewali adalah bertani, nelayan laut dan menjadi pegawai pemerintah. Selain itu, mata pencaharian tertua di wilayah ini, yakni penenun kain sutera yang terkenal yakni sutera Mandar (kini masih banyak ditemukan). Juga terdapat banyak pedagang antar pulau yang cukup terkenal dari dulu hingga sekarang.

Wilayah ini memiliki setumpuk kekayaan alam yang luar biasa dan kurangandingannya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Di antara potensi-potensi itu berupa kekayaan alam maritim dan kekayaan pedalaman lengkap dengan kekhasan kehidupan sosial kebudayaan masyarakat yang berdiam di pesisiran dan pedalaman. Itulah sebabnya sehingga wilayah ini termasuk kabupaten agraris dan maritim yang sangat layak untuk diperhitungkan dan dimasukkan dalam agenda destinasi kepariwisataan. Selain itu, kabupaten ini juga kaya dengan kekuatan potensi wisata ritual, wisata agro, wisata sosial, arkeologi dan kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri. Belum lagi pola dan desain arsitektur serta beragam kesenian tradisional. Hal itu dapat dilihat pada kalender even seni budaya di Bumi Tinalayo.

Secara khusus lokasi penelitian ini terutama dipusatkan di daerah Tinalayo dan sekitarnya, daerah ini terletak di muara Sungai Mandar. Sekarang daerah ini menjadi kecamatan, yaitu Kecamatan Tinalayo. Dulu di kecamatan ini tergabung dengan daerah Limboro dan Balanipa yang sekarang telah dimekarkan dan menjadi kecamatan tersendiri, yaitu Kecamatan Balanipa. Letaknya sekitar 290 km. dari Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ke arah utara; dan kurang lebih 100 km. dari Kabupaten Mamuju, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat ke arah selatan; 40 km. dari Polewali, Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar.

Tinambung memiliki kedudukan tersendiri jika dibandingkan dengan kampung atau kota lainnya di Mandar. Mengapa demikian, sebab dulunya wilayah ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa. Mengenai kedudukan Kerajaan Balanipa pada masa kerajaan dan pasca perjanjian Tammajarra yang melahirkan persekutuan Pitu Babana Binanga, Kerajaan Balanipa diposisikan sebagai "bapak" dan Kerajaan Sendana diposisikan sebagai "ibu" dari tujuh kerajaan yang bersekutu tersebut. Meski demikian kenyataannya, pada zaman Belanda Ibu Kota Afdeling Mandar tidak ditempatkan di Tinambung yang bersejarah itu, tetapi malah ditempatkan di Majene.

Perkembangan ini begitu cepat yang terjadi sejak awal tahun 1900-an, selain itu semakin banyak pula kebijakan Belanda yang sangat merugikan pihak pribumi. Salah satunya pemberlakuan pajak yang signifikan mempengaruhi penghasilan tambahan pada *maradia* dan *ade* di Mandar secara luas. Dan 1905 pemerintahan Belanda resmi di Sulawesi Selatan diberlakukan, termasuk di Mandar. Tetapi itu setelah para pejuang-pejuang Mandar melakukan perlawanan sengit hingga tetes darah penghabisan yang dimotori oleh dua orang bersaudara, yaitu Ammana I Wewang dan Ammana Pattolawali. Nama terakhir itu tewas pada 6 Juni 1906 (Sinrang, 1994:195), sedang Ammana I Wewang tertangkap pada tahun yang sama sebab adanya kaum bangsawan yang mengkhianat terhadapnya.

Pada 1911, kerajaan-kerajaan lokal di daerah ini diubah menjadi sistem distrik yang berjumlah 27 distrik, kemudian diubah lagi menjadi sisa 11 distrik. Sedangkan Tinambung sendiri kalau kita berdasarkan pada sistem kewedistrian, masuk wilayah Distrik Batulaya. Wilayah ini masuk wilayah *ana' banua* Todangtodang (*banua kaying*), yaitu salah satu wilayah pembentuk Kerajaan Balanipa (Kila dan Muh. Amir, 2007:127). Wilayah *ana' banua* ini sekarang masih

dapat dikenali sebagai suatu kampung yang berstatus desa terletak di sekitar Kantor Kelurahan Tinambung. Keempat wilayah pembentuk Kerajaan Balanipa ini, statusnya paling tinggi menjadi kelurahan atau desa.

Begitu juga ketika Mandar keseluruhan berdiri sebagai satu provinsi baru sebagai mekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, namun ibu kota provinsi ini justru ditempatkan di Mamuju. Ironis memang, justru wilayah yang bersejarah ini tidak mendapatkan fasilitas apa-apa ketika Mandar telah berdiri sebagai satu provinsi. Padahal disadari atau tidak bahwa konsep dasar dan penggerak perjuangan pembentukan Sulawesi Barat dan gerakan-gerakan politik dan kebudayaan Mandar lainnya, kebanyakan terjadi di daerah ini (Kecamatan Tinambung) (Alimuddin, 2011:1-2). Mungkin itulah sebabnya sehingga tahun-tahun belakangan ini, muncul kembali ide untuk mendirikan satu kabupaten baru yang diwacanakan bernama Kabupaten Balanipa. Penamaan itu mungkin untuk mengembalikan nama harum Kerajaan Balanipa yang pernah berjaya di jamannya.

Pada dasarnya masyarakat Mandar, baik pada level kecamatan, kelurahan atau desa cenderung sifatnya homogen sebab berasal dari berbagai etnis. Ada yang berasal dari suku Jawa (terutama transmigrasi dari Jawa tahun 1937), maupun yang berasal dari wilayah lain di Sulawesi Selatan. Mereka itu banyak yang kawin mawin dengan penduduk asli yang akhirnya memilih menetap di daerah ini. Secara sepintas antara mereka tidak ada perbedaan mencolok antara orang pendatang dan penduduk asli. Mereka pun tidak diperlakukan secara berbeda. Lebih dari itu, mereka tampak bangga dengan identitasnya sebagai orang Mandar, dan juga bahasanya yang disebut sebagai Bahasa Mandar

BALANIPA SEBELUM MENJADI KERAJAAN

Kerajaan Balanipa yang mulai eksis pada awal abad ke-16, memiliki sejarah panjang sebelum berdirinya sebagai suatu kerajaan di wilayah Mandar. Meskipun lahirnya kerajaan ini tidak dimulai dengan keberadaan seorang *tomanurung*, namun sebenarnya masyarakat di wilayah ini tetap mengenal adanya seorang *tomanurung* tetapi bukan sebagai pendiri kerajaan. *Tomanurung* di Mandar dimunculkan dalam kajian ini hanya sebatas jika menelusuri tentang latar belakang keluarga raja atau *mara'dia* Kerajaan Balanipa yang pertama yaitu I Manyambungi Todilaling. Beliau adalah keturunan *tomanurung* pada beberapa generasi berikutnya.

Meskipun *tomanurung* itu yang menurunkan cikal bakal pemerintahan sistem kerajaan di Mandar, namun berdasarkan penuturan masyarakat setempat menyatakan bahwa sebelum *tomanurung* itu ada di Mandar, sistem kepemimpinan *tomakaka* terlebih dahulu ada. Bahkan keberadaan *tomanurung* di Mandar diabsyahkan oleh para *tomakaka*. Sebenarnya *tomanurung* itu dihormati oleh masyarakat dan diangkat oleh para *tomakaka* dan masyarakat pendukungnya untuk menjadi raja di daerahnya masing-masing (Syah, 1977: 54-55). *Tomakaka* ini merupakan gelar dari sebuah wilayah atau *banua* dan *tomakaka* yang pernah eksis di wilayah ini sebanyak 41. Dari jumlah itu, *tomakaka* yang disebut sebagai *tomakaka* yang pertama adalah yang bertempat di Ulu' Saddang yang bernama *Tomakaka Pullaomesa* (Leyds, 1940: 19-20).

Dari sejumlah besar nama wilayah *tomakaka* itu, hingga kini masih dijumpai berupa nama desa, lingkungan, rukun kampung (RK), rukun tetangga (RW). Selain itu bahwa nama *tomakaka* masih terpatri dalam benak orang Balanipa, dibuktikan dengan banyaknya kuburan keramat yang tidak bernama, dan mereka sebut sebagai kuburan *tomakaka*. Kuburan-kuburan yang dimaksud itu, berte-

baran di berbagai daerah yang ada di Mandar. Kuburan ini banyak dikunjungi oleh masyarakat Mandar dengan tujuan tertentu; misalnya membawa makanan sebagai persembahan, kemudian mereka bernazar dan akan kembali jika apa yang dinazarkan telah tercapai (Rahman, 2014: 109).

Masa kepemimpinan *tomakaka* di Mandar berlangsung cukup lama, meski demikian sampai sekarang belum dapat dipastikan kapan awal mula kepemimpinan itu ada. Realitas keberadaan *tomakaka* itu sendiri tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Yang pasti bahwa kepemimpinan itu tidaklah sama dengan masa kepemimpinan *maradia* di Mandar. Eksistensi ke-*tomakaka*-an di Mandar setidaknya berlangsung hingga berdirinya Kerajaan Balanipa yang pemimpinya disebut *maradia* atau raja. Kenyataannya bahwa meski telah berdiri Kerajaan Balanipa, namun pemakaian istilah *tomakaka* tidak serta merta hilang ditelan istilah *maradia*.

Tomakaka terlebih dahulu ada jika dibandingkan dengan *tomanurung*, hal ini terlihat jelas bahwa yang mengangkat *tomanurung* sebagai pemimpin adalah beberapa orang *tomakaka* sebagai pemimpin wilayah yang luasnya tidak terlalu besar (mungkin sebesar *banua* atau kampung). Itulah sebabnya sehingga orang Mandar menyatakan bahwa kalau berdasarkan tingkat sosial di Mandar, *tomakaka* dianggap berada di bawah *tomanurung*. Tetapi kalau diperhatikan strata sosial yang ada di masyarakat Mandar, posisi *tomakaka* tidak ditemukan di dalamnya. Kenyataan itu menunjukkan bahwa *tomakaka* bukanlah termasuk dalam kategori bangsawan (golongan pertama), tetapi mungkin dapat terjadi bila yang bersangkutan melakukan perkawinan dengan golongan bangsawan. Bagaimana pun kaya dan kuasanya seorang *tomakaka*, ia sendiri tidak dapat menjadi bangsawan. Dapat saja ia menduduki jabatan-jabatan penting, tetapi tidak mungkin menjadi derajat yang teratas, yaitu setelah da-

tangnya *tumanurung* (Syah, 1977: 55).

Jika disimak dari pengertian *tomakaka* itu sendiri, jelas tidaklah termasuk pada golongan stratifikasi teratas. Dalam pengertian sehari-hari, ia merupakan sebutan bagi seseorang yang dianggap kakak. Dari segi arti denotasinya, ia terdiri atas *to* berarti orang, dan *makaka* berarti dianggap kakak. Kakak dalam pengertian ini mengarah kepada seseorang yang dianggap lebih tua dari ego. Tapi bagi orang Balanipa Mandar, *tomakaka* tidak hanya diartikan sebagai orang yang dianggap kakak, tetapi ia mengandung arti dan makna yang lebih mendalam dan mempunyai arti simbolik pada konotasinya. Istilah *tomakaka* terdiri atas kata *to* berarti orang dan *makaka* adalah perubahan kata dari *maka-maka* yang berarti mempunyai banyak kemampuan (Rahman, 2014: 112). Dengan kata lain, *tomakaka* adalah sosok pemimpin yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan rakyat melalui sifat pengayoman.

Selain itu, *tomakaka* juga diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk kepentingan orang banyak. Berarti dia adalah sosok pemimpin yang sanggup menyelesaikan segala persoalan bukan hanya dalam hubungan dengan jasmaniah, tetapi juga sanggup menyelesaikan segala persoalan yang berhubungan dengan masalah rohaniah. Kemampuan yang ditunjukkan membawa rakyat merasa aman dari goncangan kosmos, khususnya dia dapat menghubungkan dengan berbagai kekuatan gaib yang mengendalikan alam. Kemampuan itulah yang dilihat oleh rakyat sehingga dia menjadi tokoh yang dipuja dan dipuji. Ia dianggap penjelmaan roh nenek moyang dan dihormati melalui kuburannya yang disebut *tosalama'* (bertuah atau orang selamat) sebagai tempat meminta apa yang diinginkan.

Kalau disimak arti kata dari *tomakaka*, ada kemungkinan bahwa sistem pemerintahannya adalah yang tertua di wilayah Mandar. Bentuk dan sistem pemerintahannya lebih sederhana dibanding de-

ngan sistem pemerintahan *mara'dia*. Wilayah pemerintahannya pun sangat kecil, dan pusat pemerintahan dijaga dengan sangat ketat dan membuat pagar bambu yang tinggi di sekelilingnya agar aman dari berbagai ancaman. Hal ini mengindikasikan bahwa keamanan wilayah setiap *tomakaka* ketika itu tidak aman, sebab sering terjadi perebutan wilayah antar sesama *tomakaka*. Kondisi seperti itu memang sulit untuk dihindari sebab keberhasilan seorang *tomakaka* bilamana ia berhasil menjalin hubungan baik dengan sesama *tomakaka* yang ada di sekitarnya (Karim, 2014:31).

Mengingat wilayah kekuasaan setiap *tomakaka* yang meliputi hanya sebuah wilayah kecil (mungkin sama dengan kampung/dusun saja), dan susunan pemerintahannya tidak jelas. Meski demikian, diyakini bahwa susunan masyarakatnya sudah teratur walaupun mereka hanya terdiri dari beberapa kelompok kecil saja. Dalam bermasyarakat pada masa awal pemerintahan *tomakaka*, perbedaan kelas dan penindasan-penindasan antara penguasa dan yang dikuasai kurang menonjol, sehingga yang kelihatan lebih banyak harmonisnya. Selain itu, masyarakatnya juga sangat ketat dalam mematuhi terhadap aturan adat yang berlaku di dalam kelompoknya. Hal ini dipicu oleh rasa takut yang tinggi terhadap kepercayaan akan kutukan Dewata bilamana telah melanggar aturan adat. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kelompoknya tidak diperlukan adanya suatu pengawasan yang ketat. Kalaupun terjadi pelanggaran adat, yang menyelesaikan adalah cukup orang-orang tua (Syah, 1998: 65).

Tetapi dalam perkembangan pemerintahan *tomakaka*, tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinannya akan mengalami benturan dan dipastikan akan mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar. Kondisi itu diakibatkan sebab adanya orientasi nilai masyarakat pada sistem sosial budayanya. Tetapi selama masyarakatnya masih bersifat *homogeneous* (beragam tunggal), kepemimpinan *tomakaka*

dalam bentuk tunggal masih dapat bertahan. Namun perlu diingat bahwa jumlah penduduk semakin bertambah dari waktu ke waktu yang memungkinkan terjadinya diversifikasi pada berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi, sosial dan politik (Rahman, 2014: 113-114). Kondisi itu dapat melahirkan pola kepemimpinan yang beraneka ragam, dimana pada setiap aspek kehidupan akan muncul kelompok kecil sebagai pemimpin di bidang sendiri. Kondisi ini juga terjadi pada perkembangan pemerintahan *tomakaka* di wilayah Mandar, khususnya Balanipa.

Perubahan sosial yang terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhannya pada jaman *tomakaka* adalah juga hal biasa yang dapat terjadi pada era kepemimpinan siapapun juga. Gejala perubahan itu tampak terjadi ketika mulai muncul ambisi para *tomakaka* untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menguasai wilayah lainnya. Gejala itu dipicu sebab adanya orientasi nilai yang mulai mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Perubahan yang terjadi itu, terutama pada wilayah ke-*tomakaka-an* yang ada di Balanipa, seperti; *Tomakaka Passokkorang*, Napo, Renggeang, Pangale dan Lenggo serta beberapa *tomakaka* yang telah bergabung dengan *tomakaka* yang ada di sekitarnya.

Sebelum terjadinya perubahan nilai akibat semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan sehari-hari, maka sistem pemerintah *tomakaka* adalah bersifat tunggal sebab semuanya dipegang oleh *tomakaka*. Sifat kepemimpinan masa itu bersifat tunggal sebab dia yang mengurus semua bidang kehidupan masyarakat. Artinya semua urusan yang menyangkut masyarakat dan *banua* diurus langsung oleh *tomakaka*. Oleh sebab itu, kelihatan bahwa masa pemerintahan *tomakaka* di Mandar, sistem pemerintahannya belum terstruktur dengan baik dan juga belum ada adat dan *pabbicara* atau jabatan lainnya seperti ketika memasuki masa kerajaan. Seiring

terjadinya perubahan nilai itu, muncul pula beberapa wilayah ke-*tomakaka*-an yang menonjol di Balanipa ketika itu, antarlain; *tomakaka* Passokkorang, Napo, Renggeang, Pangale, Lenggo dan beberapa *tomakaka* yang telah menggabungkan wilayahnya dengan *tomakaka* sekitarnya. Wilayah-wilayah itu adalah *tomakaka* Mosso, dan Tandasura.

Terjadinya perubahan dalam kepemimpinan *tomakaka*, menyebabkan ia tidak dapat lagi mengatasi dan mengayomi masyarakatnya. Hal ini tentu saja membutuhkan pemikiran agar tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Sebab meningkatnya jumlah masyarakat sehingga menyebabkan kebutuhan lahan atau tanah juga meningkat. Tanah yang dahulu merupakan hal yang sakral, beralih perhitungan secara ekonomi yang lebih menonjol, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Untuk menghindari agar tertib sosial berjalan seimbang, maka *tomakaka* akhirnya membentuk satu pejabat untuk menangani permasalahan tanah yang mereka sebut *tomabubeng* (orang yang dituakan).

Pada tahap awal pembentukannya, ia masih dapat menjalankan tugasnya untuk mewakili *tomakaka* mengurus masalah per-tanahan, terutama jika terjadi sengketa dalam berbagai bentuk. Ia juga diberi wewenang untuk menentukan lokasi mana yang wajar diberikan kepada seseorang yang berjasa kepada negeri, baik dari golongan manapun juga. Tetapi dalam perkembangannya, ternyata *tomabubeng* tidak mampu lagi mengatasi permasalahan tanah yang semakin kompleks, misal; jenis tanaman yang cocok dengan musim, waktu tanam yang tepat, serta yang berhubungan dengan kesuburan tanah. Hal itu terjadi sebab membengkaknya tugas *tomabubeng*. Tugasnya tidak hanya mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada kaitannya lahan saja, tetapi ia juga mengatur berbagai permasalahan sosial yang ada (Rahman, 2014: 116). Semakin kompleks-

nya persoalan yang muncul mengakibatkan semakin terancamnya berbagai wilayah ke-*tomakaka*-an di Balanipa sehingga memaksa empat wilayah *tomakaka* mempersatukan diri ke dalam satu ikatan yang disebut *appe banua kaiyang* (empat negeri besar). Negeri-negeri itu adalah Napo, Samasundu, Todangtodang dan Mosso.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka *tomakaka* membentuk lagi pejabat yang disebut *so'bo*. Pejabat ini bertugas untuk mengatasi permasalahan tentang masalah tanaman, musim tanam, jenis lahan yang cocok dengan yang akan ditanam. Dalam menjalankan tugasnya, ia harus selalu berkonsultasi dengan *tomabubeng* dalam kedudukannya sebagai tokoh masyarakat. Selain itu, sebab meningkatnya jumlah penduduk yang sulit untuk dihindari sehingga permasalahan sosial juga semakin meningkat sehingga pejabat-pejabat yang telah dibentuk *tomakaka* itu tidak mampu lagi menjalankan tugasnya secara baik dan tepat waktu. Realitas itu memaksa *tomakaka* membentuk lagi pejabat baru yang dinamakan *andong guru* yang bertugas mengajarkan keterampilan di berbagai bidang keahlian, misalnya; bela diri, pasukan, *punggawa* yang mengurus bidang ekonomi, sedang *poroambi* bertugas menangani masalah ritual dalam kehidupan masyarakat (Syah, 1998: 71).

Meskipun kepemimpinan *tomakaka* telah membentuk pejabat baru untuk membantu menjalankan tugasnya, namun realitasnya tetap tidak dapat mengatasi permasalahan yang muncul dari dalam masyarakat. Bahkan lebih cenderung bahwa para pejabat baru itu justru menggunakan kesempatan untuk memperoleh pengaruh dalam kehidupan masyarakat sehingga mulai pecah. Sebenarnya pejabat baru itu merupakan bagian dari kepemimpinan *tomakaka* yang melekat dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Kondisi itu menyebabkan wibawa *tomakaka* mulai luntur. Di samping timbulnya pertentangan atau konflik di antara mereka sebab ingin saling me-

nguasai. Kondisi ini berlangsung begitu lama dan sulit untuk diselesaikan oleh mereka.

Tidak dapat disangkal bahwa kepemimpinan awal *tomakaka* dapat menjadi teladan atau panutan yang diharapkan dapat mengayomi masyarakat secara nyata dan berkesinambungan. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, sejumlah *tomakaka*, seperti; *Tomakaka Passokkorang*, *Tomakaka Lerang*, *Tomakaka Lerang*, dan *Tomakaka Lempong*, justru berbuat sewenang-wenang atau bertindak kejam dan tidak manusiawi terhadap masyarakat sebab ingin menguasai wilayah *tomakaka* lainnya (Amir, 2011:49-50). Realitas itu menimbulkan gejolak dan pertentangan antara *tomakaka* yang satu dengan lainnya sehingga melahirkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Realitas itu mendorong empat negeri besar (*Appa Banua Kaiyang*) yang telah terbentuk sebelumnya, juga merasa tidak nyaman dan aman dari kondisi itu.

Appa Banua Kaiyang juga merasa terancam akan perilaku dari beberapa pemimpin *tomakaka* di Mandar yang berlaku agresif dan merasa tidak mampu untuk membendunginya. Itulah sebabnya sehingga *Appa Banua Kaiyang* mencari jalan penyelesaian dengan mencari seorang kader pemimpin yang dapat mengatasi guna menyelamatkan rakyat dan negeri dari ancaman *Tomakaka* tersebut. Ancaman dan gangguan yang dirasakan itu adalah perebutan dan pendudukan wilayah, bukan hanya itu pembunuhan dan perampasan harta benda rakyat, juga merajalela. Salah satu wilayah *Appa Banua Kaiyang* tidak tahan lagi sebab kalau orang-orangnya ke *Passokkorang*, *Titie*, *Sajoang*, *Lombok*, dan *Pambusuang* mereka dibunuh. Ataukah orang Napo turun ke laut untuk mencari kerang, ia ditahan terdahulu, nanti air pasang baru ia dilepaskan (Syah, 1991:183).

Upaya untuk mengendalikan ketidaktentraman itu, akhirnya *Appe Banua Kaiyang* mencari figur pemimpin yang dianggap dapat menyelamatkan negeri dari kehancuran. Pilihan itu tertuju pada salah seorang bangsawan Mandar yang sejak kecil telah merantau ke Kerajaan Gowa karena suatu persoalan yang telah menimpa dirinya, yaitu I Manyambungi Todilaling. Keberadaan I Manyambungi di Kerajaan Gowa, bahkan telah dipercaya untuk memegang jabatan sebagai panglima perang sehingga ia dianggap mampu dan cakap untuk menjadi pemimpin berdasarkan pengalamannya di Kerajaan Gowa. Untuk menggolkan usahanya itu, ia juga menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Gowa yang ketika itu pengaruhnya sudah sangat kuat di kawasan Sulawesi Selatan.

Upaya-upaya mencari pigur baru tersebut, telah berhasil dengan memanggil I Manyambungi Todilaling kembali ke Mandar. Sekembalinya I Manyambungi Todilaling itu membuat suasana baru sebab ia dapat mengalahkan *Tomakaka* Passokkorang yang kejam dan agresif. Meskipun sistem kepemimpinan *tomakaka* belum terstruktur dengan baik, namun ia dapat eksis cukup lama. Tetapi naiknya I Manyambungi sebagai *marad'ia* Balanipa pertama, maka sistem kepemimpinan *Tomakaka* yang tidak terstruktur itu berakhir pula dan digantikan oleh kepemimpinan *marad'ia* yang kepemimpinannya sudah terstruktur dengan baik sebab sudah dilengkapi dengan aparat pendukungnya.

PROSES LAHIRNYA KERAJAAN BALANIPA

Masa kepemimpinan *Tomakaka* berakhir sebab dalam masa perkembangannya yang begitu pesat tidak dapat diimbangi dengan kekuatan yang seimbang antara yang diperintah dengan yang memerintah. Selain itu, ada kekuatan lain yang sulit untuk dibendung di antara mereka, terutama datangnya dari *Tomakaka*

Passokkorang yang berkembang melampaui perkembangan ke-*tomakaka*-an lainnya. Passokkorang ini mempunyai kekuatan perang yang cukup besar dan memiliki sifat agresif yang berlebihan. Pemimpin Passokkorang ini memiliki sifat arogan sehingga banyak menyusahkan wilayah orang lain, termasuk wilayah *Appe Banua Kaiyang*, terutama wilayah Napo.

Kekacauan yang diakibatkan oleh ulah *Tomakaka* Passokkorang, memaksa Persekutuan *Appe Banua Kaiyang* mencari seorang figur pemimpin yang dapat membantu menyelamatkan rakyat dan negeri dari ancaman kekacauan itu. Akhirnya mereka tertuju pada seorang figur bangsawan Mandar yang sudah lama tinggal menetap di Kerajaan Gowa. Bahkan yang bersangkutan dikemudian hari diangkat sebagai salah seorang panglima perang di Kerajaan Gowa. Alasan pemilihan itu karena yang bersangkutan dianggap cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebab memiliki pengalaman selama ia berada di Kerajaan Gowa. Untuk memuluskan usaha itu, *Appe Banua Kaiyang* juga telah menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Gowa jauh sebelumnya.

Kenyataan itulah yang memuluskan jalannya upaya mengembalikan I Manyambungi ke Mandar untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itulah *Appe Banua Kaiyang* mengirim utusan ke Kerajaan Gowa untuk meminta izin agar I Manyambungi diperkenankan pulang ke Napo (Mandar) untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Utusan itu mendapat respon dan tanggapan positif dari raja Gowa maupun I Manyambungi sendiri. Ketika itu, I Manyambungi telah kawin dengan seorang putri bangsawan Gowa yang salah seorang anaknya bernama Tomepayung yang kelak dikemudian hari menjadi *maradia* ke-2 di Kerajaan Balanipa.

Harapan orang Napo untuk membawa kembali I Manyambungi ke Mandar tidaklah sia-sia, sebab raja Gowa tidak keberatan atas maksud tersebut. Untuk membuktikan ketulusan raja Gowa melepaskan I Manyambungi, ia juga membekalinya dengan berbagai benda-benda pusaka yang kelak dikemudian hari dijadikan sebagai benda-benda arajang Kerajaan Balanipa. Benda-benda itu, selain dimaksudkan sebagai alat untuk mempererat persahabatan antara kedua kerajaan nanti. Benda itu berupa; Gong Tabilobe, Tombak Inaga, Bendera Isorai, Tombak Trisula Dowe Pakka, Senapan Itata, Mahkota Saloko Kati, Seruling Ikeke, Gong Idato, Gendang (Ganrang), Perisai Utte, Jalappa yaitu sejenis alat musik tradisional (Leyds, 1940:23-24; Rahman, 2014:210).

Bukan hanya itu, sebelum I Manyambungi meninggalkan Kerajaan Gowa, dilakukan ikrar kesepakatan yang diucapkan oleh raja Gowa berbunyi seperti berikut ini:

“Besok atau lusa, manakala Gowa dalam keadaan bahaya, hendaklah engkau datang membantu, kecuali jika bahaya tersebut hanya dalam negeri saja, anda saya tidak harapkan terkecuali keinginanmu sendiri. Demikian juga jika Mandar dalam keadaan bahaya di pagi hari hendaklah segera mungkin memberi tahu di sore hari, demikian juga halnya jika tertimpa bahaya di sore hari, hendaknya memberi tahu di pagi hari. Besok lusa jika ada orang yang menyatakan Gowa dan Mandar berselisih, cari dan bunuhlah. Jika orang Gowa yang menyatakan demikian, maka Mandar-lah yang harus membunuhnya, jika orang Mandar yang mengatakan demikian, maka Gowa-lah yang harus membunuhnya. Demikian pembuktian bahwa Mandar dan Gowa tidak berselisih” (Syarifuddin, 1989:278-279).

Ikrar tersebut, ada dua versi yang isinya tidak sama. Versi tersebut merupakan versi Mandar. Kalau dicermati antara versi

Mandar dan versi Makassar itu maknanya tidak jauh berbeda dan hanya rumusnya saja yang mengandung perbedaan sebab ada klausul yang tidak disebutkan dalam versi berbahasa Mandar. Tentang waktu dan tempat diadakannya ikrar itu, sumber tadi tidak menjelaskan dengan pasti dan rinci. Hanya saja disebutkan bahwa ikrar itu diucapkan sebelum I Manyambungi kembali ke Mandar untuk diangkat menjadi pemimpin di sana. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ikrar itu diucapkan sebelum I Manyambungi menjadi raja atau *mara'dia* di Kerajaan Balanipa, Mandar.

Setelah persiapan telah rampung dan ikrarpun telah diucapkan oleh raja Gowa, rombongan orang-orang Mandar yang dimotori oleh orang Napo berangkat meninggalkan Kerajaan Gowa menuju Mandar. Sepanjang perjalanan menuju tanah kelahirannya, I Manyambungi kesal dengan sepak terjang para *tomakaka* di daerah Passokkorang. Ia berharap bahwa apa yang akan dilakukan nanti, setidaknya mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang ada di wilayah *Appe Banua Kaiyang*. Itulah sebabnya sehingga tekadnya untuk segera menyelesaikan persoalan yang menimpa wilayah *Appe Banua Kaiyang* segera tuntas agar masyarakat dapat hidup tenang dan tentram.

Dua hari dua malam berlayar, rombongan I Manyambungi tiba di wilayah Panyampa. Di daerah Labuang Lapeo, I Manyambungi turun dari perahu mencari *Tomakaka* Lerang, namun ia tidak menemukan orang yang dicari sebab yang bersangkutan sedang berada di daerah Palippis memimpin rakyatnya mencari siput. I Manyambungi melanjutkan perjalanannya hingga Palippis untuk menemui *Tomakaka* Lerang. Setibanya di Palippis, I Manyambungi sudah melihat *Tomakaka* Lerang dan memanggilnya dari atas gunung. Mendengar panggilan itu, *Tomakaka* Lerang bertanya "Siapa anda ini", I Manyambungi menjawab "Aku ini Bugis Mandar". I

Manyambungi balik bertanya "Kau ini siapa", lalu *Tomakaka Lerang* menjawab "Aku ini *Tomakaka Lerang pekande ate tau*" artinya saya adalah *Tomakaka Lerang* yang suka makan hati orang, gertak *Tomakaka Lerang*. Tapi belum selesai ucapannya, I Manyambungi langsung menombak perutnya hingga isinya berhamburan keluar. Melihat kenyataan itu, anak buahnya lari tunggang langgang tanpa menghiraukan mayat pimpinannya.

Usai membunuh *Tomakaka Lerang*, I Manyambungi bersama rombongannya naik ke atas perahunya untuk meneruskan perjalanan. Menjelang masuk wilayah Soreang atau Kandeapi, Gong I Tabbilohe dibunyikan sebagai tanda bahwa I Manyambungi telah sampai di Mandar. Bunyi gong tersebut mengagetkan penduduk sebab suaranya menggelegar dan enak didengar. Tiba di Labuang Soreang, *Tomakaka Mosso* menyuruh orang untuk menyampaikan kepada *Puang* di Gandang dan *Puang* di Poyosang bahwa I Manyambungi telah tiba. Maka bergegaslah orang Napo dan Mosso datang ke muara Sungai Mandar untuk menjemput I Manyambungi dan mengangkut barang-barang bawaan ke Napo sambil mengarak I Manyambungi sepanjang jalan (Syah, 1998:28-29).

Setelah ia berada di negeri kelahirannya, iapun memerangi para *Tomakaka-Tomakaka* yang selama ini telah membuat keonaran dan kekacauan sehingga kehidupan masyarakat terganggu, terutama wilayah *Appe Banua Kaiyang*. Atas bantuan Kerajaan Gowa dan wilayah *Appe Banua Kaiyang*, I Manyambungi berhasil mengalahkan *Tomakaka Lerang*, Lenggo, Lempong, Poisang, Tande, Batu, Kadake Lette yang terkenal agresif dan suka berbuat sewenang-wenang. Atas keberhasilannya dalam memulihkan dan menentramkan masyarakat sehingga iapun dipilih dan diangkat menjadi pemimpin dan pemegang kendali kekuasaan pemerintahan atas wilayah *Appe Banua Kaiyang* (Amir, 2011:53).

Pembentukan kesatuan pemerintahan baru dengan wilayah intinya *Appe Banua Kaiyang* merupakan dasar terbentuknya Kerajaan Balanipa dengan raja pertamanya adalah I Manyambungi dengan gelar rajanya adalah *mara'dia*. Sebagai monumen tanda berdirinya kerajaan baru itu, ditanam pohon nipa yang diberi pagar. Itu pula sebabnya nama kerajaan itu diberi nama Kerajaan Balanipa. Kata Balanipa diambil dari Bahasa Mandar, yaitu "bala" yang artinya pagar, sedang "nipa" adalah sejenis pohon nipa. Pemberian nama demikian dimaksudkan agar kerajaan yang baru saja dibentuk itu dapat berkembang dengan pesat dan kokoh sekuat pohon nipa. Pohon nipa bagi orang Mandar dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, daunnya dapat dijadikan sebagai atap rumah, sedang buahnya manis juga dapat dimakan. Pohon nipa disimbolkan supaya orang Mandar kehidupannya subur seperti nipa dan orangnya manis bak buah pohon nipa.

Pengangkatan I Manyambungi sebagai *mara'dia* Balanipa yang pertama adalah sebagai bentuk penghormatan dan tanda terima kasih oleh masyarakat *Appe Banua Kaiyang*. Setelah pengangkatan itu, wilayah *Appe Banua Kaiyang* sebagai pendiri kerajaan juga memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh masing-masing seorang *pappuangang*. Selanjutnya, *pappuangan* ini memiliki hak suara untuk pengangkatan seorang *mara'dia*. Kelompok inilah yang kemudian menjadi hadat besar (*ada' kaiyang*) Kerajaan Balanipa. Dalam kesehariannya, mereka disapa dengan sapaan *Puang*, sedang *mara'dia* dan keturunannya disapa dengan sapaan *Daeng*.

KEPEMIMPINAN I MANYAMBUNGI

I Manyambungi Todilaling adalah merupakan tokoh sentral dalam perbincangan sejarah Mandar. Beliau dianggap sebagai bapak pendiri kerajaan dan sistem pemerintahan di tanah Mandar (khu-

susnya Kerajaan Balanipa). Konstruksi *mara'dia* telah terbangun pada masa kepemimpinannya. Ia merupakan *mara'dia* pertama yang diangkat dan dilantik oleh kelompok adat. Jasa beliau yang tak akan terlupakan terhadap tanah Mandar adalah kesuksesannya membebaskan *Appe Banua Kaiyang* dari ronrongan Kerajaan Passokkorang. Ia merupakan pendiri Kerajaan Balanipa dan sekaligus sebagai pelatah dasar sistem kepemimpinan yang bercorak populis, tidak bersifat monarki utuh (Bodi dan Sapriallah, 2011:88-89).

Sebelum I Manyambungi diangkat dan dilantik menjadi *mara'dia* Balanipa yang pertama, maka terlebih dahulu beliau mengangkat *Puang* Dipoyosang sebagai anggota adat yang pertama di Kerajaan Balanipa. Ia adalah anggota dan sekaligus sebagai ketua kaum adat *Appe Banua Kaiyang* yang kemudian bergelar *Puang* Limboro. Beliaulah yang kemudian melantik dan memasangkan mahkota (*di parakkai*), yaitu memasangkan mahkota kebesaran di atas kepalanya. Acara itu juga dirangkaikan dengan suatu ikrar atau *assitalliang* antara *mara'dia* dan *Puang* Limboro.

Setelah diangkat sebagai *mara'dia*, terlebih dahulu ia menetapkan aturan adat dan pemerintahan sehingga dalam menjalankan pemerintahannya ia tidak akan bertindak sewenang-wenang. Hal ini memungkinkan sebab aturannya ia buat sendiri dan berlaku bagi dirinya sendiri. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh beberapa orang pejabat pembantu. Memang diakui bahwa masa awal berdirinya Kerajaan Balanipa, struktur pemerintahannya masih sangat sederhana. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai gejolak perubahan ke arah yang lebih baik. Sistem pemerintahannya berimbang antara *mara'dia* sebagai eksekutif dengan adat sebagai legislatif. Hubungan antara kedua lembaga itu diikat dalam satu konsensus politik yang dikenal dengan sebutan *assitalliang*.

Assitalliang itu dikenal sebagai *assitalliang* antarl Manyambungi dengan Puang Dipoyosang. I Manyambungi sebagai simbol dari pemerintah yang berkuasa (*mara'dia*) yang berhak atas gelar diri sebagai *daeng* dan Puang Dipoyosang sebagai simbol adat yang berhak memperoleh gelar sebagai *puang*. Keduanya berhak memakai gelar tersebut hingga anak keturunannya. Dan keturunan mereka berdua juga yang berhak menduduki jabatan sebagai *mara'dia* dan dewan adat kerajaan. Dari sini pulalah awalnya kedua gelar itu mulai melekat pada diri dan keturunan keduanya.

Puang Dipoyosang merupakan ketua adat dari *Appe Banua Kaiyang* berdampingan dengan I Manyambungi sebagai *mara'dia* pertama. Peranan, fungsi, dan sifat yang dimiliki keduanya selalu menjadi referensi bagi *mara'dia* dan dewan adat selanjutnya. Puang Dipoyosang dianggap sebagai pengambil inisiatif dalam peletakan dasar hukum dan ketatanegaraan yang nantinya dilaksanakan oleh I Manyambungi. Puang Dipoyosang berhasil memprakarsai hubungan antara kaum adat dan *mara'dia* yang setara. Hal itu dapat dilihat dari *assitalliang* antara keduanya, yaitu:

"*Nauwang I Puang Dipoyosang:Upakaiyyangoqo Todilaling mupakaraja, dimadondonna di duambongi anna marattas-rattas o uwake, maruppu-ruppu'o batu, uwalai membali akai-yanga*" (Bodi dan Saprillah, 2011:96).

Artinya;

Puang Dipoyosang menegaskan: Saya angkat engkau Todilaling (I Manyambungi) sebagai pemegang tampuk pemerintahan (*mara'dia*), akan tetapi engkau harus hormati saya (sebagai pemegang tampuk kekuasaan adat). Besok lusa manakalah engkau memutuskan sendi-sendi adat dan menghancurkan aturan dan kebiasaan adat, maka saya akan mencabut kembali kebesaran yang telah kuberikan.

Setelah itu, dilakukan perjanjian antara *mara'dia* Balanipa I Manyambungi dengan Puang Dipoyosang yang mewakili rakyat, mereka masing-masing berpegang pada tiang payung kebesaran dengan mengucapkan sumpah setia yang berbunyi:

- *Mara'dia* : *Malewu parri'di'mo'o* (sudahkah kalian bulat seperti alu?)
- Adat : *Malewu parri'dima* (kami sudah bulat seperti alu).

Kemudian menyusul pertanyaan *mara'dia* secara berturut-turut:

Lappar, lapparrumo (jadi dataran rendah, datarankulah?)

Buttu Buttu'umo (gunung, gunungkulah?)

Sasi', sasi'umo (laut, lautkulah?)

Tau, tau'umo (Orang, orangkulah?)

Iri'ma, anna daung ayumo'o (Saya angin dan engkau daunnya?)

Rarungma'anna buttangmo'o (Saya jarum dan engkau benangnya?)

Setiap pertanyaan itu dijawab oleh *Puang* Dipoyosang mewakili adat dengan ucapan *O di ada' dibiasa* (sepanjang sesuai adat dan kebiasaan) (Kila, 2013:76).

Jika diteliti dengan seksama perjanjian tersebut, nyata dengan jelas bahwa antara *mara'dia* dengan rakyat telah terikat dengan suatu perjanjian pemerintahan sejak awal terbentuknya Kerajaan Balanipa. Perjanjian pemerintahan tersebut, merupakan suatu persetujuan bersama atas dasar mufakat antara rakyat dan *mara'dia* yang akan memangku jabatan pemerintahan. Isi perjanjian itu jika disimak tampak bahwa telah diatur dan ditetapkan batas-batas kewenangan antara kedua belah pihak, baik menyangkut hak dan kewajiban *mara'dia* terhadap rakyatnya, maupun hak dan kewajiban rakyat terhadap *mara'dia* atau pemimpinnya. Perjanjian tersebut selalu diucapkan pada setiap pelantikan raja atau *mara'dia* baru. Tujuannya agar pemimpin yang baru dilantik itu, dalam menjalankan

tugas pemerintahannya, tidak melenceng dari garis pemerintahan yang telah ditetapkan oleh adat.

I Manyambungi adalah *mara'dia* yang diangkat oleh kaum adat (*pappuangan*), pengangkatan itu muncul sebagai suatu pernyataan dan penggambaran kekaguman terhadap peran yang dikaitkan dengan diri dan kehadirannya di Balanipa. Kehadiran itu membawa perubahan pada sistem politik yang mempunyai dampak positif dalam sistem kemasyarakatan. Pola perubahan itu menjadi acuan dasar hukum ketatanegaraan di daerah Mandar. Boleh dikatakan bahwa Kerajaan Balanipa adalah sebagai pelopor utama kesuksesan dalam bidang politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar. Hingga kini, orang-orang Mandar mengenal I Manyambungi sebagai salah seorang tokoh utama yang meletakkan dasar kuat keseimbangan kekuasaan.

Kesetaraan itu mungkin akan lain kondisinya seandainya bukan mereka yang berduet diawal pemerintahannya (I Manyambungi dan Puang Dipoyosang). Pasangan ini sangat serasi dalam membangun untuk memajukan Kerajaan Balanipa. Meski keduanya berbeda karakter, namun tidak menghalanginya untuk berjalan seiring. I Manyambungi adalah sosok pemberani, sedang Puang Dipoyosang adalah tipe pemimpin yang memiliki karakter yang bijaksana. Dialah yang menempatkan pondasi *Appe Banua Kaiyang* menjadi semakin kokoh dan menjadi patron bagi pimpinan kerajaan di masa-masa mendatang. Dia mampu menyelamatkan wilayah *Appe Banua Kaiyang* dan wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya dari ancaman dan gangguan keamanan dari Kerajaan Passokkorang.

Pasca pengangkatan I Manyambungi sebagai *mara'dia* Balanipa yang pertama, dia juga mengangkat Puang Dipoyosang sebagai pemangku adat pertama yang melantik I Manyambungi. Setelah itu, ada beberapa permasalahan besar yang harus dituntaskan dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di antaranya adalah menuntaskan musuh-musuh kerajaan yang masih tersisa, yaitu Kerajaan Passokkorang yang berada di wilayah timur dari Kerajaan Balanipa. Melakukan kerjasama dan perluasan wilayah kekuasaan serta menyempurnakan struktur pemerintahan kerajaan. Lainnya adalah persoalan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Balanipa yang dikategorikan kurang manusiawi. Ketiga persoalan itu perlu segera atau mendesak untuk dituntaskan mengingat perkembangan kerajaan sangat tergantung pada tuntasnya ketiga persoalan tersebut.

Pasca pelantikan I Manyambungi sebagai *mara'dia* pertama Kerajaan Balanipa, yang pertama diselesaikan adalah masalah adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Pada masa awal pemerintahannya, ia menemukan berbagai kebiasaan masyarakat sebagai warisan dari leluhurnya yang dianggap kurang manusiawi sehingga harus diubah demi kelangsungan masyarakat secara manusia untuk pembangunan kerajaan. Untuk mengubah adat kebiasaan itu bukanlah hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh beliau adalah mencari solusi untuk perbaikan adat istiadat masyarakat ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Itulah sebabnya sehingga I Manyambungi, sebagai *mara'dia* Balanipa menugaskan kepada Puang Dipoyosang berangkat ke Gowa untuk meminta adat yang diperadatkan oleh orang Makassar, di Gowa.

Perintah itu ditindaklanjuti oleh Puang Dipoyosang dengan mengutus keponakannya berangkat ke Gowa menemui raja Gowa untuk meminta adat yang diperadatkan oleh orang Gowa. Setelah utusan Balanipa tiba di Gowa, lalu ia menyampaikan pesan rajanya (I Manyambungi) agar sudi kiranya raja Gowa memberikan *lontarak* yang berisikan adat istiadat orang Makassar di Kerajaan Gowa. Rupanya raja Gowa tidak keberatan atas permintaan *mara'dia*

Balanipa sebab mengingat bahwa *mara'dia* Balanipa itu adalah merupakan kerabatnya sendiri sebab I Manyambungi telah menikahi kemanakan dari raja Gowa sendiri. Atas persetujuan seluruh anggota dewan Bate Salapang, maka diberikanlah sebuah *lontarak* yang isinya menyangkut adat istiadat yang ada di Kerajaan Gowa. *Lontarak* itu juga dikemudian hari menjadi acuan bagi masyarakat Mandar, di Balanipa dalam berperilaku sehari-hari yang hingga kini masih dianut oleh masyarakat, meskipun sebenarnya sudah ada yang mengalami pergeseran nilai akibat perkembangan jaman.

Setelah Puang Dipoyosang diangkat sebagai pejabat adat yang pertama dan melantik I Manyambungi sebagai *mara'dia*, ia juga mendampingi *mara'dia* dalam pemerintahan di daerah *lappar* (Limboro). Selain itu, I Manyambungi juga mengangkat *Papuangang* Tamangalle atau yang biasa disebut *Papuangang* Biringlembang menjadi pemangku adat kerajaan yang kedua untuk mendampingi *mara'dia* dalam bidang pemerintahan di daerah pesisir pantai. *Papuangang* Biringlembang adalah anak dari *Puang* Dirano (*Papuangan* Napo) atau kemanakan dari *Puang* Dipoyosang. Pengangkatan itu dilatari oleh keberhasilannya mengemban tugas kerajaan untuk mengambil *lontarak* yang berisikan adat istiadat orang Gowa untuk dijadikan sebagai acuan bagi orang Mandar dalam berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, I Manyambungi mengangkatnya sebagai pejabat adat kedua dengan jabatan *Pabbicara Kaiyang* yang membantu *mara'dia* di bidang hukum.

Kedua pejabat ini adalah merupakan pemangku adat pertama pada jabatan dan posisinya masing-masing terhitung sejak Kerajaan Balanipa terbentuk. Pejabat ini biasa juga disebut Dewan Adat besar *Appe Banua Kaiyang* yang mempunyai tugas mengangkat *mara'dia* Balanipa yang pertama yaitu I Manyambungi. Dewan ini berubah menjadi dewan adat *kaiyang* (adat besar) Kerajaan Balanipa

yang beranggotakan para *Pappuangan* dari *Appe Banua Kaiyang* (Mattulada, 1998: 68).

Ketua dewan adat *kaiyang* tersebut dijabat oleh *Puang* Dipoyosang, dan wakilnya adalah *Puang* Biringlambang. Dialah yang membuat *assitalliang* atau perjanjian dengan *mara'dia*. Selain itu, dewan tersebut juga berfungsi sebagai dewan yang memilih dan mengangkat serta memberhentikan *mara'dia* dari tahtanya manakalah ia melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain sebagai anggota dewan adat, ia juga berfungsi sebagai pemimpin pada wilayah kekuasaannya masing-masing. Bilamana ia berkedudukan sebagai pemimpin wilayah *Appe Banua Kaiyang*, maka kedudukannya berada di bawah kekuasaan *mara'dia* sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi. Sebaliknya bila ia berkedudukan sebagai anggota dewan adat *kaiyang* yang mengangkat dan memberhentikan *mara'dia*, maka kedudukannya berada di atas kedudukan *mara'dia*.

Pengangkatan kedua orang itu sebagai pejabat adat, mempunyai tugas sendiri-sendiri yang saling berbeda. *Papuangang* Biringlambang mempunyai tugas membantu *papuangan* Limboro dalam urusan dalam negeri, juga membantu pengamanan dalam negeri, khususnya dari arah laut. Sedang sumber lain menyebutkan bahwa tugas *Papuangang* Biringlambang adalah sebagai kepala urusan luar negeri dan menerima tamu dari jurusan selatan atau yang datang melalui laut sebelum diperhadapkan pada *mara'dia* Balanipa (Daud, 2007:91; Amir, 2011: 58). Selain tugas itu, *Papuangang* Biringlambang mempunyai tugas dan wewenang untuk melantik *mara'dia* bila *Papuangang* Limboro berhalangan hadir.

Pejabat adat selanjutnya adalah *Pabbicara Kaiyang* yang dijabat oleh *Puang* Sodo. Pejabat adat yang ketiga ini diangkat oleh *Manyambungi* untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Alasan pengangkatannya oleh sebab memiliki ke-

ahlian khusus dalam mengambil kesimpulan dalam memutuskan suatu kasus yang sulit diputuskan oleh *mara'dia*. Gelarnya mula-mula disebut *Pabbicara* yang dalam lontarak disebut *Pabbicara Manjopai*. Tugasnya sebagai pembantu *mara'dia* di bidang hukum yang mempunyai wewenang untuk memimpin tugas-tugas untuk memimpin sidang-sidang, dan pendamping tetap *mara'dia* (Kila, 2013:118). Selain tugas-tugas itu yang diembannya, ia juga biasa disebut Kepala urusan Pengadilan dan menerima tamu-tamu dari jurusan barat. Setelah pengangkatan ketiga orang pejabat adat tersebut, maka ia kemudian disebut *Tallu Sokko Adat* (tiga orang pemangku adat) pada masa pemerintahan I Manyambungi.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas yang dikeluarkan oleh I Manyambungi pada masa pemerintahannya, ada salah satu kebijakan monumental yang dibuat oleh beliau menyangkut persyaratan seorang calon pemimpin atau *mara'dia* di masa yang akan datang dan berlaku secara turun temurun hingga terhapus sistem pemerintahan kerajaan di Sulawesi Selatan ketika itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh I Manyambungi di hadapan para anggota adat *Appe Banua Kaiyang* yang menghadirkan rakyat dalam salah satu pertemuan tahunan antara penguasa dengan rakyat setelah selesai panen di daerah Napo. Kebijakan itu adalah menyangkut persyaratan dan prasyarat bagi seseorang yang mempunyai sifat *tomalabbi*. Pesan itu adalah merupakan pesan terakhir dari I Manyambungi sebelum wafat yang berbunyi seperti berikut:

"Madondong duambongi anna matea, mau ana'u mau appo'u muannai menjari ma'dia mua' tania tonamaassayanni lita'na tomaassayanni pa'banua. Da muannai dai di pe'uluang, mua mesuani pulu-pulunna, mua mato'dori kedona, apa iyamo tu'u namaruppu-ruppu lita'.

(Besok lusa manakala saya mangkat, walaupun anak saya dan cucu saya, janganlah hendaknya diangkat menjadi

raja kalau bukan dia orang yang cinta kepada tanah air dan rakyat kecil. Jangan pula diangkat menjadi calon “raja” bila mempunyai tutur sapa yang kasar, berbuat, bertindak kasar dan kaku pula, sebab orang seperti itulah yang akan menghancurkan negeri” (Saharuddin, 1985:14).

Jika diteliti dengan cermat mengenai kandungan makna dari pesan tersebut, tampak isinya adalah mengandung makna yang sangat dalam menyangkut dunia politik pada masa-masa mendatang di Kerajaan Balanipa. Bahwa inti persyaratan mutlak bagi calon penguasa adalah mereka harus menyayangi rakyat kecil, dan menyelamatkan tanah air. Kedua persyaratan itu mutlak harus melekat pada diri sang calon penguasa, selain itu dia juga harus bersifat luhur. Sifat luhur seperti yang dimaksud itu dapat dilihat pada kata *tammasuani pulu-puluna, tammato’dori kedona*, artinya seorang calon penguasa di Mandar harus memiliki sifat dan budi pekerti yang baik yang meliputi tutur kata yang baik dan tidak kasar, tidak mempunyai sifat atau tindakan yang kaku serta kasar.

Isi pesan I Manyambungi tersebut, sangat bermakna bagi kelanjutan dan perkembangan Kerajaan Balanipa ke depan. Di dalamnya terdapat kombinasi antara sifat dan dedikasi kepada rakyat dan tanah yang dibebankan oleh rakyat kepada para *mara’dia* dan turunannya atau kelompok pemangku adat dan turunannya. Semua itu menandakan bahwa adanya hubungan antara pengajaran dengan pembentukan sifat manusia untuk berlaku amanah terhadap siapapun juga. Prasyarat calon pemimpin lokal yang formal telah dicanangkan oleh I Manyambungi pada akhir masa pemerintahannya. Prasyarat itu berlaku secara turun temurun bagi siapa saja yang akan menduduki jabatan sebagai *mara’dia*.

I Manyambungi *mara’dia* Balanipa yang pertama adalah merupakan peletak dasar pemerintahan yang seimbang antara pemerin-

tah (*mara'dia*) dan dewan adat sehingga pada masanya kerajaan dapat berkembang dengan cepat. Begitu pula hubungan antara rakyat dan pemerintah dapat terjembatani lewat perantaraan dewan adat. Meskipun demikian, pada beberapa bagian pemerintahan masih belum sempurna. Itulah sebabnya sehingga pada masa pemerintahan berikutnya hal tersebut barulah disempurnakan. Penyempurnaan itu terutama dilakukan oleh *mara'dia* Balanipa ke-2, yaitu Tomepayung sebagai pengganti I Manyambungi. Tomepayung adalah anak dari I Manyambungi dari istrinya yang berasal dari Kerajaan Gowa.

Tomepayung sebagai *mara'dia* Balanipa yang ke-2 tetap melanjutkan program ayahnya untuk mengembangkan Kerajaan Balanipa. Ia mewarisi dasar-dasar kebijakan, kepemimpinan, dan keberanian yang telah diajarkan oleh ayahnya dan tertanam di dalam dadanya. Beliau secara mantap menata kewenangan dan pembagian tugas yang adil dan saling membantu antara *mara'dia* dengan *kaum ada'*. Model itu diterapkan dan mewarnai pembagian tugas dan wewenang bagi para *mara'dia* dan *kaum ada'* di semua kerajaan yang berada di kawasan Mandar pada masanya. Kebijakan paling menonjolkan yang dicetuskan oleh *mara'dia* ke-2 ini adalah keberhasilannya menciptakan suatu kawasan yang bersatu dalam suatu ikatan persekutuan.

Tomepayung adalah keturunan dari Kerajaan Gowa sebab orang tuanya (ibunya) berasal dari Kerajaan Gowa, yaitu kemanakan dari raja Gowa, Tumapparisi Kallonna. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan suatu upaya untuk mempersatukan semua kerajaan yang di kawasan Mandar. Penyatuan dilakukan lewat suatu pertemuan yang dikenal dengan nama Pertemuan Tammajarra. Selain itu, ia juga memprioritaskan dua program pengembangan kerajaan, yaitu menyempurnakan masalah kelembagaan pemerintahan dan menjalin hubungan erat antara Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu.

Pertemuan yang dimaksud itu, dilakukan di suatu bukit dalam wilayah Kerajaan Balanipa yang diikuti oleh enam buah kerajaan. Mengapa baru enam kerajaan yang mengikuti perjanjian tersebut padahal sejak itu sudah dikenal *Pitu Babana Binanga* (tujuh kerajaan yang berada di muara sungai). Memang demikian kenyataannya, yaitu Pitu Babana Binanga sudah tercetus pada saat ikrar Tamajarra dilakukan, namun anggotanya baru enam kerajaan. Berselang beberapa waktu lamanya, barulah dicukupkan menjadi tujuh kerajaan yaitu setelah bergabungnya Kerajaan Binuang sebagai anggota persekutuan yang ketujuh. Proses bergabungnya kerajaan ini melalui suatu proses perjalanan yang panjang.

Pertemuan Tamajarra yang melahirkan Persekutuan Pitu Babana Binanga diakhiri dengan suatu ikrar yang berbunyi:

*"Malilu sipakainga, ra'ba sipatokkong, manus siparappe.
Madondong duambongi anna'diang tue api di Ba'ba Binanga,
ia tomo tia namappui'dei.*

*Anna'mua'i'daimalanapi'deinalaomidiindo ada'na, nappi'dei
mua iddai naulle namaindommi tu'u messita lao diama
ada'na di Balanipa anna diomi di ama ada'na, napi'demi tu'u".*

Artinya:

Hilaf saling mengingatkan, rebah saling menegakkan, hanyut saling menepikan.

Besok lusa ada api menyala dinegerinya, dia sendiri yang harus memadamkannya. Jika ia tidak mampu memadamkannya, ia harus ke ibu adatnya untuk meminta memadamkannya.

Jika ibu adatnya tidak dapat memadamkan, ia harus menemui ayah adatnya di Balanipa dan akan padamlah (Syah, 1997:92).

Klausul Perjanjian Tamajarra itu terdapat beberapa versi, namun pada dasarnya isi dan kandungannya hampir sama. Kalau versi yang dimunculkan oleh Sjarifuddin (1988) dalam (Mandra, 1987:25-30). Klausul sangat panjang hingga satu halaman penuh, oleh sebab itu, dari segi panjangnya kalimat, menyebabkan adanya suatu makna dan isi tidak sama dengan versi sebelumnya. Tetapi pada dasarnya inti dari isi perjanjian itu adalah sama yaitu pertemuan untuk melakukan penyatuan beberapa kerajaan di dalam satu wadah dengan tujuan pertahanan bersama menghadapi kemungkinan serangan dari kerajaan lain dan sekitarnya.

Pasca penyatuan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Mandar, Tompepayung lalu menata struktur pemerintahannya, hal itu terutama dilakukan setelah ditaklukkannya Kerajaan Passokkorang. Penataan pemerintahan itu tertujuh secara khusus pada penetapan dan pengangkatan seorang *mará'dia matoa* sebagai wakil raja. Dan yang terpilih dalam jabatan itu adalah Todijallo yaitu saudaranya tapi lain ibu. Ia adalah merupakan pemangku *mará'dia matoa* yang pertama di Kerajaan Balanipa. Jabatan itu juga dikenal dengan sebutan "*peannaguruanna ada*". Jabatan ini identik dengan jabatan wakil *mará'dia*. Sejak saat itu, jabatan *maradia matoa* selalu diduduki oleh golongan bangsawan yang berdarah murni sebab dialah yang merupakan calon pengganti raja/*mará'dia*.

Jabatan *mará'dia matoa* bukan berarti jabatan tua atau raja tua, tetapi ia disejajarkan sebagai wakil *mará'dia* yang diharapkan dapat bekerjasama dengan *mará'dia*. Pengangkatannya dilakukan oleh oleh *mará'dia* setelah mendapat persetujuan dari dewan pemangku adat kerajaan. Jika dalam suatu sidang dewan pemerintahan kerajaan, maka *mará'dia* harus hadir untuk memimpin sidang, sedang *mará'dia matoa* bertindak sebagai *peannangguruanna seipuang* (penasehat hadat). Seandainya anggota dewan hadat

ingin bertemu dengan *mara'dia*, tidak mutlak harus melalui *mara'dia matoa* begitu juga perintah yang dikeluarkan oleh *mara'dia* tidak mutlak harus disampaikan melalui *mara'dia matoa* (Syam, 1997:27).

Jabatan yang sama itu agak berbeda dengan jabatan *mara'dia matoa* di Kerajaan Pamboang sebab orang yang diangkat untuk menjabat jabatan tersebut, bukanlah sebagai putra mahkota. Hal ini dilakukan agar *mara'dia matoa* tertutup kemungkinan melakukan kudeta untuk mengambil alih jabatan *mara'dia*. Meskipun demikian, derajat kebangsawanan pejabat *mara'dia matoa* adalah keturunan atau *bija* sehingga derajat kebangsawanannya tetap tinggi, yaitu *puang sassigi*. Perbedaan syarat pengangkatan seorang *mara'dia matoa* di Kerajaan Pamboang dengan di Kerajaan Balanipa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kudeta atau perebutan kekuasaan.

Selain jabatan *mara'dia matoa* yang dibentuk oleh Tomepayung, jabatan yang sama juga bentuk oleh beliau yaitu *mara'dia malolo*. Jabatan ini ada yang mengidentikkan dengan jabatan sebagai panglima perang kerajaan, pemangku jabatan pertamanya adalah Daetta. Jabatan ini dipegang oleh golongan bangsawan yang membawahi langsung angkatan perang kerajaan dan bertanggungjawab kepada *mara'dia* Balanipa. Angkatan perang Kerajaan Balanipa disebut *Joa* yang terdiri atas empat bagian yaitu; *Joa Matoa* (pasukan pengawal raja / *mara'dia*), *Joa Passinapang* (pasukan bersenjata senapan), *Joa Pakkangbusu* dan *Pa'burasang* (pasukan sumpit). Setiap angkatan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Annangguru yang dibantu oleh beberapa jabatan-jabatan yang ada di bawahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan (Karim, 2014:38).

Setelah melakukan penataan di bidang pertahanan, Tomepayung kembali menata kelembagaan pemerintahan lainnya yaitu dengan dibentuknya lembaga adat kerajaan yang bertugas membantu

mara'dia dalam bidang pemerintahan sehari-hari. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengangkat dan memberhentikan seorang raja. Sebenarnya lembaga ini hanya dilengkapi saja oleh Tomepayung sebab sudah ada sebagian yang dibentuk oleh *mara'dia* sebelumnya yaitu I Manyambungi. Lembaga adat ini ketika I Manyambungi memerintah hanya terdiri atas empat orang pejabat (*appe sokko*), oleh Tomepayung dilengkapi menjadi sepuluh orang pejabat yang dikenal dengan nama *sappulo sokko ada'*. Orang yang menjabat jabatan tersebut adalah tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Itulah sebabnya sebagian orang menganggap sebagai staf ahli/tenaga ahli yang bertugas mendampingi raja di istana dalam menjalankan roda pemerintahan (Daud, 2007: 35).

Walaupun jabatan *mara'dia matoa* sebagai penasihat *mara'dia* yang mengkoordinir dewan pemangku adat, tetapi ia sendiri tidak termasuk salah satu anggota dewan *sappulo sokko ada'*. Mungkin itulah sebabnya sehingga dewan *ada' sappulo sokko* jika berurusan dengan *mara'dia* tidak harus melalui *mara'dia matoa*. Tidak semua anggota dewan *sappulo sokko ada'* memiliki wilayah pemerintahan dan diperintah sendiri. Misalnya *papuangang* Rui tidak memiliki wilayah pemerintahan sendiri sehingga ia juga tidak termasuk kepala pemerintahan wilayah, tapi ia adalah salah seorang pemangku dewan *sappulo sikko ada'*. Tugasnya adalah sebagai *suro* atau utusan khusus kerajaan, terutama kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam persekutuan Pitu Babana Binanga. Pengangkatannya sebagai *pa-puangang* oleh *mara'dia* Tomepayung sebab telah berjasa membantu Kerajaan Balanipa menghancurkan Kerajaan Passokkorang.

Perkembangan kerajaan yang begitu cepat memaksa *mara'dia* Balanipa mulai menata dengan baik sarana transportasinya, terutama transportasi laut yang mendesak untuk ditingkatkan fungsinya. Hal itu perlu dilakukan mengingat transportasi lautlah yang men-

jadi andalan kerajaan dalam meningkatkan perekonomian kerajaan. Mobilitas penduduk dan arus barang ketika itu hanya mengandalkan laut yang dapat menghubungkan berbagai wilayah yang ada di sekitarnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka *mara'dia* Balanipa, Tomepayung mengangkat seorang syahbandar (*sawannar*). Pengangkatan tersebut sangat mendesak sebab pelabuhan kerajaan sudah mulai ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang antar pulau. Jabatan *sawannar* dijabat secara ganda oleh salah seorang *papuangan* dan anggota *sappulo sokko ada'* yang bernama *papuangan* Koyong. Beliau sekaligus juga sebagai bendahara kas Kerajaan Balanipa (Kila, 2013:126-127).

Tugas *sawannar* adalah mengatur lalu lintas pelayaran yang sempat berlabuh di pelabuhan kerajaan. Memungut cukai (*cuke*) atau bea dari kapal-kapal pedagang. Jenis-jenis cukai yang dipungut oleh pejabat pelabuhan adalah sesuai dengan jenis barang yang dibawa atau yang diperdagangkan. Itu terjadi sebab sistem pasar ketika itu adalah barter sebab tidak memiliki mata uang seperti sekarang. Sistem ini memang agak terkendala sebab pihak pengelolah pelabuhan harus memiliki gudang barang-barang penyimpanan yang menjadi *cuke* pelabuhan. Itulah sebabnya sehingga terkadang barang-barang berbagai jenis sebagai hasil cukai menumpuk di gudang pelabuhan. Dan jika hal seperti ini terjadi, maka *sawannar* harus mengambil keputusan untuk menyeter langsung kepada *mara'dia*.

Untuk menopang laju perkembangan perekonomian kerajaan, maka *mara'dia* Balanipa bersama hadatnya membentuk satu lembaga ekonomi yang disebut *sappulo sakka manarang*. Lembaga ekonomi ini terdiri atas sepuluh jenis keahlian yang dikelola oleh orang-orang tertentu sesuai dengan bidangnya. Kesepuluh bidang keahlian itulah yang merupakan salah satu sumber penghasilan bagi kerajaan, selain usaha pertanian, baik pertanian lahan basah mau-

pun kering. Dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, masing-masing berada di bawah kendali dan tanggung jawab langsung kepada *mara'dia*.

Selain itu, Tomepayung juga mulai memikirkan dan menata hubungannya dengan kerajaan tetangga dan sekitarnya. Untuk merealisasikan maksud itu, Tomepayung menggagas untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan antara Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Kerjasama itu diwujudkan dalam suatu pertemuan yang dikenal dengan nama pertemuan Luyo, atau *Allamungang Batu* yang diselenggarakan di daerah Luyo. Perjanjian ini dilaksanakan abad ke-18 yang mempertemukan persekutuan raja-raja di wilayah pantai dengan pegunungan, mempererat persahabatan (*sipamanda'* atau saling menguatkan) sehingga kawasan itu lebih dikenal dengan nama Mandar. Perjanjian *sipamanda'* itu berbunyi sebagai berikut:

"Ulu Salu memmata di sawa, Ba'ba Binanga memmata di pearappe anna mangiwang, sisarappai mata malotong anna mata mapute, anna sisa'ra Pitu Ulunna Salu anna Pitu Ba'ba Binanga".

Artinya;

Ulu Salu mengawasi ular sawah (musuh yang berasal dari arah gunung), Ba'ba Binanga mengawasi tempat terdamparnya ikan hiu (musuh yang berasal dari arah laut), setelah bercerai mata hitam dengan mata putih, barulah berpisah Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Babana Binanga (Saharudin, 1985:51).

Perjanjian itu dibuat selain untuk mempersatukan kesamaan pandang tentang pertahanan dan keamanan, juga karena adanya pelarian atau tawanan perang Kerajaan Passokkorang dari Balanipa yang menimbulkan kesalahpahaman antara Kerajaan Balanipa dengan penguasa di Pitu Ulunna Salu. Tapi paling penting dari lahirnya

perjanjian itu adalah lahirnya kesepakatan mempertegas konsekuensi persatuan budaya dan suku dengan sebutan Mandar (Mandra, 2009:61). Mereka yang bersekutu bersepakat menjali persatuan dan kesatuan wilayah serta mengembalikan nama Mandar sebagai bukti dari kesepakatan kebersamaan mereka. Itulah sebabnya perjanjian Luyo dikenal juga dengan istilah *passemandarang*, yang artinya Mandar keseluruhan walaupun terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Pitu Ulanna Salu dan Pitu Babana Binanga.

Ada perluasan wilayah dengan jalan melalui ikatan perjanjian atau *assitalliang*, namun ada juga yang terjadi sebab keikhlasan kedua belah pihak untuk menggabungkan wilayahnya menjadi satu. Ada beberapa kasus seperti ini terjadi pada masa pemerintahan *maradia* Balanipa kedua yaitu Tomepayung. Contohnya adalah dengan bergabungnya tiga wilayah kecil yang berada di sebelah timur Kerajaan Balanipa, yaitu Aruang Tomadio, Aruang Mapilli, dan Aruang Nepo. Ketiga wilayah yang dimaksud itu, tadinya berdiri sendiri sebagai wilayah merdeka dengan pemerintahan sendiri. Ketiga wilayah itu lebih dikenal dengan sebutan tallumpanuae (tiga negeri yang bersepakat untuk meng-integrasikan wilayahnya ke dalam wilayah Kerajaan Balanipa (Kila dan Muhammad Amir, 2007:129).

Ketika terjadi peperangan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bone, pihak Kerajaan Gowa terdesak dan hampir mengalami kekalahan sebab merasa sudah putus asa membendung arus kekuatan pasukan Bone yang begitu keras. Akibat kondisi tersebut, raja Gowa lalu meminta bantuan kepada orang Mandar dan *maradia* Balanipa, Tomepayung tentu saja tidak dapat menolak permintaan tersebut. Hal ini sebab didasarkan pada ikrar yang pernah diucapkan antara Kerajaan Gowa dan I Manyambungi sebelum kembali ke Mandar. Bantuan pihak Tomepayung atas nama Mandar, akhirnya perang dapat dimenangkan oleh Kerajaan Gowa. Perang antara kedua pi-

hak tersebut telah menelan korban yang tidak sedikit jumlahnya.

Peperangan yang terjadi itu cukup melelahkan Kerajaan Gowa sehingga hampir ia mengalami kekalahan seandainya tidak mendapat bantuan dari sahabatnya, yaitu Mandar yang diwakili oleh Kerajaan Balanipa di bawah pemerintahan Tomepayung. Kemenangan tersebut menandakan bahwa hubungan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Balanipa secara khusus dan Mandar secara umum sudah terjalin dengan erat pada masa itu. Sebagai balas jasa terhadap Kerajaan Balanipa, Kerajaan Gowa lalu menyerahkan Kerajaan Binuang sebagai hadiah untuk dijadikan sebagai wilayah ketujuh persekutuan Babana Binanga yang ketika awal pembentukannya hanya terdiri atas enam kerajaan. Sejak saat itulah Persekutuan kerajaan-kerajaan di Mandar resmi menjadi Persekutuan Pitu Babana Binanga.

Penyerahann Kerajaan Binuang sebagai hadiah kepada Kerajaan Balanipa memunculkan pertanyaan. Mengapa kerajaan itu yang kemudian dijadikan sebagai hadiah untuk Kerajaan Balanipa? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentu saja kita harus melihat latar sejarah antara Kerajaan Binuang dengan Kerajaan Gowa. Ketika itu, Kerajaan Binuang merupakan kerajaan *palili* dari Kerajaan Gowa setelah dibeli dari Kerajaan Batulappa. Dan Kerajaan Binuang menjadi *palili* Kerajaan Batulappa setelah kerajaan tersebut kalah dalam perang yang terjadi pada pertengahan abad ke-17. Penyebab terjadinya perang antara Kerajaan Batulappa dengan Kerajaan Binuang sebab raja Binuang ingin berbuat tidak senonoh terhadap istri raja Passokkorang yang juga adalah anak dari raja Batulappa. Sebab perlakuan itulah sehingga Kerajaan Binuang diserang oleh Kerajaan Passokkorang bersama Kerajaan Batulappa hingga takluk (*Lontarak Binuang*, tt. : 15).

Ada dua karya monumental yang dilakukan oleh *mara'dia* Balanipa ke-2, yaitu mempersatukan tujuh buah kerajaan yang ada di kawasan Mandar melalui suatu pertemuan yang dikenal dengan nama Pertemuan Tamajarra pada tahun 1580. Pada pertemuan ini melahirkan kesepakatan antara peserta pertemuan untuk saling bantu membantu dalam berbagai hal, baik menyangkut persoalan ke dalam atau intern maupun secara ekstern kerajaan. Inti pertemuan adalah tekad untuk bersatu sehidup semati dan hidup rukun sebagai suatu keluarga. Pada pertemuan itu, Kerajaan Balanipa diangkat sebagai bapak dan Kerajaan Sendana sebagai ibu. Empat kerajaan lainnya adalah dianggap sebagai anak dengan tugas masing-masing yang diembankan kepadanya.

Selain berhasil membuat jaringan politik kekuasaan yang monumental di antara kerajaan-kerajaan sekitar Balanipa, beliau juga menginisiasi suatu pertemuan untuk membuat kerjasama antar persekutuan kerajaan. Pertemuan ini dikenal dengan nama Pertemuan Luyo atau *Sipamanda* di Luyo. Perjanjian kesepakatan perdamaian abadi antara *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Babana Binanga* ini ditandai dengan penanaman tiga buah batu sebagai simbol pertemuan. Ketiga batu itu, kini lalu menjadi simbol sejarah persatuan antara kedua persekutuan tersebut. Perjanjian dua buah persekutuan kerajaan tersebut, menjadi tonggak kebesaran peradaban Mandar. Hingga kini, masyarakat Mandar masih mengenal dan mengingat baik kedua nama persekutuan tersebut (Kila, 2013: 103).

Sebelum Tomepayung mengakhiri masa pemerintahannya, iapun mengundang *Puang* Dipoyosang, *Papuangan* Napo dan *Papuangan* Samasundu untuk berunding tentang keinginannya untuk berkenalan dengan wilayah seberang Sungai Madatte. Hal ini dilakukan sebab *mara'dia* Balanipa ingin melakukan perluasan wilayah secara damai. Namun sebelum membicarakan maksud tersebut,

terlebih dahulu mereka bertiga mengusulkan kepada *mara'dia* agar terlebih dahulu membentuk pembantu *mara'dia* atau wakil *mara'dia* yang disebut *mara'dia matoa*. Untuk jabatan itu, maka diangkat saudaranya sendiri yang bernama Todijallo.

Pada akhir masa jabatannya, Kerajaan Balanipa mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya. Berbagai perangkat kerajaan dibentuk untuk kemajuan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Hampir dapat dipastikan bahwa *mara'dia-mara'dia* penggantinya tidak banyak melakukan perubahan dalam kerajaan, baik dari segi struktur pemerintahan, maupun dari segi perekonomian. Hal ini dapat dipahami sebab Tomepayung telah melakukan semuanya. Pengganti beliau lebih banyak hanya melakukan atau melaksanakan apa yang telah diperbuat atau dibentuk oleh Tomepayung. Kondisi politik dan perekonomian Kerajaan Balanipa ketika itu cukup baik dengan berhasilnya dibentuk lembaga-lembaga yang menaungi masalah-masalah tersebut.

Ketika Tomepayung berakhir masa jabatannya, ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Todijallo. Beliau adalah saudara lain ibu yang berasal dari Balanipa, Mandar. Masa pemerintahan beliau tidak banyak diketahui dan dicatat dalam lembaran sejarah daerah ini. Di dalam *lontarak* disebutkan bahwa beliau hanya memperkuat kelembagaan kerajaan tanpa banyak melakukan perubahan ekonomi dan politik. Tidak banyak yang dilakukan oleh beliau sebab memang struktur pemerintahan kerajaan serta dewan adat sebelum beliau menjabat telah dilengkapi oleh Tomepayung, sehingga praktis beliau hanya melanjutkan apa yang telah diperbuat oleh pendahulunya. Ketika itu hanya dikatakan bahwa beliau telah berhasil memperkuat kembali persahabatan antara kerajaan-kerajaan persekutuan yang ada di *lita'* Mandar dengan Pitu Ulunna Salu.

Tidak terlalu banyak yang diketahui tentang seluk beluk masa pemerintahannya hingga berakhir lalu digantikan oleh saudaranya yang bernama Daetta atau yang dikenal dengan nama Kakanna I Pattang. Prilaku politik beliau ketika menjabat sebagai *mara'dia* Balanipa yang ke-4, beberapa diantaranya yang sangat menonjol. Paling monumental adalah tentang diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Penerimaan agama Islam sebagai resmi kerajaan membawa imflikasi politik bagi negeri-negeri yang ada di kawasan Mandar ketika itu. Mengapa demikian? Sebab Kerajaan Balanipa ketika itu adalah merupakan bapak bagi Persekutuan Pitu Babana Binanga. Semua prilaku politik *mara'dia* Balanipa akan menjadi acuan bagi kerajaan-kerajaan lainnya dikawasan itu.

Setelah agama Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan, shalat Jumat dilakukan di Balanipa oleh I Tuan Binuang. Inti setiap salat Jumat dilakukan adalah mendoakan siang dan malam, pagi dan sore agar negeri Balanipa aman sentosa dan tentram. Begitu juga agar usaha pertanian masyarakat menjadi subur, usaha perikanan menjadi maju, rakyat taat beragama, tanaman subur, dan rakyat sehat (Syah, 1992:50-51). Dimana I Tuan Binuang mendirikan shalat Jumat, di situ ia selalu direstui oleh Daetta agar kita selamat dan seluruh negeri aman dari berbagai masalah.

Agama Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan pada masa pemerintahan Daetta (*mara'dia* Balanipa ke-4), maka dibentuk pemangku adat yang disebut Kali Balanipa. Tugasnya adalah menyelesaikan urusan yang bersangkutan paut dengan syariat agama Islam. Orang pertama yang menduduki jabatan tersebut yang menurut istilah disebut juga dengan istilah *mara'diana sara'*, bernama Pangnga Tamerus. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh beberapa orang pejabat pemangku adat yang disebut *bidal* (tukang azan), *katte* (khatib), *doya* (pembawa kotak amal).

Kalau dicermati hal itu, dipastikan bahwa posisi Kali Balanipa berada langsung di bawah *mara'dia* Balanipa atau sejajar dengan dewan Adat *Sappulo Sokko*. Jika diperhatikan struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa, kedudukan Kali Balanipa sejajar dengan *mara'dia malolo*, *annanggurunna mara'dia* dan syahbandar kerajaan. Suatu kedudukan yang bahkan jika dilihat dari segi fungsinya melebihi dari jabatan-jabatan yang setara dengannya. Meskipun ia adalah jabatan baru dalam struktur pemerintahan kerajaan, namun ternyata ia dapat memposisikan dirinya setarap dengan beberapa jabatan yang telah ada, atau bahkan berada di atas beberapa jabatan yang ada sebelumnya sejak Kerajaan Balanipa terbentuk.

Implikasi lain adalah diterapkannya zakat dan fitra bagi masyarakat secara umum. Ketika itu, sehabis lebaran datanglah semua masyarakat menghadap pada kadi Balanipa untuk mengantar zakat fitra, dan seandainya tidak datang maka yang bersangkutan di denda satu *taik* atau 16 mas atau 0,5 *ringgit*. Semua perayaan hari besar Islam tidak boleh dilaksanakan oleh masyarakat umum sebelum menghadap kepada Kali Balanipa, antaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan, berlebaran, dan bermaulid. Ketika *muking patappulo* (mukim 40) didirikan, maka murid-muridnya tidak boleh dikenai sinar matahari, tidak meronda dan tidak disuruh memikul. Yang dimaksud dengan *muking patappulo* adalah satu pemukiman bagi murid-murid I Tuan Binuang yang berjumlah 40 orang. Inilah kemudian yang dijadikan sebagai pegawai sara yang ditempatkan pada berbagai masjid yang telah didirikan dikemudian hari.

Selain aturan-aturan seperti tersebut, juga dijelaskan tentang aturan-aturan menyangkut *mara'dia* Balanipa. Jika *mara'dia* Balanipa melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerajaan lain, maka Kadi Balanipa harus tetap di kerajaan dan tidak kemana-mana. Demikian juga jika terjadi perkelahian dalam negeri, kalau ia ke barat tidak

hancur dan kalau timur juga tidak hancur. Kalau ada bangsawan Balanipa yang meninggal dunia di wilayah Babana Binanga, atau rusuh hingga ke Sendana diikuti oleh *muking*, termasuk Kadi Balanipa seandainya mempunyai kesempatan. Jika ia meninggal dunia di wilayah Babana Binanga dan tidak disampaikan kepada kadi, maka ia tidak wajib hadir kecuali anggota pengaji hadir selama empat puluh malam. Kalau Kali Balanipa melakukan kunjungan atau keliling Babana Binanga, Kali Babana Binanga harus menjemput kedatangannya. Selanjutnya mengantar ke rumahnya untuk dijamu. Ia bebas membicarakan apa saja, termasuk berbicara soal agama Islam. Kecuali jika kali Balanipa sudah kembali, barulah kali Babana Binanga berkuasa pada kedudukannya semula.

Agama Islam bagi orang Balanipa, Mandar adalah suatu fakta baru bagi kerajaan tersebut dan penerimaannya dapat dikatakan tidak menemui kendala. Hal ini terkait dengan strategi yang diterapkan oleh penyebarannya, yaitu memulainya terlebih dahulu dari pimpinan tertinggi yaitu raja */mara'dia*. Kenapa para penyebar Islam itu melakukan pada pimpinan tertinggi sebab masyarakat tradisional ketika itu masih mempercayakan sepenuhnya segala persoalan kepada rajanya */mara'dia*, sekalipun itu persoalan yang sifatnya pribadi. Hal itu dilandasi adanya ungkapan bahwa agama raja */mara'dia* adalah agama rakyat sehingga konversi ke dalam agama Islam terjadi secara besar-besaran menyeluruh dalam waktu yang sangat singkat hanya dengan melalui maklumat atau dekrit dari sang penguasa tertinggi.

Begitu hebatnya pengaruh dekrit raja */mara'dia* bagi anggota masyarakat sehingga penduduk kerajaan diidentikkan dengan agama Islam dengan kata lain yang dapat menjadi penduduk suatu kerajaan haruslah beragama Islam. Pandangan ini kemudian dapat dibuktikan ketika raja Binuang ke-4 yang bernama Sipajonga mene-

rima agama Islam dari Abdurrahimi Kamaruddin, beliau mengusir penduduk asli Mirring dan Paku yang tidak mau menerima agama Islam dan tidak mau menghentikan makan *dona-dona* (tikus-tikus) (Syah, 1998: 91-92). Akhirnya mereka lari ke daerah Suppirang bersama keluarganya. Pandangan itulah yang menyebabkan sehingga pada awalnya ada yang memeluk agama Islam karena terpaksa sebab takut diusir dari tempat tinggalnya. Cara penyebaran seperti itu adalah sifatnya lebih politis sehingga corak keislaman pemeluknya bersifat formalitas.

Selain pembaharuan di bidang keagamaan, juga masalah hubungan antara wilayah *palili* lebih ditingkatkan dengan membuat perjanjian atau *assitalliang* yang berbunyi:

E *palili* jangan menginginkan kebesaran, jangan juga menginginkan kekecilan. Satu tidak bermaksud jahat, yang satu tidak khilaf. Satu tidak memaksakan kehendaknya pada kebesaran, satu tidak inginkan kekecilan. Satu tidak beremosi kepada kejayaan orang lain, satu tidak berniat merebut milik orang lain. Dan *palili* tidak dihalangi melaksanakan adatnya....Satu berjaga di ular sawah, kalau ikan mangi-wang naik ke darat, Balanipa menyuruh memberitahu kepada *palili*. Demikian pula kalau ular sawah menjalar, *palili* menyampaikan ke Balanipa, apalagi kalau *palili* berat jun-jungannya atau jinjingannya (Syah, 1997: 85-86)

Ketetapan kerajaan menyangkut bidang keagamaan ikut mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan dengan masuknya satu lembaga baru yang disebut *kali* atau *mara'diana sara'* seperti yang disebutkan di atas. Bidang pemerintahan ini berwenang mengurus pelaksanaan syariat Islam. *Kali* mempunyai aparat di setiap kampung yang disebut *imang* yang dibantu oleh *katte*, *bidal* dan *doya*. Kedudukan *kali* dalam struktur pemerintahan kerajaan sama dengan anggota adat lainnya, ia sebagai anggota legislatif untuk membantu

maradia atau raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu kedudukan *kali* sederajat dengan seorang *maradia*. Contoh kasus dapat dilihat ketika ada acara perkawinan, ketika berlangsung acara *paya'* atau makan makanan tertentu, ada dikatakan: "*Naiya kali siwali paya'i maradia*". Artinya dalam acara *paya' kali* sama kedudukannya dengan seorang *maradia* atau raja (Sewang, 1980: 40). Di bidang hukum adat, juga mengalami perubahan setelah masuknya Islam yaitu menyangkut pembagian harta warisan. Sebelum Islam, harta dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, setelah Islam masuk perempuan mendapat bagian seperti tiga dan laki-laki mendapat bagian dua pertiga atau dalam bahasa Mandar disebut istilah: *Mambullei tummuane, mattewei tobaine*.

Pada masa pemerintahan Daeatta, *maradia* Balanipa ke-4, Kerajaan Balanipa mengalami banyak kemajuan. Ketika ia meninggal dunia, lalu digantikan oleh saudaranya yang bernama Todigajang sebagai *maradia* Balanipa ke-5. Namun pada masa pemerintahan *maradia* Balanipa berikutnya, justru terjadi sebaliknya yaitu Kerajaan Balanipa mengalami perkembangan yang kurang menggemblirakan sebab cenderung menurun. Dia mengangkat saudaranya yang bernama Puatta Inangngarang sebagai *maradia matoa* atau Perdana Menteri. Beliau dibunuh oleh seseorang atas suruhan saudaranya sendiri, itulah sebabnya beliau digelar Todigajang. Artinya orang yang ditikam hingga terbunuh. Alasan pembunuhan itu dilatarikan oleh sikap putus asa saudaranya sebab ia menganggap dirinya sudah tua karena rambut kepalanya sudah beruban, namun belum juga diangkat menjadi *maradia* Balanipa. Meski berhasil membunuh saudaranya, namun ia sendiri tidak berhasil menjadi *maradia* Balanipa, justru saudaranya menggantikan *maradia* yang terbunuh tersebut, yaitu Todiboseang sebagai *maradia* Balanipa yang ke-6.

Masa pemerintahan Todiboseang ditandai dengan beberapa perubahan politik yang dilakukan oleh beliau. Awal pemerintahannya dimulai dengan memperbarui ikrar dan sumpah sehingga semakin erat dan kuat. Dialah yang meningkatkan wibawa kerajaannya atau pemerintahannya, meluaskan dan melebarkan wilayah kekuasaannya. Ia memiliki pasukan penebas hutan sebanyak 80 orang, penyumpit 100 orang, pasukan penyerang 80 orang. Beliau juga yang membangun istana kerajaan yang disebut istana petak tujuh yang diberi tambahan bangunan pada sisinya, tiga buah panggung kehormatan di depannya, pandai besi di arah pelaminan, pandai besi di arah serambi, pelarut dan penempa logam, pelukis dan pengukir kayu di bagian belakang istana.

Beliau juga membentuk atau mengadakan penarik *pattuddu'* yang dikenal dengan nama Iwannebala. Setiap perangkat terdiri dari enam orang. Satu perangkat dari bangsawan raja, satu perangkat dari bangsawan adat, dan satu perangkat dari rakyat umum. Dua landasan perahunya yang dikenal dengan nama Itandijokjo dengan empat buah perahunya. Setiap kampung memiliki pembuat arang, pemikul umum, penumbuk padi, pengambil *baru'* (penambal perahu yang bocor). Bukan hanya itu, beliau juga melebarkan wilayah kekuasaannya hingga mencapai sebagian wilayah Sawitto sampai ke Gamoe sampai sebelah atas, juga sampai ke Maroneng (Yasil, dkk. 1985:222-223).

Selain itu, ia juga membuat suatu perjanjian dengan Limae Ajatappareng. Perjanjian ini berlatarbelakang atas adanya penyerangan dari Limae Ajatappareng ke wilayah Pitu Babana Binanga melalui daerah Pitu Ulunna Salu. Perlawanan dilakukan dengan sengit oleh Pitu Babana Binanga hingga dapat memukul mundur pihak Limae Ajatappareng hingga perbatasan Paku, Pajalele. Upaya untuk mengakhiri perang dilalui dengan jalan perdamaian de-

ngan melakukan pertemuan di daerah tersebut tadi. Perjanjian ini dibuat untuk menentukan soal tapal batas antara keduanya. Hadir untuk menyelesaikan persoalan itu adalah raja Gowa dan menetapkan bahwa batas itu adalah sebelah luarnya batu adalah wilayah Mandar, dan sebelah kemari adalah wilayahnya Limae Ajatappareng. Sedangkan sungai yang menjadi perbatasan menjadi milik Todiboseang. Itulah sebabnya sehingga sungai yang menjadi tapal batas itu diberi nama Sungai Binanga Karaeng, artinya sungai milik raja atau karaeng dan sampai sekarang sungai itu masih memakai nama Sungai Binanga Karaeng (Akhmad, 2010: 124).

Kalau kita mencermati untuk mengetahui latar terjadinya perjanjian tersebut, ada beberapa versi yang membahasnya. Bahwa terjadinya perang tersebut sebab Limae Ajatappareng menyerang Pitu Babana Binanga, Mandar sehingga yang diserang berusaha mempertahankan wilayahnya dari serangan itu. Selain itu, ada juga menyatakan bahwa perjanjian itu lahir ketika akan terjadi perkawinan antara keluarga bangsawan *maradia* Balanipa, Mandar dengan keluarga dari golongan bangsawan Limae Ajatappareng. Juga karena adanya berita yang menyebutkan bahwa Kerajaan Balanipa terlebih dahulu besar dari Gowa. Perjanjian ini menetapkan adanya persamaan hak manusia dan daerah dalam arti yang seluas-luasnya, serta menyatakan untuk tidak saling menyerang jika suatu waktu terjadi kehilafan dari salah satu anggota persekutuan (Mandra, 2009: 31-33).

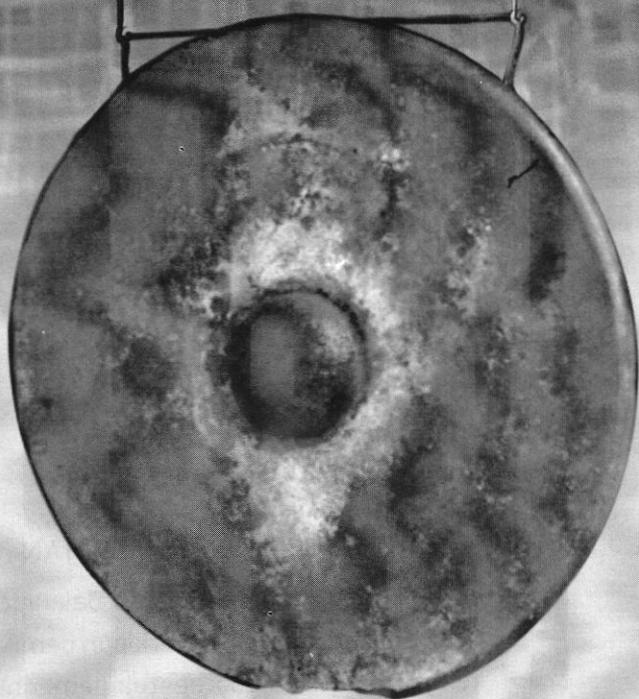
Selesai membuat perjanjian dengan Limae Ajatappareng, *maradia* Balanipa, Todiboseang bersepakat dengan anggota Pitu Babana Binanga untuk melanjutkan peperangan ke daerah Kaeli, Sulawesi Tengah. Kecuali pasukan Kerajaan Banggae tidak turut serta. Pada awal peperangan, pasukan Pitu Babana Binanga kewalahan menghadapi pasukan Kaeli yang sangat kuat. Kondisi itu memaksa

mara'dia Balanipa harus kembali ke Balanipa untuk mengambil perahunya sekaligus mengajak *mara'dia* Banggae yang bernama Tomatindo di Barobbo. Meskipun *mara'dia* Balanipa tidak yakin akan menang melawan Kaeli, tetapi karena spirit dari *mara'dia* Banggae yang begitu kuat sehingga perang dilanjutkan kembali dan ternyata menang.

Kemenangan tersebut memberikan semangat baru bagi Kerajaan Balanipa, di samping pengakuan baginya bahwa kerajaannya ternyata mampu menaklukkan Kaeli yang begitu besar dan kuat ketika itu. Meskipun kenyataannya telah menang, namun kemenangan itu harus dibayar dengan sangat mahal sebab *mara'dia* Balanipa yang memimpin peperangan itu meninggal dalam perjalanan pulang setelah perang usai. Itulah sebabnya sehingga beliau diberi gelar anumerta Todiboseang, artinya *mara'dia* yang meninggal kemudian perahunya didayung hingga ke Balanipa, Mandar. Setelah meninggalnya, ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Tomatindo di Burio.

Tomatindo di Burio yang nama *pa'daengannya* adalah Daeng Massikki menggantikan Todiboseang selama menjalankan roda pemerintahannya tidak banyak yang tercatat dalam lembaran sejarah Kerajaan Balanipa. Beliau hanya disebutkan bahwa ia tidak lama memerintah sebab dianggap banyak perilaku politiknya yang bertentangan dengan aturan adat yang berlaku. Salah satunya adalah melakukan peperangan dengan Kerajaan Pamboang, dalam peperangan itu, *mara'dia* Pamboang terbunuh. Oleh karena perbuatannya itu dianggap melanggar adat yang berlaku, maka beliau dimakzulkan. Pemakzulan itu dilakukan sebab telah dianggap melanggar persatuan dan kesatuan persekutuan Pitu Babana Binanga. Sebenarnya para pemangku adat tidak ada yang setuju atas penyerangan itu sehingga yang berangkat berperang hanya ditemani pengawal pribadinya.

Meskipun ia berhasil membunuh *mara'dia* Pamboang, namun tahtanya tidak dapat dipertahankan lebih lama. Beliau juga dibunuh oleh orang atas suruhan dari *mara'dia* Pamboang yang bernama Tolambusu, ayahanda dari Tomatindo di Sikkiri'na dan Tomatindo di Lakkading. Tomatindo di Burio kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Tolambusu. *Mara'dia* ini juga tidak lama memerintah sebab ia tidak disenangi oleh sesamanya raja karena ia suka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Dalam *lontara'* Mandar tidak diceriterakan tentang masa pemerintahannya kemudian ia digantikan oleh Tomatindo di Buttu. Beliau inilah yang kemudian membantu Kerajaan Gowa melawan Belanda yang dibantu oleh Arung Palakka dan para pengikut setianya.



BAGIAN III

**BENTUK PEMERINTAHAN DAN
HUBUNGAN ANTAR PEJABAT
DENGAN MASYARAKAT**

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Bentuk pemerintahan Kerajaan Balanipa mulai terbentuk ketika kerajaan juga lahir. Meskipun demikian, sebelum lahirnya kerajaan ini telah ada bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan *tomakaka*. Pemerintahan yang dimaksud memang tidak teratur seperti ketika wilayah-wilayah di Mandar telah berbentuk kerajaan. Pemerintahan itu sangat sederhana sifatnya dan condong lebih otoriter dan tak terkendali. Berbanding terbalik ketika wilayah ini telah berbentuk kerajaan sebab setidaknya telah mempunyai susunan pemerintahan yang teratur meskipun hanya sederhana sekali.

Perubahan bentuk wilayah pemerintahan ke dalam bentuk kerajaan, memang telah pula merubah kondisi perekonomian masyarakat, termasuk susunan pemerintahannya. Wilayah *Appe Banua Kaiyang* setelah menyatukan wilayah mereka ke dalam satu persekutuan lalu membentuk wilayahnya menjadi kerajaan, yaitu Kerajaan Balanipa. Sejak itu pula mereka mempunyai pemimpin yang mengatur hidup masyarakatnya dan *Appe Banua Kaiyang* sendiri sebagai pembentuk kerajaan menjadi wilayah inti yang kemudian dijadikan sebagai anggota dewan Hadat Tinggi kerajaanyang berwenang memilih *se-orang mara'dia* serta menurunkannya setelah melalui musyawarah adat.

Pada awal berdirinya Kerajaan Balanipa, susunan pemerintahannya masih sangat sederhana, dan bentuk pemerintahannya adalah berbentuk kerajaan dan tidak bersifat monarki yang otoriter. Artinya, Kerajaan Balanipa mempunyai bentuk pemerintahan sebagai kerajaan, namun *mara'dia* dibatasi kewenangannya oleh perangkat adat yang diperankan oleh Puang Dipoyosang sebagai anggota adat yang pertama, ini mungkin sama dengan DPR sekarang. Memang anggota adat ini pada awalnya hanya terdiri atas satu orang saja, namun dalam perkembangannya di masa pemerintahan I Manyambungi terus dikembangkan hingga mencapai empat orang (*Appe Sokko*).

Meskipun pada dasarnya bentuk pemerintahan tradisional di Balanipa, Mandar adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang *mara'dia*, namun dasar kekuasaannya adalah demokrasi. Artinya, kekuasaan *mara'dia* dibatasi oleh dewan adat, hal itu dapat dilihat ketika I Manyambungi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Puang Dipoyosang sebagai *mara'dia* Balanipa yang pertama. Sumpah atau *assitalliang* itu diucapkan oleh I Manyambungi (Todilaling) seperti berikut:

"Nauwang I Puang Dipoyosang: Upakaiyangngo'o Todilaling mupakaraja, dimadondonna diduambongi anna marrattas-rattas ouake, marruppu-ruppu'o batu, uwalaiembali akaiyangan". (Ipuang Dipoyosang menegaskan: Saya angkat engkau Todilaling sebagai pemegang tampuk pemerintahan, tetapi engkau harus hormati saya (sebagai pemegang tampuk kekuasaan adat). Besok lusa manakala engkau memutuskan sendi-sendi adat dan menghancurkan adat, maka saya akan mencabut kembali kebesaran yang telah kuberikan (Rahman, 2014:213).

Ikrar tersebut di atas, sangat jelas memperlihatkan bahwa *mara'dia* dalam menjalankan roda pemerintahan selama berkuasa harus mengikuti isi dari perjanjian itu. Selain itu, setiap *mara'dia* sangat jelas pula batas dan kewenangannya sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya ia selalu dikontrol oleh dewan adat tinggi kerajaan.

Dasar ikrar itu mengandung makna yang sangat dalam, berisi sifat-sifat dasar dari seseorang yang pantas dijadikan sebagai pautan. Sifat itu akan menjadi pertimbangan dasar agar seseorang *mara'dia* yang memerintah tidak akan diberhentikan (*dipasung*) oleh *ada'* atas nama rakyat. Untuk menghindari agar seseorang *mara'dia* tidak akan dipecat oleh *ada'* atas nama rakyat, hal tersebut di atas harus dihindari. Kenapa itu harus dihindari sebab ia merupakan simbol dari seorang pemimpin di Balanipa yang harus senantiasa dijaga dan dipatuhi. Ikrar atau *assitalliang* itu, kalau disejajarkan pada pemerintahan sekarang, ia adalah merupakan sumpah jabatan ketika seseorang akan dilantik menduduki suatu jabatan. Tetapi bukan hanya isi dari ikrar itu yang menjadi acuan perangkat *ada'* untuk memutihhitamkan seorang *mara'dia* ketika menjalankan tugasnya, tapi juga lingkungan hidup turut berperan sebagai tolok ukur yang menggerakkan lembaga *ada'* untuk memberhentikan seorang *mara'dia* dari kursi kekuasaannya. Kemakmuran rakyat termasuk kelestarian dan kesegaran lingkungan hidup adalah standar prima di dalam menilai keberhasilan seorang *mara'dia* di dalam mengendalikan roda kekuasaannya. Hal itu jika dikaitkan dengan tujuan pemerintahan yang sebenarnya yaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kelestarian dan terpeliharanya lingkungan hidup. Untuk mencapai semua itu, seorang *mara'dia* bersama seluruh perangkatnya harus

berlaku jujur, adil, tidak materialisme, pengayon serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan rakyat.

SISTEM PEMILIHAN *MARA'DIA*

Berbeda dengan pencalonan *mara'dia* Balanipa pertama dengan pencalonan *mara'dia* berikutnya. Perbedaan itu terletak pada sistem pemilihan calon, dimana *mara'dia* Balanipa pertama tidak dilakukan sistem pencalonan, tetapi langsung diangkat sebab telah berjasa membebaskan wilayah-wilayah *Appe Banua Kaiyang* dari ronrongan para *Tomakaka* yang ada di sekitarnya. Setelah pelantikan *mara'dia* pertama Balanipa, barulah aturan menyangkut pencalonan seorang *mara'dia* ditetapkan persyaratannya dan menjadi acuan secara turun temurun.

Dalam perkembangannya, seorang calon *mara'dia* harus berasal dari kelompok sosial yang paling tinggi. Di Kerajaan Balanipa, kelompok itu adalah *Todiyang Laiyanna* yang berhak untuk dicalonkan menjadi *mara'dia*. Sedang kelompok lainnya yang setingkat ke bawah, yaitu *Tau Pia* berhak dicalonkan untuk pemangku adat secara turun temurun pada jabatan adat *Sappulo Sokko*. Dua golongan di bawahnya tidak berhak untuk dicalonkan pada dua jabatan yang disebutkan itu.

Golongan *Todiyang Laiyanna* merupakan golongan tertinggi dan memiliki strata sosial dan ekonomi yang tinggi. Golongan inilah yang berhak menduduki jabatan puncak yaitu *mara'dia* di pusat pemerintahan kerajaan sebab ia memang adalah *ana' pattola payung*. Mereka berhak dipilih dan diangkat dalam jabatan *mara'dia*, *mara'dia matoa*, dan *mara'dia malolo* (*puang ressu*, *puang sangnging* dan *tallupparapa*). Sedang *puang sassigi*, *puang separapa* dapat dicalonkan sebagai *mara'dia* pada wilayah bagian atau *banua* dan *ana'*

banua saja. Tetapi golongan kedua dari *Todiyang Laiyanna* tidak tertutup kemungkinan untuk dicalonkan menjadi *mara'dia* seandainya golongan pertama tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh I Manyambungi bersama adatnya ketika telah dilantik.

Todiyang Laiyanna bukanlah satu-satunya persyaratan yang menentukan seorang calon *mara'dia*, setidaknya ada persyaratan lain yang mendukungnya yakni; memiliki kelebihan yaitu *mala'bi pau* atau *pau-pau*, *mala'bi gau'* dan *mala'bi kedo*. Kesemua itu dikenal dengan sifat pribadi yang terpuji, setia dan siap berkorban untuk membela demi kepentingan rakyat dan kerajaan. Calon *mara'dia* dan pemangku adat *Sappulo Sokko* wajib memiliki sifat seperti itu, jika tidak ia dapat digantikan oleh orang lain yang berasal dari golongan *Todiyang Laiyanna* pada posisi *puang separapa* atau 50 % kadar kebangsawanannya) dan *Tau Pia*. Itulah sebabnya di Kerajaan Balanipa tidak mutlak seorang anak *mara'dia* yang ayahnya sedang berkuasa secara otomatis menjadi pewaris mahkota kerajaan yang diduduki oleh orang tuanya.

Bilamana seorang calon *mara'dia* dari *ana' pattola payung*¹ dan pemangku adat telah ditetapkan, ia diwajibkan mencari pengalaman di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar supaya ia dapat mengetahui dengan baik apa yang menjadi keinginan rakyat atau persoalan-persoalan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Itulah sebabnya sehingga selama masa pencalonan, ia tetap secara terus menerus diamati tingkah lakunya oleh rakyat melalui kejadian-

¹*Ana' pattola payung* bagi Kerajaan Balanipa adalah bukan putra mahkota, sebab kerajaan ini tidak mengenal putra mahkota. Yang dikenal adalah *ana' pattola payung* yang terdiri atas semua anak bangsawan istana, semuanya berhak dipilih menjadi *mara'dia* jika yang bersangkutan lebih menonjol dari anak *mara'dia* yang sedang berkuasa. Itulah sebabnya sehingga anak seorang *mara'dia* yang berkuasa tidak secara otomatis menggantikan ayahnya jika turun tahta atau wafat. Namun demikian, anak *mara'dia* yang sedang berkuasa tetap menjadi perhatian dari pemangku adat yang bertugas di lembaga pendidikan khusus untuk para *ana' pattola payung*.

kejadian alam yang ada hubungannya dengan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jika kejadian alam dianggap baik, maka pertanda calon pemangku kekuasaan itu direstui dan akan berlanjut ke pelantikan secara resmi. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, itu pertanda buruk bagi calon-calon pemimpin tersebut, sebab ia dapat dicarikan pengganti lain dari golongan yang sama.

Biasanya tanggungjawab seorang calon pemimpin puncak di Kerajaan Balanipa berada di pundak *peannanggurunna ana' mara'dia*. Mereka yang terlibat dalam lembaga ini adalah pemangku adat yang memiliki keahlian khusus di bidangnya untuk mendidik calon *mara'dia* dan pemangku adat. Meskipun lembaga ini berada di bawah kekuasaan *mara'dia*, namun hak dan wewenang penuh berada di tangan pemangku adat atau *andongguru* yang ditugaskan untuk menilai anak didiknya (Rahman, 1987:222). Setelah calon pemimpin tersebut telah lolos dari berbagai ujian, barulah ia dapat dilantik untuk menjadi *mara'dia* dan pemangku adat.

Secara detail persyaratan seorang calon *mara'dia* di Kerajaan Balanipa adalah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: berasal dari keturunan bangsawan (*Todiyang Laiyanna*), berani, memiliki integritas, berahlak dan beriman (khusus setelah masuknya Islam), baik tutur katanya, baik tindak tanduknya dan tidak kasar, menyayangi rakyat dan *litha'*, sehat jasmani dan rohani serta berwawasan luas. Hal itu dapat dipahami sebab itu sesuai dengan pesan yang diucapkan I Manyambungi sebelum wafat dan itu menjadi suatu ketentuan bagi calon-calon *mara'dia* berikutnya, yaitu (dalam Bahasa Indonesia):

"Besok atau lusa jikalau saya wafat, janganlah sekali-kali engkau mengangkat seorang *mara'dia* atau anggota adat, walaupun anakku atau cucuku, apabila tingkah lakunya kasar, kaku, dan tidak senono, serta tidak menyayangi rakyat,

sebab itulah orang yang akan merusak dan menghancurkan negeri” (Daud, 2007:137).

Pesan-pesan inilah yang kemudian menjadi dasar rujukan bagi pemilihan seorang calon *mara'dia* dan calon pemangku adat di Kerajaan Balanipa dan berlaku secara turun temurun hingga dibubarkannya sistem pemerintahan kerajaan.

STRUKTUR PEMERINTAHAN

Menurut Daud (2007: 84-118) ; Struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa disusun seperti berikut: Pada awal terbentuknya kerajaan, raja atau *mara'dia* adalah sebagai pemegang puncak pemerintahan. Ia dibantu oleh pemangku adat yaitu; *Papuangan Limboro* dan *Papuangan Biringlembang* serta *Papuangan Appe Banua Kaiyang*. Perkembangan selanjutnya (masa Tomepayung): Raja atau *mara'dia*; *mara'dia matoa* (wakil *mara'dia*); *mara'dia malolo* (panglima perang); *Adat Sappulo Sokko* dan adat kecil yang menjadi pemangku adat bawahannya. Para perangkat pemerintahan itu dibantu oleh beberapa perangkat adat wilayah bawahan yang dikalahkan lewat perang atau wilayah yang bergabung secara sukarela.

Adat besar (*ada' kaiyang*) yang terdiri atas penguasa wilayah *Appe Banua Kaiyang* sebagai wilayah inti kerajaan (pemiliki kerajaan) mempunyai wilayah bagian atau *ana' banua*. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu perangkat adat *ana' banua* masing-masing yang bertanggungjawab secara berjenjang hingga *mara'dia* Balanipa. Setelah masuknya agama Islam, maka pejabat baru dibentuk lagi yang bernama *kali* (kadhi) yang posisinya sejajar dengan *mara'dia*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *mara'diana sara*. Kondisi ini berlangsung hingga berakhirnya masa pemerintahan kerajaan.

PENGANGKATAN *MARA'DIA*

Sistem pengangkatan dan pemberhentian terhadap seorang *tomakaka* dari jabatannya di masa ke-*tomakaka*-an tidak diketahui dengan jelas sebab sumber lokal tidak ada yang menjelaskannya. Hanya dijelaskan bahwa periode ketomakakaan di Mandar terjadi begitu lama, dan ada sekitar 40an *tomakaka* yang pernah eksis di Mandar pada masa lalu (Leyds, 1940: 24-25). Ketomakakaan yang paling terkenal di daerah Mandar adalah *Tomakaka Passokkorang*, pada sumber lain ada yang menyebutnya sebagai Kerajaan Passokkorang. Wilayah ini terletak di daerah Mapilli dan sekarang masuk wilayah administrasi Kabupaten Polman.

Proses pengangkatan dan pelantikan seorang *marad'ia* di Kerajaan Balanipa pada awal pembentukannya masih sangat sederhana. Ketika itu tidak ada persyaratan tertentu yang dipersyaratkan kepada I Manyambungi untuk diangkat dan dilantik sebagai *marad'ia* yang pertama Kerajaan Balanipa. Ketika itu, hanya karena jasanya sebab berhasil mengalahkan *Tomakaka Passokkorang* yang telah mengacau balaukan kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya, termasuk wilayah *Appe Banua Kaiyang*. Sebab ia telah membebaskan wilayah tersebut dari ronrongan *Tomakaka Passokkorang* sehingga atas kesepakatan dari penguasa *Appe Banua kaiyang* lalu menyepakati I Manyambungi untuk dilantik sebagai *marad'ia* Balanipa. Meskipun tanpa persyaratan tertentu, tetapi yang pasti bahwa I Manyambungi adalah keturunan bangsawan dari wilayah Napo.

Meskipun belum ada aturan penetapan dan pengangkatan seorang *marad'ia* ketika itu, namun proses pelantikannya tetap dilakukan. Pelantikan itu dilakukan setelah Kerajaan Balanipa dibentuk terlebih dahulu. Proses pelantikannya dilakukan oleh Puang Dipoyosang yang sebelumnya telah menjabat sebagai ketua kaum adat *Appe Banua Kaiyang*. Jabatan itu kemudian berubah men-

jadi *Papuangan Limboro* artinya Puang dari daerah Limboro yang bergelar Puang Limboro. Jabatan itu tetap eksis hingga memasuki tahun 1959 dan sebutannya tetap ketua kaum adat *Appe Banua Kaiyang* (Rahman, 1987:5). Pelantikan yang terjadi sebelum perubahan itu, merupakan awal munculnya ikatan kekerabatan dalam sistem politik Kerajaan Balanipa. Saat pelantikan seorang *mara'dia*, acara itu memperlihatkan suatu kesetiaan dari seorang *mara'dia* kepada kaum *ada'* yang dipimpin oleh Puang Dipoyosang mewakili rakyat.

Ketika telah disepakati kaum *ada'* untuk mengangkat I Manyambungi sebagai *mara'dia* Balanipa yang pertama, proses pelantikan segera dilakukan. Sebelum pelantikan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan ikrar kesepakatan antara calon *mara'dia* dengan Puang Dipoyosang atas nama rakyat. Kalau disimak isi dari ikrar tersebut bahwa *mara'dia* hanya merupakan perpanjangan tangan dari kaum *ada'* yang bertindak atas nama rakyat. Hal tersebut terlihat dengan jelas adanya istilah yang menyatakan bahwa anggota dari *Appe Banua Kaiyang* disebut sebagai *ammanai mara'dia* (ayah daripada *mara'dia*), dan *mara'dia* adalah *ama-indonai pa'banua* atau orang tuanya rakyat (Rahman, 1987:5).

Mara'dia yang akan dilantik bersama istrinya, harus menginjakkan kakinya di atas kepala kerbau yang telah disembeli diletakkan di atas sebuah alas antik (*kappara*). *Mara'dia* dan Puang Dipoyosang memegang tiang payung kebesaran Kerajaan Balanipa dengan mengucapkan janji sebagai berikut:

1. *Mara'dia* berkata: *malewu parri'di mo'o* (apakah anda sudah sepakat semua). Puang Limboro menjawab: *malewu paqrr'i di mang* (kami telah sepakat semua).
2. *Mara'dia* berkata: *jari lappar lapparu mo'o* (seluruh daratan aku lah yang punya). Puang Limboro menjawab: *odiada odibiasa*

(benar asalkan hal tersebut sudah sesuai dengan adat dan kebiasaan).

3. *Mara'dia* berkata: *buttu buttu'u mo'o* (apakah semua gunung akulah yang punya). Puang Limboro menjawab *odiada' odibiasa* benar asalkan sudah sesuai dengan adat dan kebiasaan.
4. *Mara'dia* berkata: *sasi sasi'u mo'o* (apakah laut aku yang punya). Puang Limboro menjawab: *odiada odibiasa sasi sasi'u mo'o* (benar, asalkan sesuai dengan adat dan kebiasaan).
5. *Mara'dia* berkata: *tau tau'u mo'o* (apakah semua rakyat aku yang punya). Puang Dipoyosang menjawab: Benar, asalkan sesuai dengan adat dan kebiasaan.
6. *Mara'dia* berkata: *iri'ma na dau aju mo'o* (saya angin dan kamu daun kayu). Berkata Puang Dipoyosang: *Odiada odibiasa*. Benar, asal sesuai dengan adat dan kebiasaan.
7. *Mara'dia* berkata: *rarumma nabuttang mo'o* (saya jarum dan engkau semua adalah benang). Puang Dipoyosang menjawab: *odoada odibiasa*. Benar, asalkan sesuai dengan adat dan kebiasaan (Akhmad dalam; Rahman, 1987:6-7; Amir, 2011: 55-56).

Setelah ikrar itu diucapkan oleh I Manyambungi dan dijawab oleh Puang Dipoyosang, maka secara resmi beliau telah menjabat sebagai *mara'dia* Balanipa yang pertama. Dalam perjalanan waktu sejarah Kerajaan Balanipa, ikrar tersebut selalu diucapkan setiap terjadi pergantian pimpinan yang baru. Sepanjang sejarah, ikrar ini tidak pernah mengalami perubahan atau dirubah oleh pejabat *mara'dia* yang baru dilantik. Ini menandakan bahwa aturan itu telah diakui keberadaannya, meskipun kerajaan sering mengalami pergantian pimpinan puncak. Dan hal ini menandakan bahwa masyarakat Balanipa menghargai dan menghormati jasa para leluhur mereka.

Pada perkembangan berikutnya, terutama pada akhir masa jabatan I Manyambungi ditambah dengan beberapa aturan pendukung tentang persoalan pengangkatan seorang *mara'dia* di Kerajaan Balanipa. Seorang calon pemimpin atau *mara'dia* di Balanipa, yang pasti haruslah berasal dari golongan bangsawan *mara'dia* dan bukan dari bangsawan golongan kaum *ada'* atau pemangku adat, sebab justru merekalah yang berwenang melantik *mara'dia* jika terjadi pergantian pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengangkat seorang *mara'dia*, lembaga adat mempunyai aturan dan persyaratan yang harus dipatuhi dan dimiliki oleh seorang calon *mara'dia* atau pemimpin. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah:

1. Calon *mara'dia* harus beragama Islam dan taat serta tekun dalam menjalankan syariatnya. Persyaratan ini muncul setelah agama Islam resmi diterima di Kerajaan Balanipa pada masa pemerintahan Daetta Kakanna I Pattang.
2. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dan terpuji.
3. Calon *mara'dia* harus memiliki pengetahuan yang luas.
4. Calon *mara'dia* tidak memperlihatkan ambisius.
5. Calon *mara'dia* harus memiliki kemampuan untuk membenahi dan memelihara keutuhan, keselamatan dan ketentraman daerah yang dipimpinnya.
6. Calon *mara'dia* harus memiliki komitmen untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi (Mandra, 2010: 15).

Keenam persyaratan tersebut di dalam Bahasa Mandarnya disebutkan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin atau *mara'dia* di Mandar adalah "*Naharangangi ada' ma'akkemara'dia moa' tania Tosallang siola pa'agamana, tomacoa ampe-ampena, toma'appunnai anarangan, i'dai tallalo melo' niakke', i'dai toi ta'lalo,*

i'dai maelo niakke". Kalau kita mencermati maksud dari persyaratan tersebut, dapat dipahami bahwa budaya Mandar menghendaki sosok pemimpin yang memiliki idealisme kerakyatan, memiliki moral yang tangguh serta rasa optimisme yang kuat untuk mencapai seluruh cita-cita kerakyatan. Lebih dari itu, keahlian dan pengetahuan yang digunakan dalam pekerjaannya wajib dimiliki, terutama ilmu agama sebagai basis utamanya agar berorientasi pada iman dan taqwa sehingga keberanian, ketaqwaan dan kebijaksanaannya selalu terpagar dalam *amar ma'ruf nahimunkar* (Mandra, 2010:16).

Selain enam persyaratan tersebut, ada persyaratan lain bagi calon *mara'dia* di Balanipa yang dikeluarkan oleh *mara'dia* Balanipa yang pertama, yaitu I Manyambungi. Persyaratan itu menjadi pedoman bagi seorang calon *mara'dia* yang ditetapkan sebelum yang bersangkutan mangkat. Persyaratan itu adalah:

"Madondong duang bongi anna matea', da mupajari mara'dia, mau ana'u, mau appo'u, mua' tania to nama assayangngi lita', mua' masuangi pulu-pulunna, mato'dori kedo-kedona, apa iy-amo tu'u ditingo, namarruppu-ruppu' lita".

(Besok lusa bila saya telah meninggal, janganlah engkau mengangkat seorang raja, kendatipun anakku atau cucuku, kalau bukan orang yang akan menyayangi negara, kalau tutur katanya tidak senonoh, kalau tingkalakunya kaku dan kasar, sebab orang seperti itulah yang akan menghancurkan negara) (Kila, 2013:81).

Kalau dicermati makna yang terkandung dari pedoman yang dikeluarkan oleh I Manyambungi itu, nampak bahwa kerajaan-kerajaan di Mandar adalah suatu kerajaan yang tidak legitarian, ia dipilih oleh anggota adat yang mewakili rakyat dan tidak serta merta harus putra raja yang berkuasa. Tetapi siapa saja, yang penting memenuhi persyaratan tersebut dan berasal dari golongan bangsawan murni.

Kriteria dan persyaratan pengangkatan seorang calon raja itu, kemudian dipertegas lagi pada masa pemerintahan *mará'dia* Balanipa ke-4, yaitu Daetta Kakanna I Pattang, yang berbunyi:

"Naiya mará'dia tammatingdoi di bongi, tarrarei di allo, namandandang mata; dimamatannai daung ayu, amalimbongannai rura, diamadingianna lita', diajarianna banne tau, diatepuanna agama"(bodi dan Ulfiani Rahman, 2006:28).

Artinya: Seorang raja, tidak boleh tidur nyenyak di waktu malam, tidak boleh berdiam diri di waktu siang, tetapi harus senantiasa memperhatikan: hijau suburnya daun kayu, dalam dangkalnya tebat, aman tentramnya negara, berkembangbiaknya manusia, dan kemantapan kehidupan beragama.

Melihat persyaratan untuk pengangkatan seorang *mará'dia*, termasuk pemangku adat di Mandar, diwajibkan mencari seorang calon pemimpin dari orang Mandar sendiri. Hal ini tentu saja harus sesuai dengan pedoman pengangkatannya yang telah ditentukan sebelum beliau memangku jabatan. Nanti tidak ada calon dalam negeri, barulah mencari figur lain di luar internal kerajaan. Kejadian seperti ini sangat jarang terjadi sepanjang sejarah daerah ini, mungkin yang terjadi adalah keturunan langsung dari salah seorang bangsawan murni yang tinggal di luar wilayah administrasi kerajaan yang bersangkutan.

Kalau semua persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan adat, calon *mará'dia* diberitahukan kepadanya bahwa beliau telah terpilih menjadi *calon mará'dia*. Setelah itu, anggota dewan adat menyampaikan kepada calon *mará'dia* terpilih dengan kata-kata seperti berikut: "*Ita'mo tu'u daeng nama'assayangi tau maranni* atau *Ita' mo tu'u Daeng nanapettullunggi tau maranni*". Artinya "Tuanlah

yang terpilih sebagai calon *mara'dia* untuk menjadi pemimpin dan pengayon orang banyak". Setelah mendengar perkataan Dewan Adat, calon raja atau *mara'dia* lalu menjawab: " *Nana uwami tu'u, mua paelonamo se-lpuang siola Appe Banua Kaiyang*". Artinya "Demikianlah, akan dilaksanakan jika itu sudah menjadi kehendak dari Dewan Adat dan *Appe Banua Kaiyang*. Kata-kata penyampaian dan penerimaan tersebut, menandakan bahwa calon *mara'dia* tersebut bersedia untuk dijadikan sebagai pemimpin. Selanjutnya akan dilantik sesuai dengan aturan adat yang sudah digariskan.

PEMBERHENTIAN MARA'DIA

Ada beberapa jenis perkara sehingga terjadi pergantian seorang raja, yaitu sebab mangkat, dan karena tidak bisa menjalankan amanah dewan adat sebagai wakil rakyat. Selain itu, juga dikaitkan dengan alasan alam sekitar atau lingkungannya. Dari ketiga permasalahan tersebut, terbanyak penggantian seorang *mara'dia* sebab yang bersangkutan wafat dalam berbagai sebab. Namun ada juga yang digantikan atau diturunkan dari tahtanya sebab yang bersangkutan melanggar aturan adat yang berlaku selama menjabat sebagai *mara'dia*. Ketika ia dalam menjalankan tugasnya ia telah berbuat sewenang-wenang meski sudah diperingatkan oleh Dewan Adat Kerajaan, tetapi karena tidak dihiraukan peringatan tersebut sehingga akhirnya ia dipecat.

Ada keunikan tersendiri bagi Kerajaan Balanipa, yaitu meskipun seorang *mara'dia* pernah dipecat dari kedudukannya sebagai *mara'dia* tetapi pada kesempatan lain yang bersangkutan masih dapat dicalonkan kembali menduduki jabatan sebagai *mara'dia*. Sepanjang perjalanan panjang Kerajaan Balanipa, dewan adat telah melakukan beberapa kali pemecatan terhadap seorang *mara'dia*. Pemecatan-pemecatan tersebut, dilakukan terhadap 13 orang

mara'dia dengan berbagai alasan pelanggaran adat. Namun dari semua *mara'dia* yang dipecat tersebut, sebelum dewan adat mengambil keputusan terakhir, biasanya *mara'dia* tersebut masih diberikan nasehat agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri. Tetapi pada umumnya, *mara'dia* yang dinasehati sulit untuk merubah diri sebab merasa telah berkuasa sehingga menganggap dirinya memiliki kekuatan yang tak mungkin untuk dilawan.

Dari sejumlah *mara'dia* yang dipecat oleh dewan adat kerajaan, ada di antaranya yang tiga kali dilantik menjadi *mara'dia*, tapi dua kali pecat yaitu *mara'dia* Balanipa ke-45, 47, dan 49 yang bernama Tomelloli atau I Mannawari. Pemecatannya yang pertama dilakukan ketika ia menjabat sebagai *mara'dia* ke-45 (Amir, 2011:89). Alasan pemecatannya sebab yang bersangkutan memerangi sesamanya *mara'dia* dari anggota Persekutuan Pitu Babana Binanga. Apa yang dilakukan itu dianggap telah melanggar aturan persekutuan sehingga dikhawatirkan akan merusak nilai-nilai adat yang ditanamkan oleh pendahulunya. Ketika dipecat, ia digantikan oleh sepupunya yang diperangnya tersebut. Tetapi ketika Tokape turun tahta, maka I Mannawari kembali menduduki tahta Kerajaan Balanipa atas bantuan Belanda (gubernamen).

Mara'dia lainnya yang dipecat oleh dewan adat kerajaan adalah; Tomatindo di Burio (*mara'dia* Balanipa) ke-7, Tomatindo di Buttu (*mara'dia* Balanipa ke-10), Tomatindo di Langgana (*mara'dia* Balanipa ke-11, 13, dan 17), Tomatindo di Lakkading (*mara'dia* Balanipa ke-16), Tomatindo di Barugana (*mara'dia* Balanipa ke-18, dan 21), Tomatindo di Pattinna (*mara'dia* Balanipa ke-20, 22, dan 24), Tomappelei Musus'na (*mara'dia* Balanipa ke-26), Tomessu di Kotana (*mara'dia* Balanipa ke-27), Tomatindo di Lanrisang (*mara'dia* Balanipa ke-31), Tomatindo di Marica (*mara'dia* Balanipa ke-38, dan 41), I Mannawari atau Tomelloli (*mara'dia* Balanipa ke-45, 47, dan 49). Se-

lain itu, ada pula *mara'dia* Balanipa yang dibunuh sebab dianggap telah melanggar aturan adat dan tidak mau mendengar nasehat dan peringatan dari dewan adat kerajaan. Mereka itu adalah Todijallo *mara'dia* Balanipa ke-3, Todigajang *mara'dia* Balanipa ke-5, dan Todipolong *mara'dia* Balanipa ke-12 (Syah,1991:69-91 dan Syah,1992: 100-105).

Mara'dia atau raja tersebut dipecat oleh dewan adat *kaiyang* atau adat besar kerajaan sebab dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan adat yang ditetapkan oleh I Manyambungi. Mereka yang disebutkan itu dipecat dengan berbagai pelanggaran adat, namun pada kesempatan lain yang bersangkutan masih juga dicalonkan oleh dewan adat untuk menduduki jabatan *mara'dia* pada periode berikutnya. Pada umumnya raja pada kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan, setelah dipecat atau diturunkan dari tahtanya sangat mustahil untuk dicalonkan untuk kedua kalinya, apalagi untuk ketiga kalinya sebab dianggap cacat. Inilah tradisi unik di Kerajaan Balanipa yang sangat sulit ditemukan pada kerajaan lainnya.

Kalau dicermati hal tersebut, itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kedudukan dewan *ada' kaiyang* sangat menentukan atau kuat dalam penentuan dan pengangkatan seorang calon *mara'dia* di Kerajaan Balanipa. Dengan kondisi seperti itu, sehingga sering kali terjadi konflik kelembagaan politik antara Dewan *Ada' Kaiyang* dengan kedudukan *mara'dia*. Kondisi itu dapat dibuktikan dengan banyaknya *mara'dia* yang dipecat dari kedudukannya sebab dianggap melanggar adat dan kebiasaan yang telah berlaku secara turun temurun. Kondisi itu memungkinkan terjadi sebab *mara'dia* ditunjuk untuk dicalonkan menjadi *mara'dia* oleh Dewan *Ada' Kaiyang* yang kemudian dilantik oleh Puang Limboro atas nama rakyat. Itulah sebabnya sehingga sepanjang sejarahnya, seorang *mara'dia*

di Kerajaan Balanipa, Mandar tidak pernah memecat anggota *Dewan Ada' Kaiyang* ataupun *Dewan Ada' Sappulo Sokko*. Kalaupun itu terjadi, maka harus seizin *Dewan Ada' Kaiyang* atau anggota *Dewan Ada' Sappulo Sokko* atau pemangku-pemangku adat lainnya yang mempunyai hak pilih bagi anggota adat yang dimaksud (Saharuddin, 1985:6).

Dari sekian banyak *mara'dia* yang diberhentikan oleh dewan adat besar kerajaan, terbanyak kasusnya sebab melanggar aturan adat yang telah ditetapkan dan berlaku di dalam kerajaan. Sementara mereka yang dipecat atau diberhentikan sebab persoalan lain atau yang menyangkut lingkungan alam sekitarnya, untuk sementara waktu tidak ditemukan. Dalam pandangan pemerintahan tradisional Mandar, alam sekitar mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan seorang *mara'dia* dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebaliknya dapat pula menyebabkan keruntuhannya jika alam sudah tidak bersahabat lagi. Hal itu dapat dicermati dalam falsafah orang Mandar seperti berikut:

"Moa' tattisambami lembong, tammappadendangmi pelungan, tammattutturumi manu', tammebura'mi mera', tammedaummi ayu pangale, malanemi buttu, la'ammi lita', amalasuummi dui-dui, bullemi bvandangang, pajiri' pasatippo', patili salu-salu anna' muambei abiasang diassime mangang odiada' odibiasa".

Terjemahannya:

Manakala ombak tidak lagi memecah ke pantai, lesung tidak lagi berdendang, ayam sudah tidak berkokok lagi, pinang sudah tidak berbunga, pepohonan hutan belantara tidak berdaun lagi, gunung-gunbung pada gundul, tanah sudah lekang, rerumputan sudah pada layu, pikullah tombak pusaka. Selipkan keris pusakan di pinggang, miringkan destar (ikat kepala) ke kiri, kemudian lakukanlah adat kebi-

asaan leluhur, sesuai hukum dan kebiasaan tradisi (Mandra, 1987:5-6).

Kandungan makna yang tersirat dalam pandangan tersebut, sangat luas maknanya. Bilamana kondisi-kondisi seperti itu terjadi di dalam masyarakat, maka lembaga adat sebagai pemegang hak dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *mara'dia* atau raja, harus segera mengambil sikap demi keselamatan rakyat dan kerajaan atau negara. Meskipun demikian, setelah dilakukan penelusuran pada berbagai sumber-sumber lokal atau kajian-kajian yang telah dilakukan terdahulu, namun tidak ditemukan adanya kasus pemecatan seorang *mara'dia* yang berkaitan dengan alam lingkungan, kecuali sebab pelanggaran adat kebiasaan yang telah digariskan.

HUBUNGAN PEJABAT DENGAN MASYARAKAT

Pada uraian-uraian terdahulu, nampak dengan jelas bahwa hubungan antara *mara'dia* sebagai penguasa dan dewan adat sebagai pembuat aturan adat, harus menjaga adanya hubungan kekuatan fungsional yang proporsional dalam budaya politik kerajaan. Hubungan yang dimaksud itu, sudah mulai dipraktekkan sejak masa pemerintahan *mara'dia* pertama yaitu I Manyambungi. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya, praktek itu dengan sangat ketat diwujudkan antara *mara'dia* dan Dewan Adat kerajaan pada masa pemerintahan *mara'dia* Balanipa ke-2, yaitu Tomepayung. Kekuasaan yang proporsional yang dicanangkan oleh Tomepayung itu, tidak memungkinkan bagi seorang *mara'dia* untuk melakukan tindakan sewenang-wenang ketika ia berkuasa.

Dalam bidang politik, kekuasaan adalah kekuatan, oleh sebab itu keduanya harus terdapat pemisah yang kokoh yaitu perlu diim-

bangi dengan kekuatan lain yaitu kepemilikan. Pada seorang raja atau *mara'dia*, tak boleh terhimpun dua jenis kekuatan itu, sebab bila hal itu terjadi maka keseimbangan akan hilang dan kehancuran pasti akan datang. Bilamana kekuatan dalam suatu kerajaan berada di tangan sang penguasa maka difilosopiskan dengan "*Mua sambala'nu tallo'i litha' ruppu'i*", artinya apabila kekuatan dalam satu negara terhimpun dalam satu tangan, ibarat telur tertimbun dalam satu keranjang tanpa batas (Hamzah, 1987:6).

Dapat dibayangkan jika telur-telur ditumpuk dalam sebuah kerajaan tanpa pengalas atau pemisah antara satu dengan yang lainnya, diyakini akan mengakibatkan telur-telur menjadi pecah. Oleh sebab itulah maka keseimbangan kekuatan antara raja (penguasa) dengan Dewan Adat harus selalu dijaga. Kalau suatu kekuatan telah berada di tangan raja yang berkuasa, maka kepemilikan kekuasaan yang berupa kepemilikan jangan diserahkan sepenuhnya. Berangkat dari pernyataan itulah sehingga di Mandar secara umum telah menggariskan kaidah politik yang menyatakan bahwa: "*Anak kodai mara'dia, Banua Kaiyang toi lopi*". Artinya bahwa ibarat perahu dalam suatu kerajaan, raja *Imara'dia* hanya sebagai nahkoda, sedang pemilik perahu adalah rakyat melalui wakil-wakilnya (*banua kaiyang*) (Hamzah, 1987:7).

Budaya politik Kerajaan Balanipa bersumber dari budaya *sipamandar*, yakni fungsional proposional, yakni memperhatikan adanya pengelompokan dan pengaturan peranan-peranan yang saling berintegrasi dalam kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Mandar. Raja adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang tertinggi dibantu oleh *mara'dia matoa*, *mara'dia malolo* dan anggota adat. Akan tetapi *Banua Kaiyang* yang terdiri dari Napo, Samasundu, Mosso dan Todangtodang yang dibantu oleh 12 *banua*, sebagai perwakilan seluruh rakyat. Mereka itu adalah pemegang kekuasaan yang berfungsi

sebagai pengawas yang berhak mengangkat dan memberhentikan atau menurunkan *mara'dia*. Ketetapan dan kesepakatan *banua kai-yang* bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat seperti yang telah dirumuskan dalam hukum adat.

Pengertian kesepakatan yang tak dapat diganggu gugat ini adalah menyangkut keputusan untuk mengangkat dan menurunkan seorang *mara'dia* dari tahtanya karena melakukan pelanggaran yang bersifat prinsipil. Prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi acuan kebijaksanaan *mara'dia* termuat atau dituangkan dalam statemen politik antara I Manyambungi dan *Papuangan* Napo atau *puang* Dirano yang juga merangkap sebagai pimpinan *banua kai-yang* yang berbunyi: "*Upaiyango'o, mupakaraya, madondong duang bungi anna marrattaso'o wake', marruppu-ruppu batu, uwalai mem-bali akaiyangan'*. Artinya; Kami rakyat akan selalu menjunjung tinggi kebesaran dan kekuasaan tuan (*mara'dia*). Namun selayaknya tuan juga harus selalu menghargai hak dan peran kami. Besok lusa atau suatu ketika tuan berlaku tidak senonoh dan berbuat sesuatu yang menjadikan suatu kerusakan dan kehancuran negeri, maka kekuasaan dan kebesaran dan mahkota saya akan tarik kembali (Saharuddin, 1985:12).

Budaya politik seperti yang digambarkan itu kelihatan bahwa sebenarnya kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan *mara'dia* dan kalau diperhatikan hal itu, tampaknya bukan hanya berlaku di kerajaan-kerajaan wilayah Mandar, tetapi secara umum berlaku untuk seluruh Sulawesi Selatan ketika itu. Bukan hanya itu, hubungan raja atau *mara'dia* terlihat dalam hal persoalan kehidupan ekonomi rakyat atau budaya ekonomi. Dalam hubungan itu, pendaaygunaan faktor ekonomi utama yaitu tanah, tidak dibenarkan berada dalam tangan raja. I Manyambungi telah menggariskan prinsip-prinsip dasar budaya ekonomi rakyat sebagai berikut; *Naiya lita'*

akkatuoannaipa'banua, artinya tanah negara adalah berfungsi sebagai sumber penghidupan utama rakyat banyak (Hamsah,1987:8).

Hubungan antara *mara'dia* dengan dewan adat dapat dilihat dari beberapa segi, pertama ketika anggota dewan adat berfungsi sebagai dewan *Ada'Sappulo Sokko*. Pada posisi itu ia berperan sebagai pejabat tinggi kerajaan yang membantu *mara'dia* dalam menjalankan roda pemerintahan dan berkedudukan di pusat pemerintahan kerajaan, ia menjadi bawahan *mara'dia*. Tetapi bila ia berada pada posisi sebagai pembuat peraturan atau undang-undang, posisinya setara dengan *mara'dia*. Hubungannya dengan *mara'dia* yaitu undang-undang atau aturan yang telah dibuat oleh *Dewan Ada'Sappulo Sokko* diserahkan kembali kepada *mara'dia* untuk dilaksanakan atau diterapkan. Pelaksanaannya tentu saja dilakukan kembali oleh *Dewan Ada'Sappulo Sokko* sendiri ketika ia berada pada posisi sebagai pembantu *mara'dia*. Selain itu, hubungan dengan pejabat lain adalah menerima usulan dari *Dewan Adat Kaiyang* atau adat besar dalam hal usulan untuk pengangkatan atau pemecatan seorang *mara'dia*. Usulan-usulan itu ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang telah dibuat sebelumnya yang disebut *adat mappura onro* (Kila, 2013:110).

Selain itu, hubungan antara *mara'dia* dengan *Adat Sappulo Sokko* adalah sebagai pembantu *mara'dia* yang menyangkut tentang perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. Misalnya ada persoalan yang ingin dirundingkan dengan adat, terlebih dahulu harus dimusyawarakkan dengan dewan adat, misalnya *mara'dia* ingin melaksanakan pesta sunatan atau perkawinan. Hal-hal yang menjadi bagian dari pelaksanaan itu dipersiapkan oleh *Dewan Adat Sappulo Sokko* yang tentu saja melibatkan tenaga dan pemikiran dari masyarakat melalui tokoh-tokohnya. Pelaksanaan acara yang dimaksud, bila membutuhkan tenaga yang besar sehingga masya-

rakat harus dilibatkan langsung secara gotong royong.

Hubungan antara pejabat kerajaan, *mara'dia*, dewan *Ada' Kaiyang* dan dewan Adat *Sappulo Sokko* dengan masyarakat tidak terjadi secara langsung. Tetapi hubungan itu dapat terjadi secara langsung bilamana kedua dewan itu berada dalam posisi sebagai pemerintah wilayah bagian kerajaan. Misalnya anggota Dewan Adat *Kaiyang* posisinya sebagai pemimpin wilayah pada wilayahnya sendiri, itupun hanya sebatas pada suatu pertemuan tertentu yang melibatkan rakyat. Pada pertemuan itulah tempatnya rakyat menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya aspirasi-aspirasi yang berkembang itu diteruskan pada pejabat yang lebih tinggi yaitu *Dewan Adat Sappulo Sokko* untuk dibahas.

Hasil pertemuan dari anggota dewan adat tersebut, jika berupa peraturan lalu diteruskan kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan atau diterapkan. Penerapan itu dilaksanakan kembali oleh *Dewan Adat Sappulo Sokko* dalam kapasitasnya sebagai pembantu *mara'dia* yang berkedudukan di pusat pemerintahan. Kalau dicermati hubungan itu, tampaknya bagaikan lingkaran setan sebab yang membuat aturan itu adalah anggota *Dewan Adat Sappulo Sokko* dan ia pula yang melaksanakan aturan itu, tetapi dalam posisinya sebagai pembantu *mara'dia*.

Begitu juga hubungan antara *mara'dia* dengan Dewan Adat *Kaiyang* yang anggota-anggotanya adalah penguasa wilayah *Appe Banua Kaiyang* yang merupakan wilayah inti Kerajaan Balanipa. Dewan ini diketuai oleh *Pappuangan Limboro* dan wakilnya adalah *Papuangang Biringlembang*. Kedua orang ini adalah merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas ketika terjadi pergantian dan pelantikan seorang *mara'dia*. Hubungan kerja ini adalah merupakan tugas khusus yang dijalankan oleh *Papuangan Limboro* untuk me-

lakukan *assitalliang* (janji) terhadap calon *mara'dia* yang akan dilantik yang telah diajukan oleh *penguasa wilayah Appe Banua Kaiyang*. Sebelum *assitalliang* itu dilaksanakan, rakyat secara gotong royong membuat sebuah *baruga* sebagai tempat upacara pelantikan.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa, dewan *Ada' Kaiyang* ditempatkan pada bagian tertinggi dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa. Hubungan lembaga *Appe Banua Kaiyang* (*adat kaiyang* atau adat besar) dalam sistem pemerintahan bilamana ia berada pada posisi pemimpin pada wilayah kekuasaan mereka masing-masing, kedudukannya berada di bawah posisi *mara'dia*. Dengan demikian, hubungan kerja antara keduanya adalah merupakan pelaksana pemerintahan di tingkat wilayah yang bertanggungjawab kepada *mara'dia*. Selain itu, ia juga merupakan pengawas terhadap jalannya roda pemerintahan, terutama jika ia berfungsi sebagai anggota *Dewan Adat Kaiyang*. Jalur pertanggungjawabannya adalah kepada *mara'dia* melalui *Dewan Adat Sappulo Sokko* (terutama melalui *Pappuangang Limboro, Biringlembang, Pabbicara Kaiyang* dan *Pabbicara Kenje* selaku pendamping *mara'dia*, selanjutnya berjenjang hingga kepada *mara'dia*.

Itulah sebabnya anggota dewan pemangku *Ada' Kaiyang* dan *Ada' Sappulo Sokko*, berfungsi ganda dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa. Pada satu sisi ia merupakan pembantu *mara'dia* dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga sebagian di antaranya tetap menjadi pemimpin *banua* pada masing-masing wilayah kekuasaannya. Mereka merupakan penghubung antara *mara'dia* dan rakyat dalam hal menyampaikan kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak. Mereka berkumpul untuk melakukan sidang-sidang kerajaan atau mereka dipanggil khusus untuk menyampaikan sesuatu usul kepada *mara'dia* melalui *mara'dia matoa* atau wakil *mara'dia* (Amir, 2011: 93). Selain itu, beberapa anggota dewan pe-

mangku Adat *Sappulo Sokko* juga mempunyai hubungan tugas dalam urusan penerimaan tamu-tamu kerajaan sebelum diperhadapkan kepada *mara'dia*. Mereka itu adalah *Papuangan* Limboro yang menerima tamu dari arah Utara atau Pitu Ulunna Salu, *Papuangan* Biring Lembang untuk tamu dari arah Selatan atau dari arah laut, *Pabbicara Kaiyang* untuk tamu dari arah Barat atau dari Kerajaan Banggae, Pamboang, dan Sendana, *Pabbicara Kenje* untuk tamu dari arah Timur atau dari Kerajaan Binuang. Keempat orang itulah yang merupakan inti dari *Dewan Adat Sappulo Sokko*.

Hubungan antara *mara'dia* dengan pemangku adat kerajaan dapat dilihat pada salah satu aturan yang menjadi acuan, yaitu; "*Andianggi mala sisara' ulu anna salakka*", Artinya; tidak boleh berpisah kepala dengan kerangka badan. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatunya harus dirundingkan antara *mara'dia* dengan adat. Masing-masing pihak tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, akan tetapi harus musyawarah terlebih dahulu. Misalnya; sampai sekarang kondisi ini masih dapat disaksikan pada acara upacara perkawinan dari golongan bangsawan atau orang baik-baik. Itu masih biasa terjadi pada acara *pallatigiang* (pemberian daun pacar pada malam pacar) yang dilakukan oleh *mara'dia* dan para anggota adat atau keturunannya jika yang bersangkutan berhalangan hadir (Saharudin, 1987:3).

Urutan-urutan dalam acara *pallatigiang* itu disusun berdasarkan ketentuan adat, terutama setelah agama Islam telah dianut kerajaan. Tempat pertama adalah kadhi Balanipa, disusul oleh *mara'dia*, dan terakhir adalah anggota pemangku adat kerajaan. Rangkaian upacara perkawinan ini (*pallatigiang*) hanya boleh dilakukan oleh kaum bangsawan dari keturunan *mara'dia* dan bangsawan keturunan pemangku adat. Tetapi sekarang hal itu sudah menjadi kabur dan bergeser sebab masyarakat biasa juga telah melakukannya.

Bahkan kelompok bangsawan itu sendiri kadang tidak melakukan kegiatan itu, tetapi akhir-akhir ini mulai lagi dipraktekkan sebab perangkat kerajaan telah diaktifkan kembali mengikuti aturan-aturan adat yang pernah berlaku di Kerajaan Balanipa (Syam,1997:153-154).

Sementara itu, hubungan secara langsung antara masyarakat dengan pejabat tinggi kerajaan sangat jarang terjadi. Tapi yang sering terjadi adalah pejabat pada tingkat daerah atau wilayah, sebab memang merekalah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Kondisi ini sebenarnya hampir sama dengan kondisi sekarang yaitu rakyat sangat jarang berhubungan langsung dengan pejabat tinggi, kecuali pada momen-momen tertentu saja. Itulah sebabnya rakyat hanya dapat menyalurkan aspirasinya pada jalur yang telah ditentukan yaitu melalui lembaga yang mewakili mereka yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kalau jaman kerajaan melalui lembaga *Ada' Sappulo Sokko*, itupun ketika mereka berada dalam fungsinya sebagai anggota legislatif.

KONDISI KEKINIAN

Untuk memahami budaya politik pada tingkat lokal, maka perlu dipelajari untuk dipahami tentang periode reformasi. Sepanjang periode ini banyak sekali kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang terkait dengan lokalitas yang mewarnai masa awal periode ini. Masa ini ditandai dengan runtuhnya masa orde baru yang identik dengan rezim Soeharto. Sejak keruntuhan itu (Mei 1998), mengantar Indonesia menuju era baru yang kemudian dikenal dengan istilah reformasi. Sejak keruntuhan orde baru, angin kencang tentang reformasi mulai berhembus, tuntutan akan perubahan di segala bidang bergulir dan bergulir terus. Dinamika politik di daerah memasuki era baru, dimana pelaku dalam birokrasi pemerintahan

dan budaya lokal bermunculan untuk memulai peran baru di dalam politik lokal.

Era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era ini menuntut segalanya transparan dan demokrasi dalam proses politik yang kemudian ditunjang dengan lahirnya UU.No.22 Tahun 1999 yang tiga tahun kemudian UU itu diperbaharui dengan lahirnya UU. No.32 2004. Undang-undang tersebut telah mengubah pola lama menjadi hal yang lebih terbuka dan transparan dengan mengubah pola pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Sejak saat itu, pemilihan pemerintahan daerah, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh anggota DPRD seperti masa orde baru melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

Gerakan reformasi 1998 telah menciptakan suatu perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keterbukaan politik yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam berpolitik. Perubahan itu diiringi oleh perubahan yang fundamental sistem politik Indonesia yang memberi peluang yang signifikan untuk berpartisipasi dalam politik bagi elemen-elemen kekuatan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini menciptakan partisipasi sosial yang lebih bermakna dan relatif menciptakan akuntabilitas pemerintahan (Mattulada,2014:9).

Gerakan perubahan itu berlaku secara menyeluruh termasuk di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Seiring terjadinya perubahan waktu, terjadi pula perubahan budaya politik lokal di daerah ini. Perubahan itu setidaknya dapat dilihat dari konsep pemilihan calon pemimpin yang tidak lagi berpatokan pada konsep tradisional yang mengacu pada empat hal, yaitu :*bija* (keturunan); *amanarangang* (berilmu atau pintar), *abaraniang* (berani dan berjiwa pahlawan), *asugiang* (mempunyai kemampuan/kekayaan). Konsep itu sudah bergeser sangat jauh, yaitu dalam era reformasi semua orang da-

pat mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin sepanjang dapat memenuhi beberapa unsur persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu persyaratan wajib adalah; ada kenderaan politik yang menjadi pendukung (parpol) serta jumlah tertentu kursi yang duduk di DPR, dan juga dapat dilakukan melalui jalur independen dengan persyaratan tertentu. Sedangkan persyaratan asal usul keluarga tidak menjadi acuan utama, berbeda pada masa kerajaan dulu yang mensyaratkan seseorang calon pemimpin (*raja / mara'dia*) harus berasal dari keturunan *Tomanurung*.

Perbedaan menyolok itu juga menyebabkan semakin banyaknya orang atau calon pemimpin yang mendaftarkan diri untuk menjadi pejabat birokrasi pemerintahan sebab aturan untuk jabatan itu terbuka kepada siapa saja. Kondisi itu juga sangat rawan memunculkan pertikaian atau bentrok antar pendukung calon. Pada masa kerajaan, kondisi seperti itu sangat jarang terjadi atau sama sekali tidak pernah terjadi di kerajaan di Balanipa, Mandar. Itulah kelebihan aturan politik di zaman kerajaan dibandingkan pada masa reformasi. Calon pemimpin (*mara'dia*) pada masa kerajaan sangat terbatas orangnya sebab ada persyaratan khusus yang tidak dimiliki orang kebanyakan yaitu bangsawan murni. Sementara pada masa sekarang, persoalan itu tidak lagi menjadi penentu.

Kondisi itulah yang menyebabkan di masa kerajaan tidak pernah ada seorang *mara'dia* di wilayah Mandar yang dijabat oleh keturunan bukan bangsawan. Tetapi yang pernah terjadi adalah keturunan bukan bangsawan bukan bangsawan utama (*puang ressu atau ranuh*), pernah menjadi *mara'dia*. Mereka berasal dari salah satu tingkatan bangsawan; *puang sangnging* (murni), *puang talluparapa*, *puang sassigi* (setengah), *puang separapa'* (seperempat), *puang slessor* (kurang seperempat), *puang dipisupai anna sarombong*, naik sebagai pejabat *mara'dia*. Sejak era reformasi bergulir, golongan

bangsawan kembali naik daun dengan terpilihnya beberapa pejabat publik di Sulawesi Barat dari golongan ini. Sebut saja Kabupaten Polman yang merupakan sebagian besar wilayah administrasinya adalah bekas Kerajaan Balanipa yang pada tiga periode terakhir dipimpin oleh keturunan bangsawan. Bahkan periode terakhir (sekarang), bupatinya masih bersaudara dengan bupati sebelumnya yang telah menjabat dua periode.

Di Sulawesi Selatan yang mengenal konsep bahwa kelompok atau golongan orang biasa (kebanyakan) dapat menjadi orang atau pemimpin yang dihormati jika dia memiliki harta (*tosugi* Bugis, *asugiang* Mandar), kepandaian (*toacca* Bugis, *amanarangang* Mandar), keberanian (*towarani* Bugis, *abaraniang* Mandar). Di masa sekarang masih ada Bupati, Walikota atau jabatan-jabatan berjenjang ke bawah hingga Kepala Desa diduduki oleh keturunan bangsawan. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada juga yang dijabat oleh golongan orang biasa. Berbeda lagi ketika masa orde baru, pemimpin lebih banyak dipilih dari kalangan militer, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun desa (Zuhro, 2009:156). Konsep ini bukan hanya berlaku di Sulawesi Selatan, tetapi semua wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.

Kalau kita mencermati kondisi sekarang lalu membandingkannya dengan masa kerajaan, budaya politik yang dianut kedua masa yang berbeda itu tentu berbeda pula. Politik pada masa kerajaan lebih stabil sebab jarang terjadi sikut menyikut dalam soal posisi jabatan yang ada di dalam pemerintahan kerajaan. Hampir dapat dipastikan bahwa jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan kerajaan lebih banyak diatur oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu *mara'dia* dan dewan adat kerajaan. Meski demikian, penentuan itu dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa pandang orang. Pejabat pemerintahan pada masa kerajaan tentu sangat berbeda dengan

pejabat pemerintahan sekarang, terutama pada pucuk pimpinannya yaitu *mara'dia* dan presiden.

Perbedaan itu disebabkan oleh cara pandang masyarakat terhadap pemimpinnya yang juga sangat berpengaruh terhadap hubungan timbal balik antara keduanya. *Mara'dia* sebagai pemimpin tertinggi di Kerajaan Balanipa adalah dianggap sebagai titisan dewa atau wakil Tuhan di bumi. Anggapan masyarakat itu, sebab ia adalah keturunan bangsawan tinggi (*tomanurung*) yang diberi hak oleh masyarakat yang diwakili oleh *Appe Banua Kaaiyang* untuk memerintah secara turun temurun. Oleh sebab anggapan itulah sehingga segala perintah *mara'dia* dianggap sebagai suatu kewajiban tanpa pamrih. Kalau di Sulawesi Selatan pada masa kerajaan ada falsafah hidup masyarakat yang berbunyi "*Polo pang polo panni*", artinya kalau raja sudah merasa sakit, maka rakyat sudah harus mati.

Mencermati hal tersebut, mencerminkan betapa besar penghargaan masyarakat terhadap rajanya / *mara'dia*. Raja / *mara'dia* sebagai pemimpin masyarakat harus dihormati melebihi penghormatan masyarakat kepada siapapun di muka bumi ini. Kondisi itu menggambarkan bahwa tidak ada celah bagi masyarakat untuk menghujat atau melakukan aksi tidak percaya kepada pemimpinnya. Bertolak belakang dengan kondisi pemerintahan sekarang dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah penuh dengan hinaan dan hujatan. Apalagi jika hasil pemilihan itu tidak sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meski demikian, masih ada celah bagi calon untuk bermain-main demi terpilihnya menjadi pemenang untuk menduduki jabatan tersebut (baca bupati, wali kota, gubernur dan presiden).

Pemimpin yang dihasilkan dari model pemilihan terakhir itu, sangat jauh berbeda dengan model pemilihan raja atau *mara'dia*. Mo-

del sekarang juga sangat rawan terjadinya konflik antar pendukung calon demi memenangkan dukungannya. Itulah sebabnya sehingga pasca pemilihan pemimpin, terjadi pengkotakan dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya lalu menamakan dirinya sebagai oposisi dalam pemerintahan. Namun kenyataannya, kelompok yang kalah ini lebih banyak menjadi pengacau jalannya pemerintahan. Kedudukan pemimpin terpilih pun menjadi kurang kuat meskipun dipilih langsung, kecuali kalau jumlah dukungannya di atas 75 persen.

Kondisi terakhir itu menyebabkan hubungan pemerintah dengan masyarakat kurang berjalan normal, tergantung dari berhasil tidaknya pemimpin terpilih itu meng-aplikasikan program kampanye politiknya. Kalau janji politiknya sewaktu kampanye tidak terlaksana dengan baik, maka pendukungnya akan menagih janji itu jika tidak maka dapat dipastikan akan terjadi hambatan dalam pemerintahannya. Itulah bedanya hubungan pemerintah dengan masyarakat pada masa kerajaan yang tidak disertai pamrih, sedang pada masa sekarang hubungan itu lebih banyak disertai dengan pamrih atau kepentingan, baik pribadi maupun kepentingan kelompok.

Terkait dengan peran *Dewan Adat Kaiyang* dan *Dewan Adat Sappulo Sokko* pada masa kerajaan yang memegang peranan penting, kini tidak seperti itu lagi. Bahkan kedua lembaga adat ini, lama fakum atau tidur pulas dan baru terbangun ketika era reformasi mulai bergulir. Begitu keduanya terbangun, ia langsung tancap gas dengan melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak dari golongan bangsawan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membangkitkan kembali peran keduanya di dalam masyarakat. Memang kedua lembaga itu telah terbangun dari tidurnya, namun tugas dan perannya dalam pemerintahan modern sekarang ini tentu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya.

Kondisi itu menyebabkan lembaga tersebut, hanya berfungsi dan berperan di dalam masyarakat sebagai lembaga adat yang berperan sebagai lembaga pengawas pemerintah secara tidak resmi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kedua lembaga adat itu masih sangat dihormati. Lembaga itu terlihat berfungsi ketika ada kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya seremonial seperti; perkawinan, hataman Alqur'an yang biasa dirangkaikan dengan sunatan anak. Dalam acara seperti itu, tempat duduk *mara'dia* dan pemangku adatnya diatur sesuai dengan aturan kerajaan, sementara pejabat pemerintah duduk berdampingan sesuai dengan tingkatan eselon mereka.

Untuk mengukuhkan eksisnya kembali kedua lembaga adat tersebut, maka disusunlah sebuah konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan mewadahi lembaga tersebut. Sebagai pendukung legalitas lembaga itu, maka dibuatlah dalam bentuk akte Notaris yang bernomor enam tanggal 4 Mei 2000, yang diberi nama Lembaga Kerapatan Warga Istiadat Budaya Balanipa Mandar (LKWIB-BM). Dengan demikian maka lembaga tersebut sudah resmi dan harus mulai bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada masa kerajaan, yaitu *Ada' Mappura Onro*. Menurut Daud (2007: 70), mereka yang terpilih menjadi anggota Dewan *Ada' Sapulo Sokko* adalah:

1. *Pabbicara Kaiyang* : Drs. H.A. Rivaad Kesa
2. *Pabbicara Kenje* : Drs. H.Adnas Djalil
3. *Papuangan Limboro* : Muhammad Amin Daud
4. *Papuangan Biringlembang*:M. Dayang
5. *Papuangan Koyong* : Haji Ahmad Tabua
6. *Papuangan Lambe* : Kaljubi Kesa
7. *Papuangan Rui* : Drs. Abd. Haris
8. *Papuangan Lakka* : Haji Saipul Bahri

9. *Papuangan* Tenggelang : Haji Ahmad Hasan, BA.
10. *Papuangan* Luyo : Abd. Kadir Yusuf.

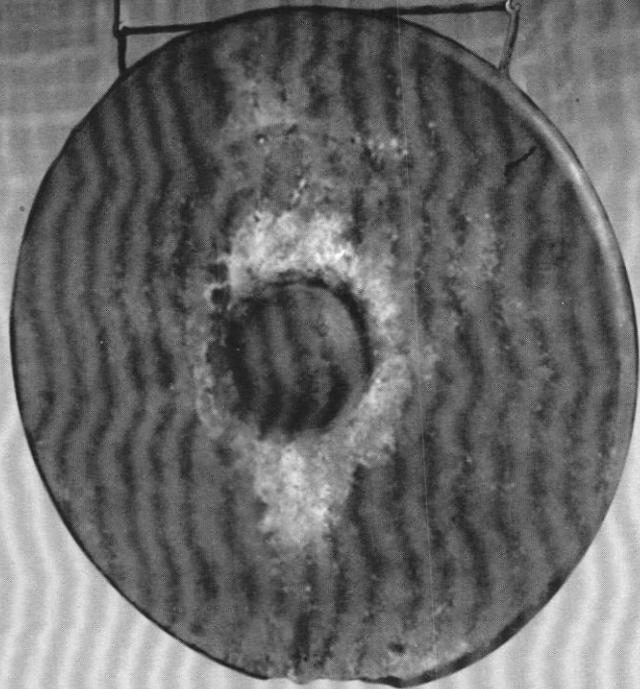
Kurang lebih tujuh tahun kemudian lembaga itu diperbarui keanggotaannya sebab ada di antaranya yang telah meninggal dunia, juga ada yang telah melakukan pelanggaran adat sehingga harus diganti.

Selain itu, tata aturan dan urutan para *mara'dia* di Pitu Babana Binanga dalam menghadiri suatu acara adat adalah mengikuti aturan yang disebut *ada' assimemangang* atau adat kebiasaan. Tata aturan itu hingga kini masih dipatuhi yang diatur seperti; turunan *mara'dia* Balanipa bersama keturunan kaum *ada'nya* mengikuti aturan Kerajaan Balanipa. Begitu juga bagi kerajaan-kerajaan anggota persekutuan Pitu Babana Binanga mengikuti aturan adatnya sendiri. Meski demikian, dari pengamatan yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, tampaknya untuk menghadirkan ketujuh anggota persekutuan tersebut dalam suatu acara adat sangat sulit sebab wilayah-wilayah mereka sangat berjauhan. Dikecualikan jika acara adat diselenggarakan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi.

Dewan Ada' Kaiyang yang anggota-anggotanya adalah para penguasa dari wilayah *Appe Banua Kaiyang* sendiri, yaitu Samasundu, Todangtodang, Mosso dan Napo. Dewan ini diketuai oleh *Puang* Limboro dan wakilnya adalah *Puang* Biringlembang, juga diaktifkan sebab dialah yang harus melantik *mara'dia* setelah ditetapkan sebagai calon atas pilihan dari *Appe Banua Kaiyang*. *Appe Banua Kaiyang* adalah merupakan empat wilayah pembentuk Kerajaan Balanipa yang juga disebut wilayah inti kerajaan yang mempunyai wilayah bawahan masing-masing empat buah yang berpemerintahan sendiri. Keempat wilayah inti ini, sekarang hanya merupakan wilayah kecil

dari wilayah administrasi Kabupaten Polman. Wilayah-wilayah yang dimaksud itu terletak pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Campalagian, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matakali dan Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar.

Kondisi itu memberikan gambaran bahwa pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kurang memberikan apresiasi terhadap sejarah daerahnya sendiri. Seharusnya wilayah-wilayah yang disebutkan tadi dijadikan wilayah ibu kota kecamatan atau kabupaten, tetapi nyatanya tidak demikian. Barangkali kenyataan itu juga yang menyebabkan sehingga tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan dari wilayah tersebut merasa dianaktirikan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga mereka mewacanakan untuk membentuk Kabupaten Balanipa sebagai mekaran dari Kabupaten Polewali Mandar. Wacana ini telah bergulir sejak beberapa tahun yang lalu dan telah diusulkan ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum terealisasi. Apakah usulan itu akan terpenuhi atau hanya tinggal harapan, tergantung kemauan dan lobi-lobi politik dari pemerintah pengusul yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.



BAGIAN IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Budaya politik Kerajaan Balanipa dapat ditelusuri mulai dari kepemimpinan *Tomakaka* yang pada awalnya diharapkan dapat menjamin ketentraman dan mengayomi masyarakat secara konsekuen dan berkesinambungan, namun dalam perkembangannya tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah *Tomakaka* yang ada di wilayah ini justru ternyata berbuat sewenang-wenang dan berambisi untuk menguasai sesamanya *Tomakaka*. Hal ini kemudian menimbulkan pertentangan dan konflik antara mereka. Akibatnya menimbulkan ketidaktenteraman dalam kehidupan masyarakat. Kondisi itulah yang menyebabkan sehingga empat orang *Tomakaka* mempersatukan diri dalam satu ikatan kebersamaan yang dikenal dengan nama *Appe Banua Kaiyang*.

Terbentuknya persekutuan dari *Tomakaka* Napo, Samasundu, Todangtodang dan Mosso diharapkan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi akibat perbuatan *Tomaka-*

ka lainnya itu, tampaknya tidak dapat diatasi. Oleh sebab itu, *Appe Banua Kaiyang* mencari pigur pemimpin yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Pencarian lalu tertuju kepada I Manyambungi yang sedang berada di Gowa yang dianggap cakap dan mampu untuk mengatasi kemelut yang melanda wilayah-wilayah *Appe Banua Kaiyang*. Persoalan muncul sebab tokoh yang dimaksud tersebut berada di Kerajaan Gowa. Itulah sebabnya, mereka juga harus menjalin hubungan dengan kerajaan tersebut, suatu kerajaan yang telah membangun hegemoni kekuasaan di jazirah selatan Sulawesi sejak awal abad ke-16.

Untuk merealisasikan maksud tersebut, akhirnya *Appe Banua Kaiyang* mengirim utusan untuk menjemput I Manyambungi agar dapat dikembalikan ke Mandar. Ternyata raja Gowa tidak keberatan atas permintaan Mandar kalau I Manyambungi kembali ke daerah asalnya. Atas penghargaan raja Gowa kepada I Manyambungi, maka ia dibekali beberapa buah benda-benda pusaka sebagai tanda keakraban antara kedua pihak. Pada waktu kembali ke negerinya, ia lalu memerangi para *Tomakaka* yang selalu berbuat keonaran atau kekacauan di Mandar, dan berhasil mengalahkannya. Atas keberhasilannya itu, ia pun diangkat menjadi pemimpin *Appe Banua Kaiyang* dan menjadi pemegang kendali atas daerah-daerah tersebut. Dengan demikian terbentuk kesatuan pemerintahan dan inilah yang menjadi dasar berdirinya Kerajaan Balanipa yang berpusat di Napo. Sejak itu merupakan awal munculnya budaya politik lokal di kerajaan ini.

Pasca berdirinya Kerajaan Balanipa, I Manyambungi melakukan pembenahan wilayah dengan membuat peraturan dalam berbagai bidang, terutama pada persyaratan pengangkatan seorang *mara'dia* serta pemberhentiannya. Aturan-aturan itulah yang kemudian menjadi pola acuan yang berkelanjutan sepanjang wilayah tersebut

menganut sistem kerajaan. Selain itu, istilah dalam pemerintahan pun berubah nama; misalnya *Tomakaka* menjadi *Papuangang* (yang dipertuan) atau seseorang yang disapa dengan *Puang* terutama penguasa wilayah *Appe Banua Kaiyang*. Selain itu, ia juga menjadi anggota *Ada' Kaiyang* (adat besar) dan berhak memilih dan memberhentikan *mara'dia* dalam Kerajaan Balanipa.

I Manyambungi juga membuat kontrak politik dalam pemerintahannya (ikrar dan *assitalliang*) bersama atas dasar mufakat antara rakyat dengan *mara'dia*. Dalam perjanjian tersebut, telah diatur batas-batas kewenangan antara kedua pihak, baik menyangkut hak dan kewajiban *mara'dia* terhadap rakyatnya, begitu juga sebaliknya. Ikrar dan *assitalliang* ini selalu diucapkan pada pelantikan *mara'dia* berikutnya. Mengapa mesti diulang setiap kali pelantikan sebab hal tersebut merupakan persyaratan mutlak yang tak dapat ditawar adanya. Budaya politik itu berlangsung hingga wilayah ini masih berstatus sebagai kerajaan. Bahkan sampai sekarang ketika lembaga adat Kerajaan Balanipa diaktifkan kembali, ikrar dan *assitalliang* itu diucapkan oleh calon *mara'dia* yang dilantik.

Peran lembaga *Ada'Sappulo Sokko*, memegang peranan yang sangat penting pada masa kerajaan. Lembaga ini berfungsi ganda dalam sistem pemerintahan kerajaan, satu sisi ia adalah pembantu *mara'dia* dan di sisi lain ia adalah lembaga pembuat aturan atau undang-undang. Selain itu, ia juga adalah pemimpin wilayah pada daerahnya masing-masing yang memiliki lembaga adat tersendiri yang disebut *ada' keccu* (adat kecil). Lembaga ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan kerajaa. Pada masa pemerintahan I Manyambungi, lembaga ini baru beranggotakan tiga orang sehingga disebut *Tallu Sokko*. Pada masa pemerintahan *mara'dia* Balanipa ke-2 yang bernama Tomepayung, maka lembaga ini beranggotakan menjadi sepuluh orang sehingga disebut *Ada' Sappulo Sokko*. Sepu-

luh orang anggota adat inilah yang bertahan dari masa ke masa hingga statusnya sebagai kerajaan dihapuskan.

Dalam sistem budaya politik lokal di Kerajaan Balanipa, hubungan antara pejabat dengan masyarakat dilakukan secara berjenjang melalui pejabat kerajaan yang berkuasa di wilayah bawahannya. Misalnya pada wilayah *Appe Banua Kaiyang*, masyarakat dapat menyampaikan masalah-masalahnya melalui pemangku adatnya sendiri yang disebut adat kecil (*ada' keccu*). Setelah menerima permasalahan dari masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada pemimpin wilayah untuk ditentukan penyelesaiannya. Jika hal itu harus diselesaikan ditingkat pusat maka harus diserahkan kepada lembaga adat *Sappulo Sokko* untuk dibahas dan diselesaikan.

Persoalan-persoalan kemasyarakatan yang sudah dibahas oleh adat *Sappulo Sokko*, hasilnya lalu diserahkan kepada *mara'dia* Balanipa. Kemudian *Mara'dia* Balanipa menyerahkan kembali hasil pembahasan itu kepada anggota Dewan Adat *Sappulo Sokko* untuk seterusnya disampaikan kepada masyarakat untuk diterapkan pelaksanaannya. Hubungan langsung antara pejabat tingkat pusat dengan masyarakat sangat jarang terjadi, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti upacara adat atau pertemuan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum. Gambaran ini memperlihatkan kepada kita bahwa Kerajaan Balanipa telah menganut azas demokrasi dimana kekuasaan *mara'dia* dibatasi oleh lembaga adat.

Sistem pengawasan terhadap para pelaku atau pemangku pemerintahan secara nyata tidak ditemukan adanya pejabat tersebut. Tetapi yang menjadi pengawas terhadap jalannya roda pemerintahan dan prilaku pejabatnya adalah Dewan *Adat Kaiyang* atau adat besar yang anggota-anggotanya adalah para penguasa wilayah inti kerajaan yaitu *Appe Banua Kaiyang*. Selain itu, juga pejabat pemangku *Adat Sappulo Sokko*, terlibat dalam hal pengawasan terha-

dap jalannya roda pemerintahan, terutama *Papuangan Biringlem-bang* dan *Papuangan Limboro*. Kedua orang ini memang memiliki peran yang sangat besar sebab ia juga adalah ketua dan wakil ketua dari lembaga Adat *Kaiyang* atau adat besar dengan fungsinya melantik dan membuat ikrar atas nama rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2010. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Mandar* (naskah Mandar). Majene: Pemerintah Kabupaten Majene (Disporabudpar).
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2011. *Mandar Nol Kilometer: Membaca Mandar lampau dan Hari Ini*. Jogyakarta: Ombak.
- Amir, Muhammad. 2011. "Konflik Balanipa-Belanda Di Mandar 1862-1872". (Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Anonim. Tanpa Tahun. *Lontara' Binuang*.
- Asdy, Ahmad. 2003. *Mandar Dalam Kenangan; Tentang Latar Belakang Keberadaan Arayang Balanipa ke-25*. Polewali: Yayasan Mahaputra Mandar.
- Bodi dan Ulfiani Rahman. 2006. *Bahasa Busana Mandar*. Ciputat, Tangerang: Nuqtah.
- Bodi dan Sapriillah. 2011. *Mala'bi' Identitas Orang Mandar*. Surakarta: Zada Haniva Publishing.
- Daud, Muhammad Amin. 2007. *Mengenal Struktur dan Sistem Pe-*

- merintahan Kerajaan Balanipa, Mandar*. Polman: Lembaga Kerapatan Warga Istiadat Budaya Balanipa, Mandar.
- Hamzah, M. Darwis. 1987. "Hakekat Budaya Mandar". Makalah yang disampaikan pada Seminar Kebudayaan Mandar tanggal 25-28 November 1987 di Polewali Mamasa.
- Karim, Abd. 2014. "Kerajaan Balanipa Pada masa Kekuasaan I Mandawari 1870-1906". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Kila dan Muhammad Amir. 2007. *Sejarah Polewali Mamasa: Dari Tomanurung Sampai Awal Abad XX*. Polmas: Pemkab Polmas kerjasama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kila, Syahrir. 2013. *Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa dan Perkembangannya*. Makassar: De la macca.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Jogyakarta: Tiara Wacana.
- Leyds. 1940. *Memori Asisten Residen Mandar* (terj.) Makassar: Yayasan Kaitupa.
- Mandra, dkk. 1986. *Inventarisasi, Transliterasi, Terjemahan dan Pengungkapan Latarbelakang Nilai Serta Isi Naskah Kuno/Lontarak Mandar Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Mandra. 1987. "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Pemerintahan Tradisional Mandar". Makalah yang disampaikan dalam seminar kebudayaan Mandar, di Kabupaten Polmas pada tanggal 25-28 November 1987.
- Mandra. 2009. *Assitalliang: Beberapa Perjanjian Mandar Pada Masa Pemerintahan Tradisional*. Majene: Yayasan Sa'Adawang.
- Mandra. 2010. *Mottiana Mandar*. Makassar: Kretakupa Print Makassar.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

- Mattulada, Thamrin. 2014. *Pertarungan Elite Lokal Di Bumi Batara Guru*. Makassar: Pustaka Sawerigading.
- Rahman. 1987. "Sistem Kekerabatan dan Politik di Balanipa; Suatu Cerminan Hubungan Balanipa-Gowa (Makassar) Abad ke-16 sampai Abad ke-17 Masehi". Makalah disampaikan pada seminar Sejarah Kebudayaan Mandar di Kabupaten Polmas, dari 25-28 November 1987 oleh STKIP-DDI.
- Rahman. 2014. *Puang dan Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar*. Surakarta: Zada Haniva Publishing kerjasama Yayasan Menara Ilmu Makassar.
- Sewang, Ahmad. 1980. "Peranan Islam Dalam Pergerakan KRIS-MUDA di Daerah Mandar". Skripsi Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Alauddin, Ujung Pandang.
- Syah, Azis. 1987. "Akulturasi Kulture Antar Kelompok Masyarakat di Kawasan Mandar Tempo Dulu". Makalah yang disampaikan dalam Seminar Kebudayaan Mandar di Kabupaten Polmas pada 25-28 Nonember 1987 oleh STKIP- DDI.
- Syah, Azis. 1991. *Lontara' Pattodioloang di Mandar Jilid 1 (terjemahan)*. Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja.
- Syah, Azis. 1992. *Lontarak Pattodioloang di Mandar Jilid II (terjemahan)*. Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja.
- Syah, Azis. 1997. *Sejarah Mandar: Polmas, Majene-Mamuju Jilid I*. Ujung Pandang: Al'Azis.
- Syah, Azis. 1998. *Sejarah Mandar: Polmas, Majene-Mamuju Jilid II*. Ujung Pandang: Al'Azis.
- Syam, A.M. Sarbin. 1997. *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*. Polewali: Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa.
- Syarifuddin, Amier. 1989. "Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak". Ujung Pandang. Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

- Saharuddin. 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar) Dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: CV. Mallomo.
- Saharuddin, 1987. "Peranan Todilaling dan Puang Dipoyosang Dalam Pengembangan Kebudayaan Mandar". Makalah Seminar Kebudayaan Mandar yang diselenggarakan di Polewali pada 25 –28 November 1987 oleh STKIP-DDI Polmas.
- Sinrang, Syaiful. 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas (I); Perjuangan Rakyat Mandar, Sulawesi Selatan Melawan Belanda 1667-1945*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio.
- Yasil, Suradi. dkk. 1985. *Transliterasi dan Terjemahan Isi Naskah Kuno Sulawesi Selatan (Lontarak Mandar)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud.
- Zuhro, R. Siti, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Jogyakarta: Ombak.

INDEKS

A

- abaraniang Mandar 91
Abdurrahimi Kamaruddin 55
ada' keccu (adat kecil) 6, 100
Allamungang Batu 48
amanarangang Mandar 91
ana' banua viii, 17, 67, 70
andong guru 25
Annangguru 45
Appe Banua Kaiyang xii, 6, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
38, 39, 64, 67, 70, 71, 72, 77,
85, 86, 95, 98, 99, 100, 101
Aruang Mapilli 49
Aruang Nepo 49
Aruang Tomadio 49
Arung Palakka 6, 8, 61
assitalliang 33, 34, 39, 49, 65, 66,
86, 100
asugiang Mandar 91

B

- Banggae 8, 9, 59, 87
baru' 58
bidal (tukang azan) 53
bija 45, 89
Binuang 43, 50, 53, 54, 55, 87, 107
Biringlembang 38, 39, 70, 85, 86,
94, 95, 102
Bupati 91
Burio 60, 78
Buttu 35, 61, 78

C

- Campalagian 96

D

- Daeng Massikki 60
Daeng Riosok 8
De la macca 9, 108
dipasung 66
dona-dona 55

doya (pembawa kotak amal) 53
DPR 65, 88, 90

G

Gamoe 58
Gowa ix, 4, 6, 10, 27, 28, 29, 30,
31, 37, 38, 42, 49, 50, 58, 59,
61, 99, 109
gunung akulah 73

H

homogeneous 22
Hulu Saddang 4

I

Ibeloratte 4
Ibokkapadang 4
ikrar Tamajarra 43
Isanrabone 4
Itandijokjo 58

J

Jawa 14, 18, 110
Joa Matoa 45
Joa Pakkangbusu 45
Joa Passinapang 45

K

Kadi 54
kali (kadhi) 70
katte (khatib) 53
kaum ada' 42, 72, 74

kerajaan palili 50

L

Lakkading 60, 78
Lembaga Kerapatan Warga
Istiadat Budaya Balanipa
Mandar (LKWIB-BM) 94
Lempong 3, 26, 31
Lenggo 3, 23, 24, 31
Lerang 3, 26, 30, 31
Limae Ajattappareng 58
Limboro 16, 33, 38, 39, 70, 72, 73,
79, 86, 87, 94, 95, 102
lontarak xv, 8, 9, 10, 38, 40, 52

M

Makassar iv
Mamuju 14, 16, 18, 109
Mamuju Utara 14
Mandar 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
36, 38, 41, 42, 44, 48, 49
Mannawari 78
mara'dia malolo 45, 53, 67, 70, 82
mara'dia matoa 44, 45, 46, 51,
57, 67, 70, 82, 86
mara'diana sara 53, 56, 70
Maroneng 58
Matakali 96
Matangnga 96
militer 91
Mirring 55
Mosso 3, 24, 25, 31, 82, 95, 98
muking patappulo 54

N

Napo 3, 5, 23, 24, 25, 26, 28, 30,
31, 38, 40, 51, 71, 82, 83, 95,
98, 99

P

Pabbicara Kaiyang 38, 39, 86,
87, 94

Pa'burasang 45

Pajalele 58

Paku 55, 58

Pamboang 8, 9, 45, 60, 87

Pangale 23, 24

Pangnga Tamerus 53

papuangang Rui 46

Papuangang Tamangalle 38

Passokkorang 3, 23, 24, 26, 27,
28, 30, 33, 36, 37, 44, 46, 48,
50, 71

Persekutuan Pitu Babana
Binanga (PBB) 7

Persekutuan Pitu Ulunna Salu
(PUS) 7

Pitu Babana Binanga vi, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 17, 42, 43, 46, 48,
49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 78,
95, 109

Pitu Ulunna Salu 7, 10, 42, 48, 51,
52, 58, 87

Polewali vii, 9, 10, 14, 15, 16, 96,
107, 108, 109, 110

Polewali Mamasa (Polmas) 15

Polewali Mandar (Polman) 14, 15
poroambi 25

Puang ix, 4, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 51, 65, 71, 72, 73,
79, 95, 100, 109, 110

Puang Dipoyosang ix, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 51, 65, 71, 72,
73, 110

Puang Dirano 38

Puang Limboro 33, 72, 73, 79, 95

puang ressu 67, 90

puang salessor 90

puang sangnging 67, 90

puang sassigi 45, 67, 90

puang separapa' 90

Puang Sodo 39

puang talluparapa 90

punggawa 25

R

ranuh 90

Renggeang 23, 24

Rias Rasyid Daeng 10

S

Samasundu 3, 25, 51, 82, 95, 98

sappulo sokko ada' 46, 47

Sawitto 58

Sendana 6, 8, 9, 17, 51, 54, 87

Sikkiri'na 60

Sipajonga 55

Sipamanda di Luyo 51

so'bo 25

Sungai Madatte 51

suro 46

T

Tabittoeng 4
taik 54
Tallu Sokko 40, 100
Tandasura 24
Tapango 96
Tau Pia 67, 68
Tinambung viii, 16, 17, 18
toacca Bugis 91
Todangtodang 17, 25, 82, 95, 98
Todatodang viii, 3
Todiboseang 57, 59, 60
Todigajang 57, 79
Todijallo 44, 51, 52, 79
Tolambusu 60, 61
tomakaka ix, 3, 5, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 64,
71
Tomakaka Passokkorang 23, 26,
27, 28, 71

Tomappelei Musus'na 78
Tomatindo 59, 60, 61, 78
Tomatindo di Barugana 78
Tomatindo di Burio 60, 78
Tomatindo di Buttu 61, 78
Tomatindo di Lakkading 60, 78
Tomatindo di Langgana 78
Tomatindo di Lanrisang 78
Tomatindo di Marica 78
Tomatindo di Pattinna 78
Tomelloli 78
Tomepayung xi, xii, 4, 6, 28, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 70, 81, 100
Tomessu di Kotana 78
tosugi Bugis 91
towarani Bugis 91

W

Walikota 91
Wonomulyo 14

TENTANG PENULIS

Syahrir Kila, lahir di Lasape, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, 19 Februari 1960. Ayah bernama Kila Ali, dan ibu bernama Hj. Isyah. Pekerjaan adalah peneliti di Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memperoleh gelar sarjana di Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin pada tahun 1986; kemudian mengikuti pendidikan S2 pada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada tahun 2005, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Telah melakukan berbagai penelitian tentang sejarah yang diterbitkan oleh berbagai penerbit di Makassar. Juga menulis pada Jurnal Akreditasi Nasional dan tidak terakreditasi. Mengikuti berbagai kegiatan seminar sejarah dan budaya, baik lokal maupun nasional.

BUDAYA POLITIK KERAJAAN BALANIPA MANDAR

Budaya politik Kerajaan Balanipa dimulai dari kepemimpinan *Tomakaka* yang awalnya diharapkan dapat menjamin ketentraman masyarakat, Sejumlah *Tomakaka* yang ada ini justru ternyata berbuat sewenang-wenang dan berambisi untuk menguasai sesamanya. Kondisi itu menyebabkan empat *Tomakaka* mempersatukan diri dalam satu ikatan kebersamaan yang dikenal dengan nama *Appe Banua Kaiyang*.

Appe Banua Kaiyang mencari pigur pemimpin yang dapat mengatasi persoalan. Pencarian lalu tertuju kepada I Manyambungi. Persoalan muncul sebab tokoh yang dimaksud berada di Kerajaan Gowa. *Appe Banua Kaiyang* mengirim utusan untuk menjemput I Manyambungi agar dapat dikembalikan ke Mandar. Pada waktu kembali ke negerinya, ia lalu memerangi para *Tomakaka* yang selalu berbuat kekacauan di Mandar. Atas keberhasilannya itu, ia diangkat menjadi pemimpin *Appe Banua Kaiyang* dan menjadi pemegang kendali atas daerah-daerah tersebut.

Sejak itu merupakan awal munculnya budaya politik lokal di kerajaan ini. I Manyambungi melakukan pembenahan wilayah dengan membuat peraturan dalam berbagai bidang, terutama pada persyaratan pengangkatan seorang *maradia* serta pemberhentianya. Aturan-aturan itulah yang kemudian menjadi pola acuan yang berkelanjutan sepanjang wilayah tersebut menganut sistem kerajaan.

ISBN: 978-979-3570-85-3



9 789793 570853

PUSTAKA
REFLEKSI

Wahana
RUMAH BUKU

KELOMPOK PUSTAKA REFLEKSI

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No.10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5047064.
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172
Email: arusbok@yahoo.co.id